



PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
TAHUN 2019



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih memerlukan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada para stakeholder yang telah memberikan kontribusi pemikiran, waktu dan tenaga sehingga laporan ini dapat terlaksana dengan baik.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Sekian dan terimakasih.

Palu, Maret 2020
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
INSPEKTORAT DAERAH
JALAN DEWI SARTIKA NOMOR 47 TELP. 0451- 488152 PALU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palu, 23 Maret 2020

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,


Drs. M. MUCHLIS, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19710222/199012 1 001

DAFTAR ISI

1.	Kata Pengantar	ii
2.	Pernyataan Telah Direvisi	iii
3.	Daftar Isi	iv
4.	Daftar Gambar	v
5.	Daftar Tabel	x
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Tengah.....	2
	1.3 Capaian Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Sosial.....	25
	1.4 Isu Strategis.....	42
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	56
	2.1 Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.....	56
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	82
	3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2019.....	83
	3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	88
BAB IV	PENUTUP	226
	4.1 Kesimpulan.....	226
	4.2 Strategi Peningkatan Kinerja.....	226

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Piramida penduduk Sulawesi Tengah 2019	6
Gambar 1.2	<i>Trend</i> Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2019 (Persen).....	22
Gambar 1.3	Laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dalam perspektif regional SALAMPUA Tahun 2019 (Persen)	23
Gambar 1.4	<i>Perkembangan nilai PDRB</i> Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2019 (Miliar Rupiah)	24
Gambar 1.5	Perkembangan PDRB Nominal Perkapita (juta rupiah) Provinsi Sulawesi Tengah, periode 2014-2019.	26
Gambar 1.6	Perkembangan laju inflasi tahunan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, periode 2014-2019..	30
Gambar 1.7	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2012-2019. .	32
Gambar 1.8	Kondisi Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah dalam Perspektif Regional SULAMPUA, tahun 2019	33
Gambar 1.9	Perkembangan Indeks Gini Ratio Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2012-2019	34
Gambar 1.10	<i>Kondisi Indeks Gini</i> Provinsi Sulawesi Tengah dalam perspektif Pulau Sulawesi, September 2019	35
Gambar 1.11	Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Tengah, periode 2013-2018..	36
Gambar 3.1	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja persentase jaringan jalan dalam kondisi	

	baik Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	88
Gambar 3.2	Gubernur meninjau jalan provinsi ke Kolonodale	89
Gambar 3.3	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja persentase rumah tangga pengguna listrik Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	91
Gambar 3.4	PLTA Sulewana di Kabupaten Poso	92
Gambar 3.5	Konsumsi listrik per Kapita Sulawesi Tengah (kWh/kapita) Sektor Rumah Tangga	92
Gambar 3.6	Rasio Elektrifikasi 2013 - 2019	93
Gambar 3.7	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja persentase rumah tangga pengguna air bersih tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	96
Gambar 3.8	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja persentase rumah layak huni Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	97
Gambar 3.9	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Kegiatan stimulasi rehabilitasi/pembangunan rumah akibat bencana alam Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019	100
Gambar 3.10	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian	

	kinerja kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	100
Gambar 3.11	Jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah Tahun 2012 - 2019	104
Gambar 3.12	Persentase penduduk miskin menurut provinsi, September 2018	107
Gambar 3.13	Perkembangan Gini Ratio Sulawesi Tengah maret September 2019	110
Gambar 3.14	Gini ratio menurut Provinsi Se-Sulawesi September 2018, Maret 2019 dan September 2019	112
Gambar 3.15	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja persentase koperasi aktif ATahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	113
Gambar 3.16	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	116
Gambar 3.17	Perbandingan realisasi investasi, jumlah perusahaan yang berinvestasi, jumlah dokumen perizinan yang dikeluarkan dan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 dan 2019	127
Gambar 3.18	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja peningkatan indeks pembangunan	

	gender Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	131
Gambar 3.19	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja peningkatan indeks pemberdayaan gender Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	132
Gambar 3.20	Sail Tomini ...	135
Gambar 3.21	Festival Danau Poso .	136
Gambar 3.22	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tingkat pengangguran terbuka tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD .	138
Gambar 3.23	Perkembangan TPT menurut daerah tempat tinggal dan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada periode 2018-2019 ..	139
Gambar 3.24	Tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Tengah di Kawasan SULAMPUA Agustus 2018 ..	141
Gambar 3.25	Tingkat pengangguran terbuka menurut Provinsi Tahun 2018 ..	141
Gambar 3.26	Perkembangan tingkat partisipasi angkatan menurut jenis kelamin di Sulawesi Tengah, 2018-2019 ..	144
Gambar 3.27	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja persentase Kabupaten/kota tidak tertinggal Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	145
Gambar 3.28	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja persentase kerusakan kawasan hutan Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	150
Gambar 3.29		151
Gambar 3.30		

	Kawasan hutan lindung Lore Lindu di Kabupaten Sigi	166
Gambar 3.31	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian	171
Gambar 3.32	kinerja nilai tukar nelayan Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target	171
Gambar 3.33	akhir RPJMD .	172
Gambar 3.34	Bandeng bebas duri ..	
	Budidaya udang supra intensif skala rakyat di	173
Gambar 3.35	Mamboro Kota Palu	
	Kolam budidaya hemat air di Kabupaten Sigi.	175
Gambar 3.36	Kolam ikan semi intensif teknologi bioflok di	179
Gambar 3.37	Kota Palu ...	
	Proses pembelajaran pendidikan keaksaraan	182
Gambar 3.38	dan kesetaraan di Kabupaten Parigi Moutong ..	
	SMP Negeri 2 Palu	185
Gambar 3.39	Trend jumlah dan angka kematian bayi Provinsi Sulawesi tengah Tahun 2017-2019 .	
	Distribusi peserta JKN KIS berdasarkan	187
Gambar 3.40	Segmentasi Tahun 2019 ..	
	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian cakupan peserta KB aktif Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target	190
	akhir RPJMD .	
	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja persentase pra sejahtera dan sejahtera I Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2019	5
Tabel 1.2	Potensi minyak dan gas bumi di Provinsi Sulawesi Tengah	9
Tabel 1.3	Produksi perikanan menurut jenis usaha di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 - 2019 (Ton)	10
Tabel 1.4	Perkembangan produksi padi dan palawija Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2019	11
Tabel 1.5	Perkembangan produksi tanaman perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2019	13
Tabel 1.6	Perkembangan neraca perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2015-2019	15
Tabel 1.7	Distribusi PDRB ADHB menurut komponen pengeluaran Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 - 2019	25
Tabel 1.8	Perkembangan indikator ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah, periode 2015-2019	28
Tabel 1.9	Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2018-2019	28
Tabel 1.10	Inflasi pada masing-masing kelompok pengeluaran di Kota Palu, Tahun 2019	31
Tabel 1.11	Perkembangan komponen IPM di Provinsi	33

Sulawesi Tengah, Tahun 2015-2019.

Tabel 1.12	Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	42
Tabel 2.1	Perumusan Penjelasan Visi	50
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran 2016-2021.	55
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	57
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019	62
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	72
Tabel 3.2	Capaian IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019.	73
Tabel 3.3	Pencapaian IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 di ukur dengan skala nilai peringkat kinerja	77
Tabel 3.4	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase IKM Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD	78
Tabel 3.5	Survei IKM Tahun 2019	
Tabel 3.6	Target, realisasi dan perbandingan kinerja opini BPK, nilai akuntabilitas kinerja dan nilai reformasi birokrasi tahun 2016, 2017 dengan RPJMD	79 81
Tabel 3.7	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD	82
Tabel 3.8	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja indeks reformasi birokrasi Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD	85

Tabel 3.9	Rasio elektrifikasi Sulawesi tengah Tahun 2019 .	94
Tabel 3.10	Lokasi pemasangan instalasi dan sambungan listrik gratis Tahun 2019	95
Tabel 3.11	Data Kondisi Perumahan di Sulawesi Tengah Tahun 2019	99
Tabel 3.12	PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Sektor Pertambangan dan Penggalian atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 Tahun 2017 - 2019 (Milyar Rupiah)	102
Tabel 3.13	Perbandingan relisasi kinerja dan capaian kinerja persentase penduduk diatas garis kemiskinan Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD	103
Tabel 3.14	Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sulawesi tengah menurut daerah posisi September 2018 - september 2019	106
Tabel 3.15	Garis kemiskinan menurut Provinsi dan Daerah Maret - September 2019	107
Tabel 3.16	Perbandingan relisasi kinerja dan capaian kinerja Indeks gini tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	109
Tabel 3.17	Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Tahun 2016 - 2019 (dalam unit)	114
Tabel 3.18	Perbandingan relisasi kinerja dan capaian kinerja ekspor bersih perdagangan Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	118
Tabel 3.19	Ekspor berdasarkan Nilai Tahun 2013-	119

	2019 (US\$ Juta)	
Tabel 3.20	Ekspor berdasarkan Volume Tahun 2013-2019	119
Tabel 3.21	Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2019 (US\$ Juta)	120
Tabel 3.22	Rekapitulasi Ekspor menurut Negara Tujuan Tahun 2019 (SKA)	121
Tabel 3.23	Ekspor berdasarkan nilai di kawasan Sulampua tahun 2018	122
Tabel 3.24	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja pertumbuhan industri Tahun 2017, 2018 dan capaian Tahun 2018 terhadap target akhir RPJMD	123
Tabel 3.25	Jumlah Unit Usaha Industri Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kelompok industri	124
Tabel 3.26	Jumlah unit usaha industri Provinsi Sulawesi Tengah	125
Tabel 3.27	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja nilai realisasi investasi PMDN dan PMA Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	126
Tabel 3.28	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja jumlah kunjungan wisman dan wisnus Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	134
Tabel 3.29	Tingkat pengangguran terbuka menurut kabupaten/kota (persen) periode Agustus 2018 - Agustus 2019	140
Tabel 3.30	Perbandingan realisasi kinerja dan	

	capaian kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	142
Tabel 3.31	Penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama, 2018 - 2019	143
Tabel 3.32	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja kontribusi PDRB sub sector kehutanan Tahun 2017, 2018 dan capaian Tahun 2018 terhadap target akhir RPJMD	147
Tabel 3.33	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja indeks kualitas lingkungan hidup Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	155
Tabel 3.34	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja nilai tukar petani Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	157
Tabel 3.35	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja kontribusi sector pertanian terhadap PDRB Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2018 terhadap target akhir RPJMD	160
Tabel 3.36	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja jumlah PDRB sub sektor perkebunan Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	161
Tabel 3.37	Jumlah produksi komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019	164

Tabel 3.38	Capaian NTN dan NTPPI Sulawesi Tengah Tahun 2019	167
Tabel 3.39	Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019 Per Kabupaten/Kota	169
Tabel 3.40	Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019 Per Kabupaten/Kota	170
Tabel 3.41	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja nilai ekspor hasil perikanan Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	173
Tabel 3.42	Nilai ekspor hasil perikanan Tahun 2019	174
Tabel 3.43	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja persentase angka melek aksara Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	
Tabel 3.44	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	175
Tabel 3.45	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	177
Tabel 3.46	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD	178
Tabel 3.47	Cakupan pelayanan kontrasepsi Tahun	181

2019

Tabel 3.48	-Realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator sasaran	189
------------	---	-----

BAB I

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentukpertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja

dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Tengah

a. Kondisi Geografis

Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 yang meliputi empat wilayah kabupaten yaitu: Donggala, Poso, Banggai dan Buol Tolitoli. Pada tahun 1994 dibentuklah Kotamadya Palu dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994. Dalam perkembangannya selama kurang lebih tiga puluh lima tahun, tepatnya sejak Tahun 1964 sampai dengan Tahun 1999, terjadi suatu perubahan yang ditandai dengan era Reformasi sebagai konsekuensi perubahan tatanan politik bangsa, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Seiring dengan harapan masyarakat terhadap pemekaran wilayah maka diterbitkan pula Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian maka hingga akhir 2018 Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 12 (dua belas) Kabupaten dan 1

(satu) Kota yang terdiri dari 175 Kecamatan serta 1845 Desa dan 175 Kelurahan.

1. Batas Administrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makasar dan Provinsi Sulawesi Barat

2. Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah adalah 61.841,29km². Sementara untuk wilayah Perairan Laut seluas 193.923,75km², dan secara geografis Provinsi Sulawesi Tengah terletak antara 2⁰22' Lintang Utara dan 3⁰48' Lintang Selatan serta 119⁰22' dan 124⁰22' Bujur Timur.

3. Topografis.

Dilihat dari letak wilayahnya, Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan daratan tinggi serta daratan rendah yang terdapat didaratan, lembah dan berada di daerah pantai. Pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut sbb :

- Daratan rendah dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut sekitar 20,20 persen.
- Wilayah dengan ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut sekitar 27,20 persen,

- Wilayah dengan ketinggian 500-1000 meter dari permukaan laut sekitar 26,27 persen.
- Wilayah dengan ketinggian diatas 1000 meter dari permukaan laut sekitar 26,33 persen.

Demikian juga dengan tingkat kemiringan lahan, yakni:

- Kemiringan 0-2 derajat sekitar 13,00 persen.
- Kemiringan 2,1-15 derajat sekitar 1,00 persen.
- Kemiringan 15,1-40 derajat sekitar 16,10 persen.
- Kemiringan diatas 40,1 derajat sekitar 50,60 persen.
- Pulau-pulau kecil (belum terdata) sekitar 19,30 persen.

Sulawesi Tengah adalah salah satu Provinsi di Pulau Sulawesi yang mempunyai kekayaan alam yang cukup beragam, kandungan mineral, air dan segala isinya, flora dan fauna yang beraneka ragam. Kawasan lindung di Sulawesi Tengah dengan proporsi 35,55% dari luas total wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, daerah kawasan lindung ini menyebar merata diseluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Jenis kawasan lindung di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kriteria kawasan lindung terdiri dari :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi :
 - a . Kawasan hutan lindung
 - b. Kawasan resapan air
2. Kawasan Perlindungan setempat, meliputi :
 - a. Sempadan Pantai
 - b. Sempadan Sungai
 - c. Kawasan sekitar danau

- d. Kawasan sekitar mata air.
- 3. Kawasan suaka alam, meliputi :
 - a. Kawasan cagar alam
 - b. Kawasan suaka marga satwa.
- 4. Kawasan pelestarian alam, meliputi :
 - a. Kawasan Taman Nasional
 - b. Kawasan Taman Hutan Rakyat
 - c. Taman Wisata Alam.
- 5. Kawasan Cagar Budaya
- 6. Kawasan rawan Bencana Alam.
- 7. Kawasan lindung lainnya meliputi :
 - a. Kawasan taman baru
 - b. Kawasan Pantai berhutan bakau

b. Kondisi Demografis

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta penguatan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk suatu wilayah dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui kecenderungan penyebaran penduduk. Jumlah penduduk yang besar cenderung mengelompok pada lokasi tertentu, sehingga menyebabkan pola penyebaran tidak merata. Kepadatan penduduk yang tinggi pada umumnya ditemukan di wilayah perkotaan, karena merupakan sentra aktivitas ekonomi.

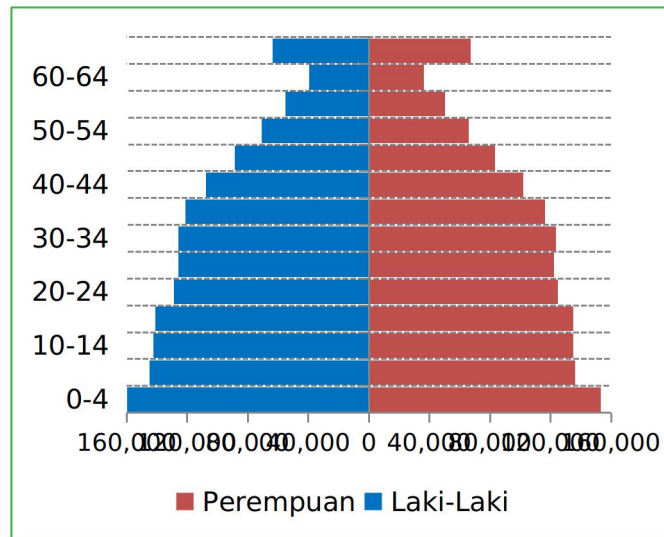
Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan
Penduduk
dan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2016 - 2019

NO.	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.921.715	2.966.325	3.010.443	3.054.023
	- Laki-Laki (Jiwa)	1.492.152	1.514.457	1.536.491	1.558.233
	- Perempuan (Jiwa)	1.429.563	1.451.868	1.473.952	1.495.790
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,57	1,53	1,49	1,45
3.	Tingkat Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	47	48	49	49

Sumber: BPS, 2019

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Sulawesi Tengah selama 4 tahun terakhir dari 2016-2019 cenderung meningkat, yakni dari 2.921.715 jiwa pada tahun 2016 menjadi 3.054.023 jiwa pada tahun 2019. Sementara tingkat laju pertumbuhan penduduk dari 1,57 persen pada tahun 2016 berhasil ditekan hingga menjadi 1,45 persen pada tahun 2019. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk Sulawesi Tengah cenderung meningkat yakni dari 47 jiwa/km² pada tahun 2016 menjadi 49 jiwa/km² pada tahun 2019

Gambar 1.1
Piramida Penduduk Sulawesi Tengah 2019



Sumber: BPS, 2019

Ditinjau dari sebaran penduduk, pada tahun 2019 penduduk di Sulawesi Tengah didominasi oleh kelompok usia muda. Hal ini dapat dilihat dari bentuk piramida penduduk Sulawesi Tengah 2019 yang berbentuk Piramida Penduduk Muda (*Expansive*) (Gambar 1.1). Adapun kelompok usia dengan jumlah tertinggi yaitu kelompok balita (0-4 tahun) yang sebanyak 299.228 jiwa dan jumlah terbanyak berikutnya yaitu kelompok-kelompok usia di atasnya. Sementara itu untuk usia produktif, kelompok penduduk dengan jumlah paling sedikit yaitu kelompok usia 60-64 tahun sebanyak 95.988 jiwa.

C. Potensi Sumber Daya Daerah

1. Potensi Sumber Daya Alam

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, antara lain terdapat potensi bahan galian dan mineral, serta potensi gas dan minyak bumi. Beberapa kandungan mineral yang menjadi andalan Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

Batubara; Lokasi bahan galian terletak di Desa Ensa. Tomata, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali dengan ketebalan lapisan mencapai 0,3-1,0 meter. Batubara jenis gambut (*peat*), lignit, dan brown coal dapat ditemukan di sekitar desa Toaya dan Tamarenja, Kecamatan Sidue, Kabupaten Donggala dengan lokasi penyebaran sekitar 15 Ha. Dari hasil analisa “*grab sampling*”, menunjukkan adanya kadar air 20,79 persen, abu 9,68 persen, *fixed carbon* 29,55 persen, dan belerang 1,26 persen dengan nilai kalori mencapai 4130 Kkal.

Nikel; kandungan Nikel banyak terdapat di Kecamatan Petasia, Bungku Tengah, Bungku Selatan, Kabupaten Morowali dengan Luas Wilayah tambang sekitar 36.635 Ha.

Galena; Galena banyak ditemukan di sungai lewara hulu, Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala.

Emas; produk tambang paling bernilai ini banyak terdapat di beberapa wilayah antara lain Kecamatan Palu Selatan dan Palu Utara, Kota Palu seluas 561.050 Ha; Kecamatan Parigi dan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong seluas 46.400 Ha; Kecamatan Paleleh, Bunobogu, Dondo, Kabupaten Buol seluas 746.400 Ha; Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso seluas 19.180 Ha; dan Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi seluas 228.700 Ha.

Molibdenum; Jenis tambang ini dapat ditemukan di Desa Malala, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli.

Chromit; Mineral ini terdapat di Kecamatan Mori Atas seluas 229 Ha; Kecamatan Bungku Barat dan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali seluas 1.003 Ha; dan

tersebar di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol serta Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tembaga; tambang ini dapat ditemukan di Moutong, Kabupaten Parigi Moutong dan Sungai Bukal, Kabupaten Buol.

Belerang; Terdapat di Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una.

Marmer; Marmer ini terdapat di Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali.

Gibsum; Gypsum ini terdapat di Mamboro Kecamatan Palu Utara, Kota Palu dan Kendek, Kecamatan Banggai Kabupaten Bangkep.

Batu Gamping; Batu gamping terdapat di Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol dan Kabupaten Donggala.

Pospat; Pospat ini terdapat di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso.

Koalin; Koalin ini terdapat di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Lempung dan Tanah Liat; Lempung dan Tanah Liat ini terdapat di kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Donggala.

Batu Giok (Jade); Terdapat di pegunungan Pompangio, S. Kusek, S. Salimuru, S. Mambulaba, S. Uemaramu, S. Uemadago dan S.Kusehmalino, Kabupaten Poso.

Pasir Kuarsa; Terdapat di Desa Moutong, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong dan Desa Lambaku (cadangan 2,5 juta m³) di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Batu Apung; Terdapat di daerah Bulagi, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan.

Selanjutnya potensi minyak bumi dan gas bumi yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Potensi Minyak dan Gas Bumi Di Provinsi Sulawesi Tengah

NO	LOKASI	POTENSI	KETERANGAN
1	Lapangan Tiaka Kec. Bungku Utara Kab. Morowali dan Kec. Toili Barat Kab. Banggai	16,5 – 23 Juta Barel	Produksi mencapai 2000 bph – 5000 bph (Barel per hari)-Minyak Bumi
2	Lokasi Senoro Kec. Toili Kab.Banggai, Terdiri dari Blok Senoro, Donggi dan Matindok (Pertamina EP, Medco dan Mitsubishi,Co)	9,6 Triliun Kaki Kubik	Rencana Eksplorasi
3	Blok Surumana	5.339,63 Km ²	Eksplorasi pada sumur Rangkong, Parangko Pulu dan Tangkasi oleh Exxon Mobile Eksploration)
4	Blok Tomini	10.690 Km ²	Survey
5	Blok Ebuni	7.960,4 Km ²	Survey

Sumber: Dinas Pertambangan dan ESDM Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Potensi Kelautan dan Perikanan

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan Provinsi Sulawesi Tengah. Sektor Kelautan dan Perikanan telah memberi kontribusi rata-rata pertahun sebesar 6,07 persen terhadap perekonomian Sulawesi Tengah. Perkembangan jumlah produksi perikanan budidaya sepanjang tahun 2014-2015 cenderung mengalami kenaikan, akan tetapi pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2014 produksi perikanan budidaya mencapai 1.313.094,86 ton meningkat menjadi 1.396.700,74 ton pada tahun 2015 atau meningkat sekitar 6,39 persen

kemudian pada tahun 2016 sedikit menurun menjadi 1.335.116,07 ton kemudian menurun lagi pada tahun 2017 menjadi 1.059.050,74 ton. Sementara itu, pada perikanan tangkap produksinya dari 267.101,60 ton pada tahun 2014 turun menjadi 174.794,20 ton pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 kembali mengalami kenaikan menjadi 212.330,60 ton kemudian turun lagi pada tahun 2017 menjadi 174.049,30 ton. Penerun produksi semakin terlihat pada tahun 2018 yakni 918.174, 41 ton. Pada tahun 2019 Pemerintah Daerah berusaha memaksimalkan upaya peningkatan produksi sehingga dapat naik pada angka 942.336,92, pencapai ini belum dapat melebihi dari tahun-tahun sebelumnya di karenakan keterbatasan benih berkualitas, biaya pengiriman yang semakin tinggi serta faktor cuaca. Secara rinci perkembangan produksi perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Produksi Perikanan Menurut Jenis Usaha Di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2015 - 2019 (Ton)

JENIS USAHA PERIKANAN	2015	2016	2017	2018	2019
Perikanan Budidaya	1.396.700,74	1.335.116,07	1.059.050,30	918.174,41	942.336,92
a. Tambak	113.201,97	120.098,80	104.939,86	128.481,71	37,30
b. Budidaya Laut	1.274.288,60	1.206.664,25	937.070,10	769.223,47	901.476,30
c. Kolam	8.039,99	7111,94	4.524,64	18.014,59	2.976,20
d. Karamba	25,27	26,29	27,00	24,71	25,00
e. Jaring Apung dan Sawah	1.144,91	1.214,79	12.473,70	2.429,93	559,40
Perikanan Tangkap	174.794,20	212.330,60	174.964,00	171.115,1	193.178,7
a. Laut	174.794,20	210.140,20	174.049,30	918.174,41	942.336,92
b. Perairan	-	2.190,40	914,70	128.481,71	37,30

JENIS USAHA PERIKANAN	2015	2016	2017	2018	2019
Umum					

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2019

3. Potensi Pertanian dan Perkebunan

a. Pertanian Tanaman Pangan

Kebijakan pembangunan bidang ekonomi nasional diarahkan pada peningkatan sektor industri dengan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan pembangunan daerah di Sektor Pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis.

Tabel 1.4
Perkembangan Produksi Padi dan Palawija
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2019

NO	KOMODITI	2015	2016	2017	2018	*2019	
1.	Padi (Sawah+Ladang)						
	- Luas Panen (Ha)	209.057	221.272	235.533	204.158	526.521	
	- Produktivitas (Ku/Ha)	48,57	49,08	48,11	46,77	44.85	
	- Produksi (Ton)	1.015.368	1.086.074	1.133.122	954.794	1.150.437	
2.	Jagung						
	- Luas Panen (Ha)	32.502	62.175	73.027	93.551	129.765	
	- Produktivitas (Ku/Ha)	40,34	51,10	46,18	41,33	42.82	
	- Produksi	131.12	317.71	337.23	386.60	555.58	

NO .	KOMODITI	2015	2016	2017	2018	*2019	
	(Ton)	3	7	9	6	9	
3.	Kedelai						
	- Luas Panen (Ha)	7.094	8.867	2.906	21.107	5.594	
	- Produktivitas (Ku/Ha)	18,71	17,32	14,65	12,59	14.43	
	- Produksi (Ton)	13.270	15.358	4.257	26.573	8.073	
4.	Kacang Tanah						
	- Luas Panen (Ha)	2.928	3.246	2.712	2.803	2.085	
	- Produktivitas (Ku/Ha)	16,88	13,58	11,71	12,24	10.29	
	- Produksi (Ton)	4.943	4.409	3.176	3.432	2.147	
5.	Kacang Hijau						
	- Luas Panen (Ha)	764	943	639	698	469	
	- Produktivitas (Ku/Ha)	8,22	8,25	8,20	8,20	8.20	
	- Produksi (Ton)	628	779	524	573	384	
6.	Ubi Kayu						
	- Luas Panen (Ha)	2.231	1.801	1.941	1.993	1.687	
	- Produktivitas (Ku/Ha)	211,99	193,78	264,29	293,13	282.56	
	- Produksi (Ton)	47.295	34.909	51.299	58.429	47.656	
7.	Ubi Jalar						
	- Luas Panen (Ha)	1.533	1.106	1.199	1.314	1.087	
	- Produktivitas (Ku/Ha)	108,61	142,18	130,26	150,60	187.65	
	- Produksi (Ton)	16.650	15.735	15.622	19.791	20.396	

Sumber: Dinas Pangan Daerah Prov. Sulteng)

Pembangunan di sektor pertanian menjadi lebih penting disebabkan sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah merupakan daerah pertanian dan mata pencaharian penduduknya adalah bercocok tanam/berkebun dan

nelayan. Perkembangan produksi palawija di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2019 cenderung meningkat. Pada Tahun 2019, produksi tertinggi yakni komoditi padi sawah dengan produksi mencapai 1.150.437 ton dan luas panen 526.521 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 44.85 kw/ha, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah komoditi jagung dengan produksi mencapai 555.589 ton dan luas panen 129.765 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 42,82 kw/ha, dan komoditi ubi kayu dengan produksi mencapai 47.656 ton dan luas panen 1.687 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 282.56 kw/ha.

b. Perkebunan

Perkembangan usaha perkebunan di Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup nyata dengan beberapa komoditas andalan seperti: kakao, cengkeh, dan kelapa. Disamping itu terdapat juga beberapa komoditi potensi lainnya seperti : kemiri, pala dan panili. Komoditi tanaman perkebunan yang merupakan komoditi perdagangan mempunyai peranan strategis, karena disamping merupakan sumber penghasilan devisa negara, juga yang lebih penting lagi adalah mencakup rangkaian kegiatan produksinya termasuk peluang terbukanya lapangan kerja yang cukup menyerap banyak tenaga kerja.

Komoditi tanaman perkebunan yang merupakan komoditi perdagangan mempunyai peranan strategis, karena disamping merupakan sumber penghasil devisa negara, juga yang lebih penting lagi adalah mencakup rangkaian kegiatan produksinya

termasuk peluang terbukanya lapangan kerja yang cukup menyerap banyak tenaga kerja.

Tabel 1.5.
Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2019

NO	KOMODITI	2016	2017	2018	*2019
1.	Kakao				
	- Luas Panen (Ha)	289.194	285.783	283.625	282.773
	- Produksi (Ton)	168.733	134.322,50	125.473	127669,347
2.	Kelapa				
	- Luas Panen (Ha)	215.450	218.144	219.899	215.543
	- Produksi (Ton)	184.486	187.404	193.885	189661,81
3.	Kopi				
	- Luas Panen (Ha)	8.644	8.630	8.883	8.883
	- Produksi (Ton)	2.927	2.647,60	2.816	2437,674
4.	Cengkeh				
	- Luas Panen (Ha)	68.162	71.454	74.740	74.740
	- Produksi (Ton)	17.171	5.314,10	15.132	17897,333
5.	Lada				
	- Luas Panen (Ha)	2.160	2.848	2.808	2.830
	- Produksi (Ton)	162	203,90	223	256,307
6.	Pala				
	- Luas Panen (Ha)	16.551	18.167	20.335	20.585
	- Produksi (Ton)	406	389	337	378,464
7.	Jambu Mete				
	- Luas Panen (Ha)	13.811	14.309	13.744	13.710
	- Produksi	2.150	2.276,90	2.179	2146,125

NO	KOMODITI	2016	2017	2018	*2019
	(Ton)				
8.	Karet				
	- Luas Panen (Ha)	7.968	6.086	7.794	7.798
	- Produksi (Kw/Ha)	3.384	2.301,60	3.698	3933,718
9.	Vanila				
	- Luas Panen (Ha)	478	442	511	468
	- Produksi (Ton)	21	20,60	16	16,119
10.	Kelapa Sawit				
	- Luas Panen (Ha)	169.425	66.411	135.005	145.632
	- Produksi (Ton)	410.128	156.763,70	444.894	445.892,957

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2019

Pada tahun 2019, produksi terbesar masih didominasi oleh tanaman kelapa sawit, kelapa, kakao, dan cengkeh. Produksi tanaman kelapa sawit pada tahun 2019 sebesar 445.892,95 ton, dengan luas panen 145.632 ha meningkat dari tahun 2018 yakni 444.894 ton dengan luas panen 135.005 ha. Produksi tanaman kelapa pada tahun 2019 sebesar 189,66 ton dengan luas panen 215.543 ha sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Produksi komoditas kakao tahun 2019 sebesar 127.669 ton dan luas panen sebesar 282.773, sedikit meningkat dari tahun 2018.

c. Potensi Pasar Luar Negeri

Perdagangan luar negeri Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan melalui transaksi ekspor dan impor. Komoditas andalan ekspor Sulawesi Tengah yang

diperdagangkan terutama berasal dari sebagian besar potensi sumberdaya alam dan hasil industri domestic yang dimiliki wilayah Sulawesi Tengah. Adapun Negara tujuan ekspor meliputi benua Asia, Amerika, dan Eropa. Transaksi ekspor dan impor dilakukan melalui beberapa pelabuhan utama yakni Banggai, Loli, Kolonodale, dan Pantoloan.

Pada tahun 2019 neraca perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami surplus yang cukup besar, lebih besar dibandingkan dengan surplus pada tahun 2018. Selama 4 tahun terakhir ekspor Sulawesi Tengah terus mengalami surplus, hal ini berarti terjadi peningkatan yang lebih baik dari tahun 2015 yang mengalami defisit. Sepanjang tahun 2019, total nilai ekspor Sulawesi Tengah sebesar US\$ 5.893,47 juta, sementara total nilai impor Sulawesi Tengah tercatat US\$ 3.134,92 juta. Dengan demikian maka neraca perdagangan Sulawesi Tengah tahun 2019 mengalami surplus sebesar US\$ 2.758,55 juta.

Tingginya nilai ekspor Sulawesi Tengah didominasi dua komoditas yakni masing-masing besi dan baja senilai US\$ 4.365,54 juta (74,07 persen) dan bahan bakar mineral senilai US\$ 1.121,87 juta (19,03 persen). Sementara itu, kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya terhadap total ekspor masih relatif kecil masing-masing dibawah satu persen.

Tabel 1.6.
Perkembangan Neraca Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2015-2019
(000 000 US \$)

TAHUN	NILAI EKSPOR	NILAI IMPOR	SURPLUS/DEFISIT PERDAGANGAN
-------	--------------	-------------	-----------------------------

2015	503,27	707,84	-204,57
2016	1.470,34	1.137,85	332,49
2017	3.028,97	1.294,74	1.734,23
2018	5.109,18	2 821,08	2.288,10
2019	5.893,47	3.134,92	2.758,55

Sumber: BPS, 2019

d. Potensi Sosial Budaya

Suku bangsa Kaili merupakan penduduk mayoritas di Provinsi Sulawesi Tengah, disamping suku-suku bangsa besar lainnya seperti Dampelas, Kulawi dan Pamona. Orang Kaili dan Dampelas menganut agama Islam, sedangkan orang Kulawi dan Pamona merupakan penganut agama Kristen. Selain itu secara keseluruhan masih ada suku-suku bangsa lainnya yang tidak begitu besar jumlahnya, yaitu Balaesang, Tomini, Lore, Mori, Bungku, Buol Tolitoli, Saluan, Balantak dan lain-lain.

Secara tradisional, masyarakat Sulawesi Tengah memiliki seperangkat pakaian adat yang dibuat dari kulit kayu ivo (sejenis pohon beringin) yang halus dan tinggi mutunya. Pakaian adat tersebut dibebankan untuk kaum pria dan kaum wanita. Adapun unsur-unsur adat dan budaya yang dimiliki dan melekat dikultur masyarakat Sulawesi Tengah antara lain:

Pakaian adat terbuat dari kulit kayu ivo.

Rumah adat yang disebut tambi.

Upacara adat seperti:

- Upacara perkawinan
- Upacara kelahiran
- Upacara kematian
- dan upacara adat lainnya.

Kesenian yang meliputi:

- Modero-Tari pesta panen
- Vaino-Pembacaan syair-syair pada saat kedukaan.
- Dadendate.
- Kakula
- Lumense dan Paule Cinde-tari untuk menyambut

tamu

terhormat.

- Mamosa-Tarian perang
- Morego-Tari menyambut pahlawan
- Pajoge-Tari pelantikan raja/pejabat.
- Balia-Tarian yang berkaitan dengan kepercayaan animisme, yaitu pemujaan terhadap benda keramat, khususnya yang berhubungan dengan pengobatan tradisional, terutama kepada orang yang terkena pengaruh roh jahat.

Selain adat dan budaya yang merupakan ciri khas daerah, di Sulawesi Tengah juga memiliki kerajinan-kerajinan yang unik, yaitu antara lain:

Kerajinan kayu hitam (ebony).

Kerajinan anyaman.

Kerajinan kain tenun Donggala.

Kerajinan pakaian kulit ivo.

e. Potensi Wisata

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang banyak memiliki hasil kekayaan alam (panorama alam) yang sangat menarik dan mempesona untuk dijadikan sebagai obyek wisata yang perlu dan patut untuk dikembangkan dalam rangka menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Adapun

obyek-obyek wisata yang terdapat di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

(1) *Obyek Wisata Alam*, terdapat di:

Kabupaten Sigi, yaitu :

- Taman Nasional Lore Lindu (Hutan Wisata Lindu) seluas

230.000 Ha, yang mengandung potensi flora dan fauna tropis

khas Sulawesi Tengah dan patung megalit.

- Hutan wisata Kamarora
- Air terjun Wera
- Camping Ground Paneki
- Lokasi penghijauan Ngata Baru
- Permandian air panas Bora
- Taman rekreasi Mantikole (Kec. Dolo)

Kabupaten Parigi Moutong, yaitu :

- Pemandangan alam kebun kopi
- Air terjun Lingkungavali (Kec. Ampibabo)
- Tugu khatulistiwa Sinei (Kec. Tinomo)

Kabupaten Poso, yaitu :

- Kawasan Danau Poso
- Air Luncur bertingkat 12 “Saluopa”
- Air terjun Sulewana
- Taman anggrek Hitam Bancea, Goa Pamona
- Air panas di Bokokau, Lengkeka, Lageroa, Tuare (Kecamatan Lore Selatan)
- Permandian Matiandano (Desa Bancea)
- Taman Nasional Lore Lindu (Kecamatan Lore Utara-Selatan)
- Permandian Alam Tanjung Poso
- Permandian Pantai Madale Kecamatan Poso Kota Utara

- Pantai Penghibur Poso
- Hutan Mangrove Labuan Kecamatan Poso Kota Utara.

Kabupaten Morowali, yaitu :

- Kawasan Taman Nasional Morowali

Kabupaten TojoUna-una, yaitu :

- Taman Laut kepulauan Togian terletak di Kecamatan Walea Kepulauan
- Cagar Alam Tanjung Api (Kecamatan Ampana)
- Pantai Malotong (Kecamatan Ampana Kota)

Kabupaten Tolitoli, yaitu :

- Suaka Margasatwa Pulau Dolagon (Kec. Tolitoli Utara)
- Air terjun Pandaelo (Kecamatan Dampal Selatan)
- Air Panas Sojol (Cagar Alam Gunung Sojol)
- Air terjun Lungutu
- Air terjun Saloding (Kecamatan Baolan)
- Goa Pampaile
- Permandian Pakka Saloe, Soni (Kecamatan Dampal Selatan)
- Air terjun Kalasi (Kecamatan Dondo)

Kabupaten Buol, yaitu :

- Air terjun Kalokan (Kecamatan Paleleh)
- Irigasi Kinegi (Kecamatan Galang)

Kabupaten Banggai, yaitu :

- Permandian Kilometer Dua
- Air terjun Hanga-Hanga (Kecamatan Luwuk Kota)
- Suaka marga satwa Pulau Bangkiring (Kecamatan Batui)
- Suaka Margasatwa Lambujan
- Hutan Wisata Salodeng (Kecamatan Pagimana)
- Suaka marga satwa Pati-pati (Kecamatan Pagimana)
- Panorama alam koyuan (Kecamatan Luwuk)

Kota Palu, yaitu :

- Panorama alam senja di Bukit Poboya (Kecamatan Palu Timur)
- Air Terjun Tunggu Indah (Kecamatan Palu Utara)

(2) Obyek Wisata Tirta/Bahari, terdapat di:

Kabupaten Donggala, yaitu :

- Pantai Pasir Putih Tanjung Karang Donggala
- Pantai Pasir Putih Towale (Kecamatan Banawa)
- Permandian Loli (Kecamatan Sindue)
- Pantai Enu (Kecamatan Sindue)
- Danau Talaga (Kecamatan Damsol)
- Danau Laut Tolongano (Kecamatan Banawa)

Kabupaten Sigi, yaitu :

- Danau Lindu (Kecamatan Kulawi)

Kabupaten Parigi Moutong, yaitu :

- Pantai Nalera (Kecamatan parigi)

Kabupaten Poso, yaitu :

- Taman laut Teluk Tomori (Kecamatan Bungku Utara)
- Permandian Pasir Putih Siuri Danau Poso (Kecamatan Pamona Utara)

Kabupaten Tojo Unauna, yaitu :

- Taman Laut Tanjung Api (Kecamatan Ampa)
- Taman laut Kepulauan Togian (Kecamatan Walea Kepulauan)
- Pantai Matako (Kecamatan Tojo)

Kabupaten Tolitoli, yaitu :

- Pulau Buol (Kecamatan Tolitoli Utara)
- Pantai Batu Bangga (Kecamatan Galang)
- Teluk Kuliao
- Tanjung Santigi

- Pulau Tumpangan (Kecamatan Boalan)
- Pantai Tantiola (Kecamatan Damsel)
- Pantai Kombo (Kecamatan Damsel)
- Pantai Bangkari (Kecamatan Damsel)
- Pantai Lunggaina dan Pantai Koko (Kecamatan Dampal Utara)

Kabupaten Buol, yaitu :

- Permandian Alam Kulanggo (Kecamatan Momunu)
- Pulau Raja (Kecamatan Paleleh)

Kabupaten Banggai, yaitu :

- Pantai Bangkiri (tempat bertelur Burung Maleo)
- Pantai Pulau Tikus (Kecamatan Batui).

Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu :

- Pantai Lokutoi (Pulau Banggai)

Kota Palu, yaitu :

- Pantai Buluri (Kecamatan Palu Barat)
- Pantai Tumbelaka (Kecamatan Palu Barat)
- Pantai Talise (Kecamatan Palu Timur)
- Pantai Mamboro (Kecamatan Palu Utara)

(3) *Obyek Wisata Budaya*, terdapat di :

Kabupaten Sigi, yaitu :

- Taman Budaya Watunonju (Kecamatan Biromaru)
- Taman Purbakala (Kecamatan Biromaru)

Kabupaten Poso, yaitu :

- Taman Budaya Seppe (Bada), Kecamatan Lore Selatan
- Taman Batuan Megalitik Basoa, Kecamatan Lore Utara
- Taman Batuan Megalitik Napu Kecamatan Lore Utara

Kabupaten Morowali, yaitu :

- Goa Tapak Tangan Teluk Tomori Kecamatan Bungku Utara.

Kabupaten Banggai, yaitu :

- Makam Raja-Raja (Kecamatan Luwuk)
- Bekas Benteng Kembang Marta (Kecamatan Lamala)
- Mesjid Tua di Desa Lemba (Kecamatan Lamala)
- Meriam Kuno di Desa Boniotek (Kecamatan Lamala)

Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu :

- Karaton Kerajaan Banggai (Kecamatan Banggai)
- Makam Tua di Desa Liang (Kecamatan Liang)

Kota Palu, yaitu :

- Museum Kota Palu (Kecamatan Palu Barat)
- Makam Datu Karama (Kecamatan Palu Barat)
- Rumah Adat Souraja (Kecamatan Palu Barat)

(4) *Obyek Wisata Agro, terdapat di :*

Kabupaten Sigi, yaitu :

- Taman Ternak Sidera (Kecamatan Biromaru)

Kabupaten Morowali Utara, Yaitu :

- Perkebunan Karet Beteleme (Kecamatan Lembo)
- Perkebunan Cengkeh Morowali (Kecamatan Lembo)
- Perkebunan Kelapa Sawit di Bungku.

Kabupaten Poso, Yaitu :

- Hutan Anggrek Bancea (Kecamatan Pamona Selatan)
- Perkebunan Teh dan Kopi di Lembah Napu

Kabupaten Tolitoli, yaitu :

- Hutan Cengkeh Tolitoli

Kabupaten Banggai, yaitu :

- Pertanian Transmigrasi Toili

1.3. Capaian Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Sosial

a. Pertumbuhan Ekonomi

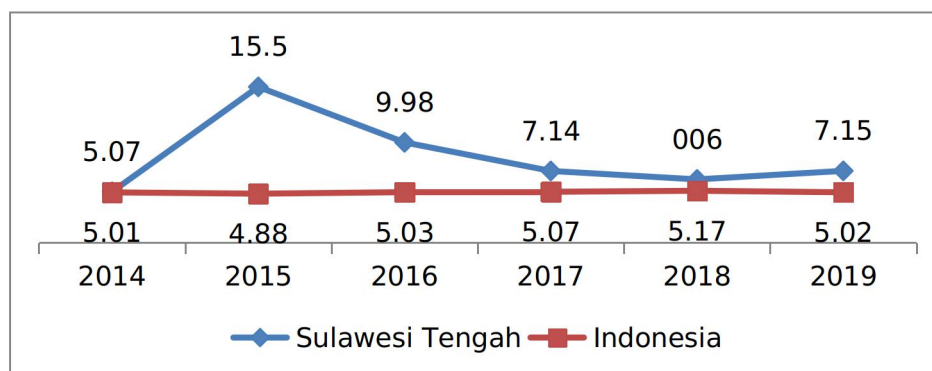
Tujuan pembangunan ekonomi secara substansi adalah untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada, dengan tujuan akhir yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan terciptanya kondisi dasar, yakni: (1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan prestasi yang impresif. Prestasi kinerja ini dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2014-2017, kecuali pada tahun 2014 sedikit melambat sebagai konsekuensi adanya pembatasan/larangan ekspor bahan mentah mineral sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Meski demikian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2011-2015 masih lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan PDRB tahun dasar 2010, laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2014 sebesar 5,07 persen meningkat menjadi 15,50 persen pada tahun 2015 kemudian mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2016, 2017, 2018 dengan pertumbuhan masing-masing 9,98 persen, 7,14 persen dan 6,30 persen. Kemudian pada tahun 2019 mengalami

peningkatan menjadi 7,15 persen dan tetap berada diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional.

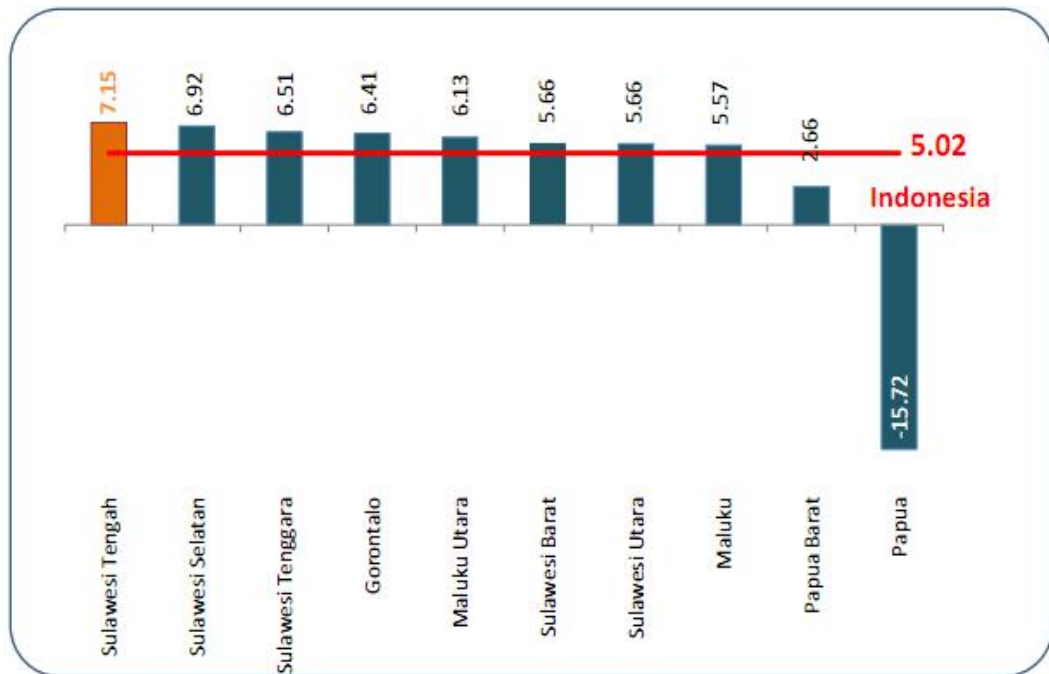
Gambar 1.2
Trend Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2014-2019 (Persen)



Sumber: BPS 2019

Dalam perspektif regional Sulawesi, Maluku, dan Papua (SULAMPUA) Tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah menempati peringkat pertama dari 10 provinsi yang ada. Begitu pula dalam perspektif nasional, pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi tengah menempati peringkat pertama dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah ini juga berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02 persen

Gambar 1.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah
Dalam Perspektif Regional SULAMPUA Tahun 2019 (Persen)

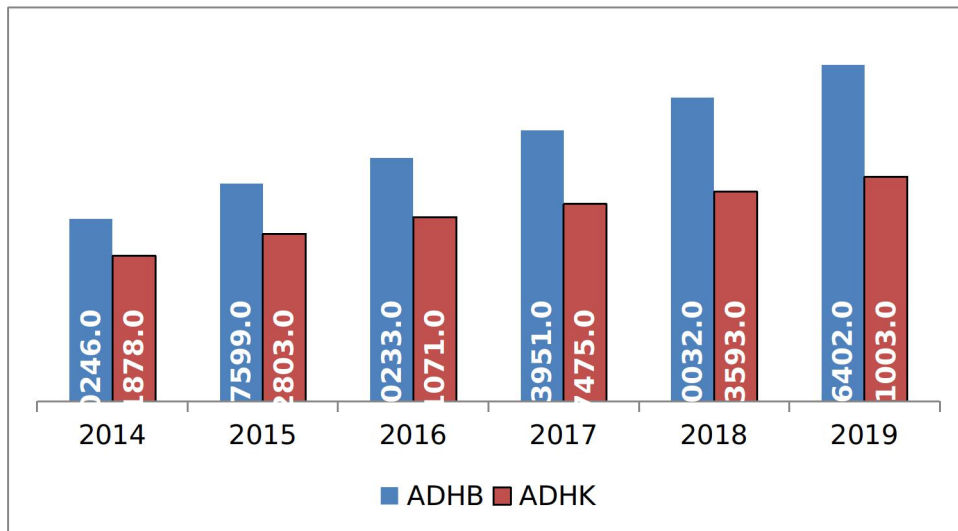


Sumber: BPS 2019

b. Nilai dan Komposisi Struktur PDRB

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2014-2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 Nilai PDRB ADHB mencapai Rp90.246 milyar menjadi Rp166.402 milyar pada tahun 2019, sedangkan PDRB ADHK 2010 dari Rp71.878 miliar pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp111.003 milyar pada tahun 2019

Gambar 1.4.
Perkembangan Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2014-2019 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPS 2019

Dilihat dari pola distribusi PDRB menurut sektor ekonomi atau dari sisi produksi, sepanjang tahun 2014-2019 sektor pertanian secara umum masih dominan dalam pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi rata-rata sebesar 29,67 persen pertahun, disusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Sektor Konstruksi dengan kontribusi rata-rata sebesar 13,02 persen pertahun dan Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi rata-rata sebesar 12,18 persen pertahun.

Sementara dilihat dari sisi pengeluaran, struktur PDRB Provinsi Sulawesi Tengah masih didominasi oleh Komponen Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi rata-rata pertahun sebesar 52,05persen, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Komponen Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan kontribusi rata-rata pertahun sebesar 43,05 persen dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa dengan kontribusi rata-rata pertahun sebesar 15,97

persen. Secara rinci perkembangan kontribusi masing-masing komponen pengeluaran terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7.
Distribusi PDRB ADHB Menurut Komponen Pengeluaran
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019

Komponen Pengeluaran		Struktur Ekonomi					Rat a-rat a
		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)		(6)	(7)	(8)	(9)		
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	51,90	50,72	49,56	48,71	47,95	50,80
2	Pengeluaran Lembaga Non Profit	1,83	1,79	1,81	1,92	2,02	1,88
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14,29	13,38	12,69	11,52	11,89	13,11
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	43,40	43,15	41,16	39,89	43,18	42,38
5	Perubahan Inventori	3,16	3,35	3,19	3,64	-0,62	2,48
6	Ekspor Barang dan Jasa	9,38	18,44	30,75	48,28	51,71	27,66
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2,70	5,27	9,34	27,14	-27,63	-6,23
8	Net Ekspor Antar Daerah	-21,26	-25,56	-29,82	-26,83	-28,50	-26,04
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS 2019

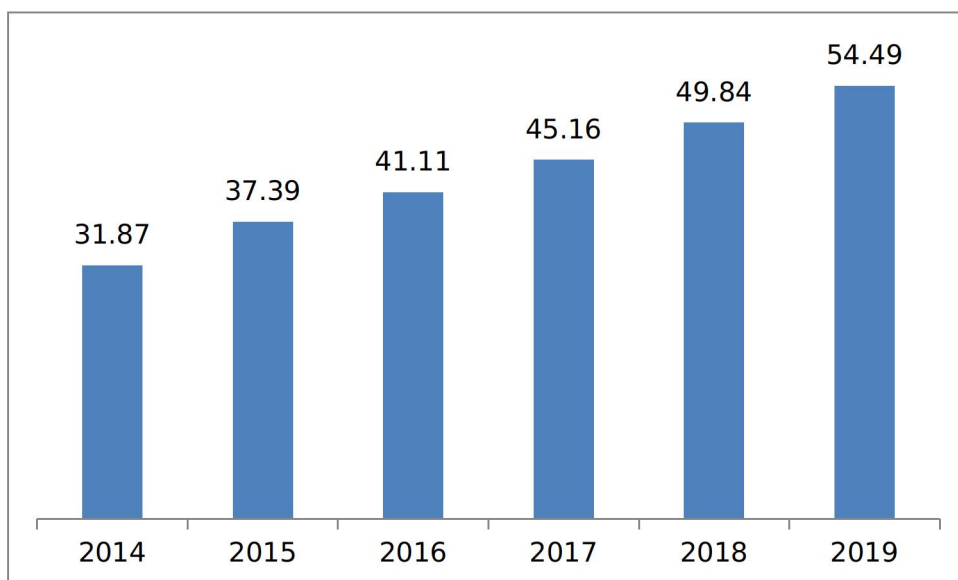
c. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita memberikan gambaran nilai tambah atas keseluruhan aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh penduduk dalam suatu periode tertentu, atau dengan perkataan lain PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan

jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah dalam lingkup makro, selain itu juga dijadikan sebagai acuan untuk memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa. Sejalan dengan meningkatnya nilai PDRB, maka PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2014-2019 juga menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2014 nilai PDRB Perkapita sebesar Rp31,87 juta, selanjutnya secara berturut-turut meningkat setiap tahun hingga menjadi Rp54,489 juta pada tahun 2019.

Gambar 1.5.

**Perkembangan PDRB Nominal Perkapita (juta rupiah)
Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2014-2019**



Sumber : BPS 2019

d. Kondisi Ketenagakerjaan

Penciptaan kesempatan kerja merupakan masalah yang amat mendasar dalam membangun masyarakat yang berpendapatan dan memiliki daya beli

yang memadai. Oleh karena itu pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

Sepanjang periode 2015-2018 jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung meningkat, yakni pada tahun 2014 sebanyak 1.427.819 orang meningkat menjadi 1.426.527 orang pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2016 jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 1.494.757 orang. Pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 1.557.099 orang. Pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 1.570.386. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 1.548.639. Selama periode 2015-2019 terjadi peningkatan angkatan kerja sebesar 142.567 orang atau 8,56 persen.

Daya serap tenaga kerja di sektor ekonomi dapat dilihat dari besarnya porsi keterlibatan angkatan kerja (yang bekerja) dalam proses kegiatan produksi yang ditunjukkan oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Perkembangan TPAK di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2014-2018 juga mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2014 tercatat TPAK mencapai 71,79 persen meningkat menjadi 73,28 persen pada tahun 2018.

Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2018 TPT mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 TPT sebesar 2,92 persen meningkat menjadi 2,99 persen pada tahun 2015 kemudian meningkat lagi pada

tahun 2016 menjadi 3,46 persen. Selanjutnya pada tahun 2017 TPT berhasil diturunkan menjadi 2,97 persen kemudian meningkat lagi menjadi 3,19 persen.

Tabel.1.8
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan
Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2015-2019

Kegiatan (1)	2015 (3)	2016 (4)	2017 (5)	2018 (6)	2019 (7)
Angkatan Kerja	1.426.527	1.494.757	1.557.099	1.570.386	1.548.63
Bekerja	1.383.919 (97,01%)	1.443.060 (96,54%)	1.510.782 (97,03%)	1.520.304 (96,81%)	1.493.79 (96,46%)
Penganggur	42.608 (2,99%)	51.697 (3,46%)	46.317 (2,97%)	50.082 (3,19%)	54.84 (3,54%)
Bukan Angkatan Kerja	605.408	575.544	550.900	572.570	633.73
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,21	72,20	73,87	73,28	70,9
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,99	3,46	2,97	3,19	3,5

Sumber : BPS 2019

Dilihat dari daya serap tenaga kerja di sektor ekonomi, Sektor Pertanian secara umum masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Tengah, yaitu sebesar 41,36 persen pada Agustus tahun 2019. Selanjutnya menyusul terbesar kedua dan ketiga yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan daya serap tenaga kerja sebesar 14,62 persen dan Sektor Administrasi Pemerintahan sebesar 8,37 persen pada tahun yang sama. Selanjutnya perkembangan daya serap tenaga kerja pada masing-masing sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.1.9
Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja
Menurut Sektor Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tengah

Periode 2018-2019

Lapangan Pekerjaan Utama	2017		2018	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,10	44,03	38,46	41,36
B Pertambangan dan Penggalian	1,90	1,59	1,64	1,78
C Industri Pengolahan	9,28	7,57	10,34	7,36
F Konstruksi	4,87	5,57	6,25	6,41
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	14,38	13,50	15,37	14,62
H Transportasi dan Pergudangan	3,10	2,95	2,79	2,78
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,63	3,46	3,97	4,00
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,82	0,96	0,51	0,84
M,N Jasa Perusahaan	0,39	0,81	0,36	0,58
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,37	7,55	8,48	8,37
P Jasa Pendidikan	4,96	5,93	5,42	6,10
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,83	1,83	2,25	1,88
R,S,T,U Jasa Lainnya	3,59	3,05	3,01	2,81
Lainnya (Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang; Inormasi dan Komunikasi, Real Estate)	0,77	1,19	1,15	1,11
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS 2019

e. Inflasi

Kondisi perekonomian yang stabil dan kondusif merupakan prasyarat untuk memacu tingkat capaian pembangunan secara signifikan dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Beberapa hal yang secara umum menjadi daya ungkit terhadap penguatan struktur ekonomi antara lain ketersediaan infrastruktur yang memadai, struktur pasar yang relevan, kebijakan tata niaga yang baik, keterpaduan pengawasan rantai distribusi barang

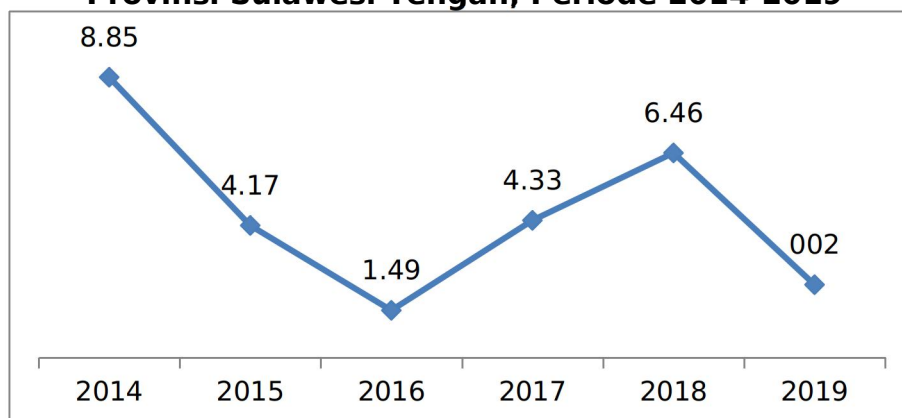
yang diperdagangkan, dan monitoring harga yang berkesinambungan.

Informasi perubahan harga pada sebagian besar komoditas yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat menjadi alat kendali yang penting, mengingat memiliki korelasi positif terhadap laju inflasi dari waktu ke waktu. Salah satu tantangan dalam mengantisipasi tingginya tingkat inflasi adalah upaya untuk mempertahankan kesinambungan daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan membantu upaya pemerintah mencapai kestabilan harga nasional. Namun demikian, upaya untuk menurunkan laju inflasi secara permanen bukanlah hal yang mudah karena fakta di lapangan masih terjadi harga yang fluktuatif bahkan cenderung meningkat.

Inflasi yang diukur berdasarkan perubahan indeks harga di tingkat konsumen (IHK) yaitu indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antar waktu dari satu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan, sebagai proksi pengeluaran dalam suatu periode tertentu.

Perkembangan laju inflasi tahunan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2014-2019 cenderung menunjukkan hasil yang fluktuatif. Pada tahun 2014 inflasi Kota Palu mencapai 8,85 persen, kemudian selama dua tahun berikutnya mengalami penurunan hingga pada tahun 2016 mencapai 1,49 persen. Akan tetapi, pada tahun berikutnya, laju inflasi ini kembali naik menjadi 4,33 pada tahun 2017 kemudian naik lagi menjadi 6,46 pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 kembali turun tajam menjadi 2,30.

Gambar 1.6
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Kota Palu
Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2014-2019



Sumber : BPS 2019

Pada tahun 2019, inflasi Kota Palu sebesar 2,30 persen menunjukkan penurunan yang cukup besar dibandingkan tahun 2018. Secara hirarki pengaruh terbesar dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga pada kelompok Sandang sebesar 5,06 persen. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olah raga sebesar 4,18 persen. Kelompok Kesehatan sebesar 3,78 persen.

Tabel 1.10
Inflasi Pada Masing-Masing Kelompok Pengeluaran
Di Kota Palu, Tahun 2019

Kelompok Pengeluaran	Laju Inflasi tahun Kalender 2019
(1)	(8)
U m u m	2,30
1 Bahan Makanan	3,60
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	3,42
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan bakar	-0,35
4 Sandang	5,06
5 Kesehatan	3,78
6 Pendidikan, Rekreasi, dan Olah raga	4,18

7	Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,13
---	--	------

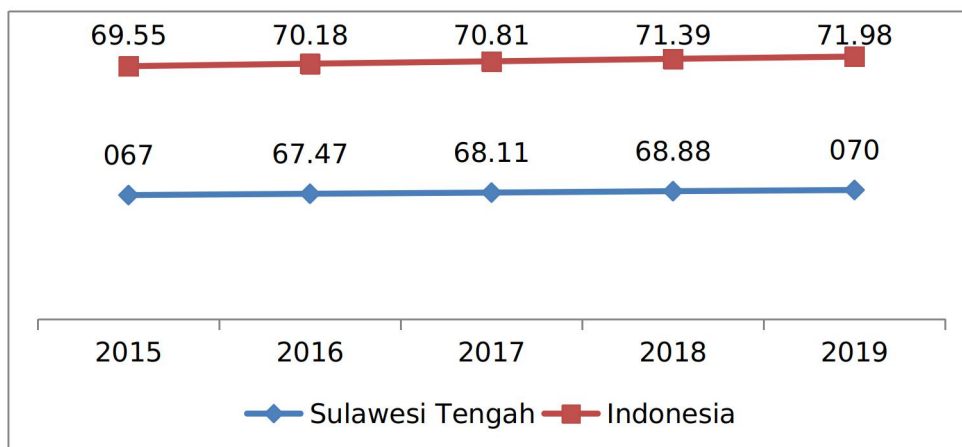
Sumber: BPS, 2019

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan mutu modal manusia. Paradigma Pembangunan Mutu Modal Manusia, dianggap sebagai suatu konsep yang lebih komprehensif karena memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi dan non-ekonomi. Berdasarkan metode baru perhitungan IPM, aspek ekonomi meliputi Pengeluaran Riil Perkapita, dan dari aspek non ekonomi terdiri dari aspek pendidikan meliputi Angka Harapan Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, dan aspek kesehatan meliputi Angka Harapan Hidup.

Pembangunan mutu modal manusia di Provinsi Sulawesi Tengah secara kontinu mengalami perbaikan yang cukup nyata, yang ditandai dengan meningkatnya nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2015-2019, dengan status kategori tingkat pembangunan manusia menengah keatas. Berdasarkan metode baru hasil perhitungan IPM tahun 2015, terlihat pada tahun 2015 nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 66,76 meningkat menjadi 67,47 pada tahun 2016, selanjutnya mengalami peningkatan setiap tahun hingga menjadi 69,50 pada tahun 2019. Akan tetapi, capaian IPM tersebut masih lebih rendah dibanding capaian IPM Nasional.

Gambar 1.7
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2012-2019



Sumber: BPS, 2019

Dilihat lebih lanjut dari sisi komponen pembentukan IPM, capaian tersebut terbentuk dari Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran perkapita per tahun. Pada tahun 2019, AHH Sulawesi Tengah mencapai 68,23 tahun. Artinya, bayi yang baru lahir diharapkan dapat bertahan hidup hingga usia 68,23 tahun. Dari sisi pendidikan, rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 13,14 tahun dan penduduk usia 25 tahun ke atas sudah menempuh masa sekolah rata-rata selama 8,75 tahun. Selanjutnya, pengeluaran per kapita disesuaikan di Sulawesi Tengah 2019 sebesar Rp9.604 juta per tahun.

Tabel 1.11
Perkembangan Komponen IPM
Di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2015 - 2019

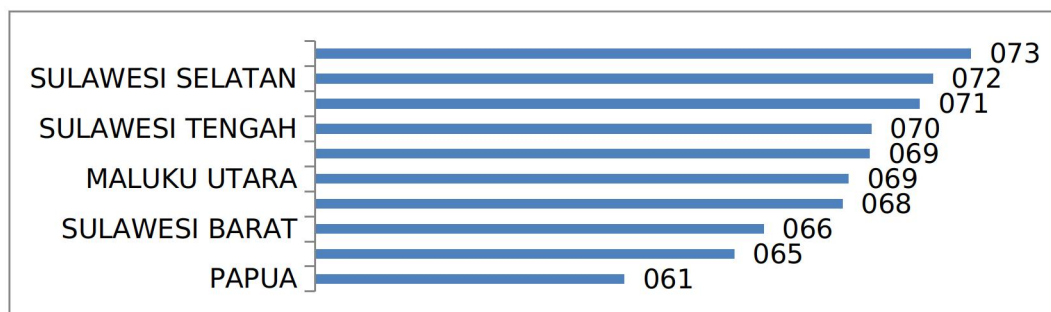
Komponen	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup (Tahun)	67,26	67,31	67,32	67,32	68,23
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,72	12,92	13,04	13,04	13,14
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,97	8,12	8,29	8,29	8,75
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/ Tahun)	8.768	9.034	9.311	9.311	9.604
IPM	66,	67,4	68,	68,11	69,50

	76	7	11		
--	-----------	----------	-----------	--	--

Sumber: BPS, 2019

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan nilai IPM berkategori 'Sedang'. IPM yang dicapai Sulawesi Tengah tercatat sebesar 69,5 dan masih di bawah IPM Indonesia. Dilihat dari posisinya, IPM Sulawesi Tengah berada pada peringkat 25 dari 34 Provinsi di Indonesia. Dalam perspektif regional Sulawesi, Maluku dan Papua (SULAMPUA) pada tahun 2019, IPM Provinsi Sulawesi Tengah menempati posisi ke-4 setelah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Gambar 1.8
Kondisi Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah
Dalam Persepektif Regional SULAMPUA, Tahun 2019



Sumber: BPS, 2019

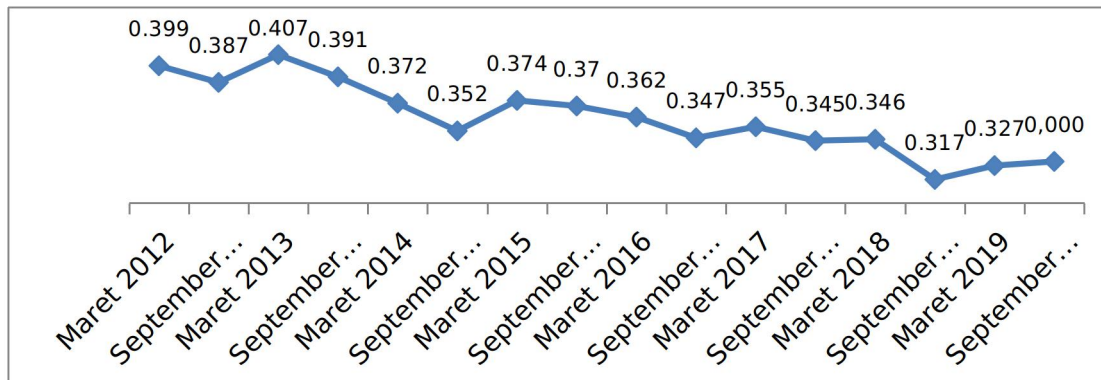
g. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Salah satu indikator yang lazim digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat disamping PDRB Perkapita adalah bagaimana distribusi pendapatan masyarakat, dengan harapan tidak terjadi ketimpangan antar kelompok/golongan pendapatan masyarakat. Indikator yang digunakan merepresentasikan ketimpangan masyarakat yakni indeks Gini atau koefisien Gini. Indeks Gini bernilai antara 0 sampai dengan 1, bila nilai indeks Gini bernilai 0 maka terjadi pemerataan

distribusi pendapatan masyarakat sempurna dan indeks Gini bernilai 1 maka terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan secara sempurna.

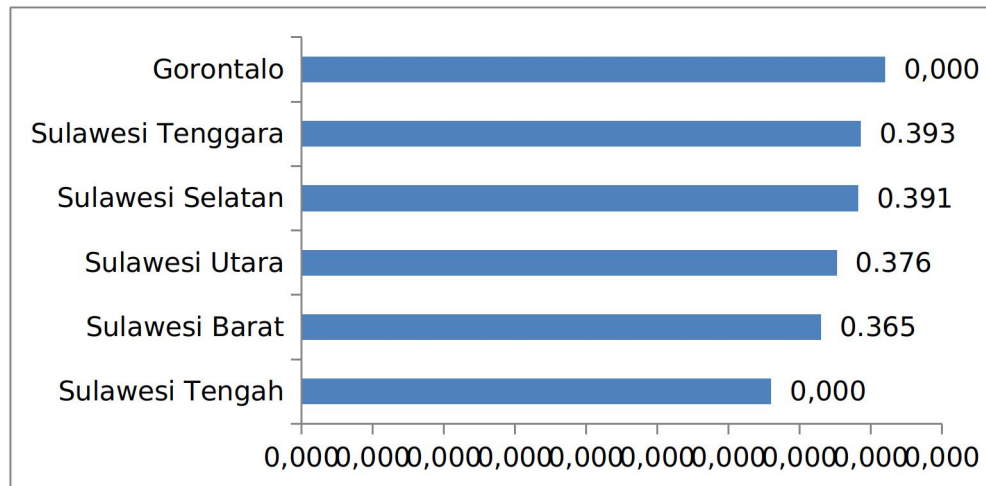
Sepanjang tahun 2012-2019 indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012 periode Maret indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,399 poin dan turun menjadi 0,355 poin pada periode Maret tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2012 periode September indeks gini sebesar 0,387 yang selanjutnya mengalami penurunan hingga menjadi 0,345 pada periode September 2017. Pada September 2018 indikator gini Sulawesi Tengah turun menjadi 0,317. Pada tahun Maret 2019 gini rasio naik sedikit menjadi 0,327 kemudian naik lagi menjadi 0,330.

Gambar 1.9
Perkembangan Indeks Gini Ratio Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2012 - 2019



Sumber : BPS, 2019

Gambar 1.10
Kondisi Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Perspektif
Pulau Sulawesi, September 2019



Sumber : BPS, 2019

Dalam perspektif regional Pulau Sulawesi, pada September tahun 2019, posisi indeks Gini Sulawesi Tengah menempati posisi terbaik dengan indeks gini terkecil

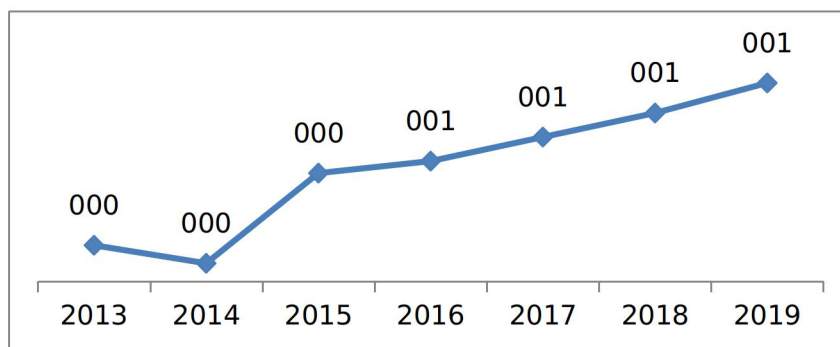
h. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah

Adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi dimasing-masing wilayah/daerah merupakan salah satu pemicu terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Namun demikian, adanya perbaikan perekonomian daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan strategi kebijakan pembangunan daerah yang diejawantahkan melalui program dan kegiatan di masing-masing wilayah kabupaten/kota diharapkan mampu meminimalisir adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut. Salah satu indikator makro yang lazim digunakan untuk melihat ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu kawasan adalah analisis Indeks Williamson (IW).

Disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2013-2018

cenderung meningkat yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Williamson, yakni dari 0,36 poin pada tahun 2013 menjadi 0,58 poin pada tahun 2018. Akan tetapi, pada tahun 2014, kesenjangan tersebut dapat diminimalisir dengan nilai Indeks Williamson menurun menjadi 0,34 poin. Sayangnya, pada tahun 2015, angka kesenjangan ini kembali meningkat menjadi 0,48 pada tahun 2015, begitu pula dengan tahun 2016 kembali meningkat menjadi 0,50 poin dan meningkat lagi pada tahun 2017 dan tahun 2018. Pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 0,63, peningkatan kesenjangan antar wilayah ini terjadi karena adanya gas dan nikel di Banggai dan Morowali. Akibatnya, ketimpangan antar kabupaten/kota menjadi lebih besar. Hal ini tidak dapat dihindari karena potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh kedua daerah tersebut berbeda dengan kabupaten lainnya. Kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah masih tergolong dalam kategori ketimpangan moderat (sedang). Meskipun ketimpangannya belum terlalu besar, langkah yang paling penting ke depan adalah *memanage pengeluaran fiscal* dengan baik, menata dan mempertajam kembali program pembangunan kewilayahan. Dengan demikian maka kesenjangan pembangunan antar-daerah dapat dipersempit.

Gambar 1.11
Perkembangan Indeks Williamson
Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2013-2018



Sumber : BPS 2019

1.4 Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih dan RPJMN sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Isu strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

a. Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum Dan Ham.

Upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel masih menghadapi beberapa permasalahan dan diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis, saat ini kelembagaan pemerintah daerah baik dari aspek struktur maupun fungsi kelembagaan belum efektif dan efisien sehingga kualitas pelayanan publik belum optimal, disamping itu rendahnya citra dan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang didasari filosofi *good governance*, hal ini akibat penerapan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan belum professional dan belum memiliki indikator dan pola yang jelas.

Dari sisi hukum masih dirasakan budaya hukum masyarakat masih rendah sebagai akibat dari rendahnya pemahaman, kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat serta kepastian dan keadilan hukum masih rendah dan belum merata, selain itu masih dirasakan kurangnya sistem koordinasi dan kerjasama fungsional penegakkan serta penyerasian tugas-tugas antara semua unsur aparatur pemerintah daerah dibidang pembinaan tertib hukum dalam rangka usaha terselenggaranya ketertiban dan kepastian hukum masyarakat.

b. Pembangunan Infrastruktur Daerah Dan Mendukung Kemandirian Energi

Kondisi wilayah geografis Sulawesi Tengah yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah-daerah wilayah pedesaan, daerah pedalaman dan terpencil sekaligus sebagian dari

penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadai aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antardaerah seperti transportasi, irigasi, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi serta kelistrikan.

Seiring dengan peningkatan arus pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk serta mulai tingginya konsumtif masyarakat, untuk itu pemerintah daerah kabupaten/kota telah membangun beberapa infrastruktur khususnya dibidang transportasi udara, Untuk di kota palu saat ini telah memiliki Bandar Udara Mutiara Sis Aldjufrie Palu yang memiliki landasan pacu 2.250 m sehingga bisa didarati oleh pesawat jenis Boeing 737-900, disamping itu beberapa kabupaten telah membangun Bandar udara seperti Bandar Udara Amirudin Amir di Banggai, Bandara Kasiguncu di Poso, Bandara Lalos di Toli-Toli, Bandara Pogogul di Buol, dan Bandara Tanjung Api di Tojo Una-una serta Bandara Banggai di Banggai Laut yang masih perlu peningkatan kapasitas dan fasilitas dalam memacu akselerasi pembangunan di bidang transportasi udara di daerah Kabupaten-kabupaten,

Sementara dibidang transportasi darat secara fungsional kondisi jalan di Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2016 adalah: jalan nasional sepanjang 2.373,40 Km dengan kondisi mantap 93,83 persen dan tidak mantap 6,17 persen, jalan provinsi dengan panjang 1.643,74 Km dengan kondisi mantap 59,88 persen dan tidak mantap 27,48 persen. Dari data ini kondisi jalan provinsi dalam kondisi tidak mantap semakin berkurang atau menurun. Hal ini sebagai akibat dari semakin meningkatnya

pembiayaan fiscal daerah dalam mendanai program kegiatan infrastruktur.

c. Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Dalam pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih belum optimal dalam pelaksanaannya untuk itu upaya pengembangan ekonomi masyarakat perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan daya saing serta untuk pemerataan pembangunan ekonomi antar daerah kabupaten/kota secara berkesinambungan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional namun pertumbuhan perekonomiannya masih bertumpu pada sektor primer pertanian dan pertambangan tetapi relative masih belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung, Dalam pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih sehingga diharapkan kedepan pertumbuhan ekonomi dapat beralih dan terbagi secara merata pada sektor sekunder lainnya yaitu industri, perdagangan dan jasa. Salah satu alasan rendahnya nilai tambah dari produktivitas perekonomian pada sektor sekunder adalah masih rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan masyarakat pada teknologi tepat guna, serta akses pasar yang sangat minim sehingga dalam pemasaran hasil produksi unggulan keluar daerah belum dapat dioptimalkan. Hasil pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi selama ini masih belum cukup memadai untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan di berbagai wilayah, walaupun didukung dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, daerah-daerah masih belum bisa

mengoptimalkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu salah satu antisipasi permasalahan kesenjangan dan mempercepat pembangunan perekonomian daerah yaitu dengan cara mendorong penyebaran industri ke daerah-daerah, dengan melakukan terobosan pengembangan kawasan industri yang berbasis pada kompetensi inti dan produk-produk unggulan di setiap daerah.

Daerah yang telah mencoba melakukan klaster industri adalah Kota Palu yang membangun kawasan industri terpadu dan saat ini telah dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan disusul dengan Kabupaten Morowali yang telah membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pertimbangan dalam mengembangkan Kawasan Industri Terpadu yang di arahkan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sesuai dengan arah kebijakan industri nasional.

**d. Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal
Dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia.**

Permasalahan pemanfaatan sumber daya alam hingga saat ini tidak memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam semakin menipis. Penurunan kualitas sumber daya alam ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi hutan yang semakin marak akibat terjadinya pembalakan liar, penambangan liar, rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan secara ilegal serta meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan perumahan dan ekonomi lainnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat eksploitasi sumber daya hutan dan energi untuk pembangunan serta masih rendahnya pemanfaatan sumber daya perikanan dibanding potensinya.

e. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Berbudaya.

Dalam menganalisis kualitas mutu modal manusia dapat menggunakan berbagai macam indikator penilaian kualitas sumber daya manusia. Salah satu indikator penilaian yang digunakan adalah dengan melihat dan membandingkan kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap daerah. Di Provinsi Sulawesi Tengah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih tergolong rendah. Ini ditandai dengan masih lebih rendahnya nilai IPM Sulawesi Tengah dibandingkan dengan rata-rata Nasional. Tahun 2017, IPM Sulawesi Tengah sebesar 68,11 poin yang masih dibawah rata-rata nasional 70,81 poin. Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tengah masih tertinggal dibanding pembangunan manusia provinsi lainnya di Indonesia.

Kondisi lainnya adalah jumlah masyarakat miskin masih tinggi dan berada di atas rata-rata nasional. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada tahun 2017 berjumlah 423.270 jiwa atau 14,22 persen dari jumlah penduduk Sulawesi Tengah. Karena itu dibutuhkan prioritas-prioritas dan sasaran dalam melakukan perencanaan pembangunan secara serius dan konsisten di bidang kualitas sumber daya manusia agar dapat sejajar dengan daerah lainnya.

1.5 Permasalahan Utama

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang dianggap sangat mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah saat ini, untuk dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan pembangunan pada periode berikutnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian permasalahan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kriteria, aspek dan urusan pemerintah daerah pada tabel berikut ini:

Tabel 1.12
Permasalah Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kriteria/Aspek/ Urusan	Permasalahan	Tindak Lanjut
a. Pendidikan	1. Akses, sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai 2. Akses, sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai 3. Kurangnya tingkat kesejahteraan bagi guru, 4. Kompetensi guru yang rendah, 5. Kurangnya pemerataan tenaga pengajar di daerah terutama di daerah terpencil dan pedesaan,	- Penambahan anggaran pendidikan terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil dan pedesaan - pemerataan kesenjangan dan penyebaran guru, serta pemberian insentif terutama kemudahan akses serta fasilitas - Perbaikan dalam memajukan kesejahteraan bagi guru melalui penambahan gaji, serta pemberian tunjangan bagi guru - Pemetaan profil kompetensi guru secara berkelanjutan serta pengelolaan tenaga

		guru secara otonom
b. Kesehatan	1. Persoalan gizi kurang dan buruk bagi balita yang berakibat kepada tumbuh kembang anak, 2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan reproduksi 3. kurangnya sosialisasi pentingnya Program KB di masyarakat, serta Program Jaminan Kesehatan di provinsi/kab/kota yang belum efektif, 4. Kurangnya layanan kesehatan yang baik terutama di daerah terpencil	- Adanya realisasi jaminan kesehatan terhadap warga miskin tanpa ada diskriminatif, - Perlunya pembaharuan model sosialisasi Program KB, - Peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana kesehatan - Sosialisasi dan pemasyarakatan terkait gizi bagi anak balita maupun pemberian bantuan tambahan gizi kepada anak
c. Penanggulangan Kemiskinan	1. Tidak seimbangnya ketersediaan lapangan pekerjaan	- Adanya kemudahan perijinan investasi kepada investor,

	serta kurangnya kesempatan bekerja bagi masyarakat, 2. Belum optimalnya program penanggulangan kemiskinan 3. Sulitnya akses dan kurangnya pelayanan khususnya pada pedesaan, daerah tertinggal, dan terluar 4. menurunnya laju pertumbuhan di sektor industri terutama di sektor padat karya,	agar terbuka lapangan pekerjaan baru, - Adanya regulasi mengenai Upah Minimum tenaga kerja/ masih dibawah KHL (Kebutuhan Hidup Layak), - Perlunya evaluasi serta perbaikan terhadap program pemberdayaan masyarakat miskin, terutama dalam hal pemenuhan hak dasar bagi masyarakat miskin, - Pengembangan program kependudukan terpadu dengan provinsi lain - Memperbanyak Balai Latihan Kerja (BLK) dan kelompok kerja di tiap kabupaten dan kota.
d. Ketahanan Pangan	1. penurunan alih fungsi lahan 2. adanya konversi menjadi lahan pemukiman dan industri 3. Banyaknya infrastruktur yang rusak terutama sarana transportasi di daerah pedesaan	- pembatasan pengeluaran izin pembukaan lahan perkebunan atau penggunaan untuk usaha lain - peningkatan kualitas dari penyuluh tersebut, melalui berbagai program pendidikan, latihan dan pemagangan. - Perbaikan infrastruktur yang layak sehingga dapat meningkatkan jalur distribusi untuk memperbaiki akses transportasi, - Pemberian subsidi pada kebutuhan produksi pertanian

		untuk meningkatkan kesejahteraan petani, - Pembangunan sarana dan prasarana perikanan sebagai media penunjang pemasaran hasil perikanan. , - Pemberdayaan nelayan tradisional melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pemanfaatan teknologi penangkapan dan pembudidayaan
e. Infrastruktur	1. Minimnya pertumbuhan infrastruktur terutama jalan provinsi, 2. rendahnya cakupan air minum layak, sebagai akibat dari kurangnya program perbaikan terhadap sumber air minum yang layak	- Upaya Percepatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan melalui skema insetif kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, - Koordinasi dan sinergi yang baik antar SKPD yang terkait terhadap masalah infrastruktur dan pengembangan wilayah, - Mengimplementasikan skema kerjasama publik dan masyarakat dalam percepatan pembangunan infrastruktur daerah.
f. Infrastruktur	1. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya energi (terbarukan dan tak terbarukan), 2. Masih banyak rumah tangga yang belum menikmati listrik (khususnya	- Meningkatkan kapasitas suplai energi listrik untuk rumah tangga, - Memanfaatkan sumber energi air yang tersedia dalam jumlah banyak di daerah,

	masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat desa), 3. konsumsi energi penduduk yang belum merata dan terindikasi terjadi kebocoran, 4. Jumlah gardu listrik (PLN) masih terbatas/belum mampu menyalurkan kebutuhan daya listrik masyarakat	- Kebijakan pengembangan perlunya <i>investasi dan transfer of technology</i> dalam eksplorasi sumberdaya alam terbarukan untuk supply energy ramah lingkungan, - Pengembangan dan peningkatan jumlah gardu listrik; - Penambahan jaringan listrik gratis melalui Program Listrik Desa (Prolisdes) terus diprioritaskan dan tepat sasaran.
--	---	--

1.6 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Provinsi terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro :

1. Asisten Sekretaris Daerah :
 - a) Asisten Administrasi Pemerintahan, Hukum dan Politik.
 - b) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - c) Asisten Administrasi Umum Dan Organisasi.
2. Biro – Biro :
 - a) Biro Administrasi Pemerintahan Umum.
 - b) Biro Administrasi Otonomi Daerah
 - c) Biro Hukum.
 - d) Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam.

- e) Biro Administrasi Perekonomian.
- f) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
- g) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- h) Biro Umum.
- i) Biro Organisasi.
- 3. Bagian – Bagian.
- 4. Sub Bagian – Sub Bagian.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Asisten Administrasi Pemerintahan, Hukum dan Politik membawahi:

- 1. Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan.
- 2. Biro Otonomi Daerah.
- 3. Biro Hukum.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:

- 1. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan.
- 2. Biro Administrasi Perekonomian.
- 3. Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber daya Alam.

Asisten Administrasi Umum dan Organisasi membawahi:

- 1. Biro Organisasi.
- 2. Biro Umum.
- 3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah

c. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

d. Dinas – Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

21. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.
22. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.
23. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah.
24. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
25. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
26. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.
27. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
4. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

BAB II

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

2.1.1 Visi

Dalam menentukan arah pandangan ke depan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan persepsi, interpretasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa visi dalam RPJMD harus menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Sesuai dengan amanat ini, maka visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah adalah gambaran kondisi Provinsi Sulawesi Tengah yang ingin dicapai pada akhir periode 2016-2021. RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2015-2020.

Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan berpijak pada prioritas pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah, RPJMN Tahun 2015-2019 dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita dan Trisakti, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di provinsi Sulawesi Tengah maka visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2021 sebagai berikut:

SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING

Visi di atas mengandung beberapa kata kunci (*keywords*) yang perlu dijabarkan kedalam misi dan diterjemahkan kedalam tujuan serta sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut harus diikuti dengan strategi kebijakan, program dan kegiatan yang jelas, terarah dan terukur guna mewujudkan visi tersebut. Kata kunci atau pokok-pokok visi yang dimaksud adalah ***Maju, Mandiri dan berdaya Saing***. Pokok-pokok visi dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perumusan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<i>SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING</i>	1. MAJU	Secara umum Maju berarti keadaan yang baik, kondisi masyarakat dalam keadaan menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi. Makna kata Maju ditandai dengan hal-hal berikut: 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang Inklusif 2. Membaiknya pendapatan perkapita masyarakat Sulteng 3. Infrastruktur yang berkembang baik 4. Kemiskinan daritahun ketahun menurun 5. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) makin rendah 6. Nilai Tukar Petani (NTP) makin baik
	2. MANDIRI	Kondisi masyarakat Sulteng yang

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		mandiri dapat dijelaskan dimana masyarakat sulteng sejahtera dalam keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang/pihak lain dalam hal memenuhi kebutuhannya. Makna kata Mandiri ditandai dengan hal-hal berikut: 1. Produksi pangan yang meningkat hingga kondisi ketahanan pangan makin baik 2. Meningkatnya Investasi daerah 3. Meningkatnya kemandirian Desa-desanya di wilayah Sulawesi Tengah
	3. BERDAYA SAING	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk meningkatkan daya saing daerah. Daya saing merupakan keberhasilan pembangunan daerah yang menggambarkan stabilitas kemajuan daerah dari integrasi dan kecenderungan global, yang juga mengukur keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan. Ruang lingkup peningkatan daya saing daerah Provinsi Sulawesi Tengah mencakup: 1. Stabilitas ekonomi makro daerah 2. Pemerintahan yang makin bersih dan profesional 3. Perencanaan pemerintah yang makin baik 4. Kondisi investasi dan tenaga

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		kerja 5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 6. Pembangunan infrastruktur meningkat

2.1.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021, ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1) Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM

Reformasi birokrasi dan pembangunan hukum serta ketentraman dan ketertiban adalah merupakan salah satu agenda penting pemerintah daerah 5 tahun ke depan yaitu karena pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen yang penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Reformasi tersebut kiranya dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan pelayanan publik, efektifitas dan akuntabilitas.

Pembangunan bidang hukum mencakup proses pembuatan peraturan daerah, proses pengawasan dan juga penegakannya, serta memfasilitasi hukum bagi masyarakat. Pembangunan hukum ini juga mencakup suasana dan

kepastian hukum sehingga tercapainya ketentraman dan ketertiban.

2) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi

Pembangunan infrastruktur adalah merupakan kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagaan listrik, energi, pos telekomunikasi dan informatika, sumber daya air serta perumahan, pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan, merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembangunan infrastruktur memerlukan pendanaan yang sangat besar sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran melalui dana APBN dan pemerintah daerah melalui dana APBD, serta melalui investor swasta dengan model *Publik Private Partnership*.

3) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka yang menjadi prioritas pemerintah daerah 5 tahun kedepan adalah meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2015 sebesar 15,56% dimana terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 9,91% pertahun sepanjang periode tahun 2011-2015. Berdasarkan struktur PDRB bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu sejumlah 31,26% pada tahun 2015 atau rata-rata 34,42%

pertahun sepanjang periode tahun 2011-2015 sehingga sektor pertanian diharapkan akan menjadi *primemover* atau penggerak perekonomian Sulawesi Tengah 5 tahun ke depan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan impor yang atas dasar harga konstan pada Tahun 2015 rata-rata masing-masing sebesar 2,28%; 1,18%; dan 1,62%. Berdasarkan pengeluaran tersebut maka peningkatan investasi dan ekspor perlu ditingkatkan untuk menggerakkan sektor riil sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran karena peningkatan kesempatan kerja dipengaruhi oleh peningkatan investasi. Karena peranan swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat besar kepada Usaha kecil Menengah dan Koperasi serta perbankan yaitu dengan meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses terhadap perluasan KUR, meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran.

4) Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia

Memanfaatkan SDA dan Lingkungan Hidup secara produktif, efisien, optimal berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya

Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berbudaya adalah merupakan salah satu agenda yang menjadi prioritas dimasa pemerintahan mendatang. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dapat dilihat pada peningkatan akses

masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tersebut seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing serta akan memacu terciptanya kreatifitas dan inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan menciptakan sumber daya manusia berdaya saing sehingga akan tercapainya pembangunan ekonomi yang makin mandiri. Dalam bidang kesehatan juga melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan turunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 sebanyak 23 sasaran strategis.

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk 5 (lima) tahunan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>).	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien. 2. Meningkatkan pengawasan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.
2.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata serta penyediaan Energy Baru Terbarukan (EBT) dan sumber daya mineral di seluruh Kabupaten/Kota.	1. Tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan memadai.
3.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aktivitas ekonomi.	1. Menurunnya angka kemiskinan 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi 3. Terwujudnya koperasi yang tangguh, berdaya saing, profesional dan mandiri. 4. Meningkatkan daya saing, efisiensi dan produktivitas perdagangan. 5. Terwujudnya industri yang tangguh, professional dan mandiri. 6. Meningkatkan nilai dan realisasi investasi. 7. Meningkatkan kesejahteraan gender dalam pembangunan ekonomi. 8. Meningkatkan jumlah wisatawan. 9. Terciptanya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja. 10. Terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil.
4.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam guna mengoptimalkan nilai tambah ekonomi.	1. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan ditingkat tapak. 2. Optimalnya tatakelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung. 3. Meningkatkan kualitas lingkungan

		hidup. 4. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan. 5. Meningkatnya produksi dan mutu tanaman hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan. 6. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan perikanan budidaya.
5.	Mengoptimalkan mutu modal manusia melalui peningkatan sarana dan prasarana.	1. Tuntasnya angka melek aksara. 2. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah. 3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan. 4. Suksesnya Keluarga Berencana dan terciptanya keluarga berkualitas.

2.1.4 Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 109/451/Ro.ORG.G.ST/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021.

Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Sasaran	IKU	Penjelasan	OPD Penang-gung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Formulasi penghitungan : Berdasarkan hasil survey unit pelayanan publik terhadap 14 unsur pelayanan. Sumber data : OPD pelayanan publik lingkup Pemda Prov. Sulteng	BPMPD PTSP, Dinas Kesehatan, Badan Pendapat an, Biro Organisa si
2.	Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.	Opini BPK	Formulasi penghitungan : Target yang akan dicapai dari hasil laporan keuangan Pemerintah Daerah Sumber data : Hasil pemeriksaan BPK	BPKAD, Inspekto rat Daerah
		Nilai akuntabilitas kinerja	Formulasi penghitungan : Target yang akan dicapai dari hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber data : Hasil Evaluasi SAKIP Kemenpan	BAPPEDA , Inspekt or at Daerah, Biro Organisa si
		Indeks Reformasi Birokrasi	Formulasi penghitungan : Target yang akan dicapai dari penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan PMPRB. Sumber data : Hasil Evaluasi RB Kemenpan	Inspekto rat Daerah, BKD, Biro Organisa si
3.	Tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan memadai	Persentase kemantapan jaringan jalan	Formulasi penghitungan : $\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan}} \times 100\%$	Dinas Bina Marga dan Penataa n Ruang
		Persentase rumah tangga pengguna	Formulasi penghitungan : $\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna listrik}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$	Dinas ESDM

		listrik.	Jumlah rumah tangga		
		Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Formulasi penghitungan : Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Jumlah rumah tangga X 100%		Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air
		Persentase rumah layak huni	Formulasi penghitungan : Jumlah rumah layak huni Jumlah rumah X 100%		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Kontributor sector pertambangan terhadap PDRB	Formulasi penghitungan : PDRB sektor pertambangan dan galian PDRB Tetap x100 %		Dinas ESDM
4.	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Formulasi penghitungan : Penduduk miskin tahun ini Penduduk miskin tahun sebelumnya X 100% Sumber data : BPS Provinsi Sulawesi Tengah		Dinas Sosial, Dinas Kesehatan-an, Dinas Pendidikan
5.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi	Indeks Gini	Formulasi penghitungan : Target Indeks Gini setiap tahun Sumber data : BPS Provinsi Sulawesi Tengah		
6.	Terwujudnya koperasi yang tangguh, berdaya saing, profesional dan mandiri	Persentase koperasi aktif	Formulasi penghitungan : Jumlah koperasi aktif Jumlah total koperasi X 100%		Dinas Koperasi dan UMKM
7.	Meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktivitas perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Formulasi penghitungan : PDRB sektor perdagangan PDRB total X 100%		

		Ekspor bersih perdagangan	Formulasi penghitungan : Jumlah ekspor total – jumlah impor total	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8.	Terwujudnya industri yang tangguh, profesional dan mandiri	Pertumbuhan industri	Formulasi penghitungan :	
9.	Meningkatnya nilai dan realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi : PMDN PMA	Formulasi penghitungan : Target nilai investasi yang dicapai di forecast naik 20% untuk PMA dan 10% untuk PMDN dari tahun sebelumnya. Sumber data : BPMPD PTSP	BPMPD PTSP
10.	Meningkatnya kesejahteraan gender dalam pembangunan ekonomi	Peningkatan indeks pembangunan gender (IPG)	$\frac{\text{Indeks pembangunan gender tahun ini}}{\text{Indeks pembangunan gender tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Peningkatan indeks pemberdayaan gender (GEM)	$\frac{\text{Indeks pemberdayaan gender tahun ini}}{\text{Indeks pemberdayaan gender tahun sebelumnya}} \times 100\%$	
11.	Meningkatnya jumlah wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Formulasi penghitungan : Berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara setiap tahunnya Sumber data : Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Formulasi penghitungan : Berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara setiap tahunnya Sumber data : Dinas Pariwisata	
12.	Terciptanya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

			kerja		
			Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Formulasi penghitungan : Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Jumlah pencari kerja x100%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	Terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil	Persentase kabupaten/kota tidak tertinggal	Formulasi penghitungan : Jumlah kabupaten/kota tidak tertinggal Jumlah kabupaten/kota X 100%		
14.	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan ditingkat tapak	Kontribusi PDRB sub sektor kehutanan	Formulasi penghitungan : PDRB sub sektor kehutanan PDRB total X 100% Sumber data : Dinas Kehutanan		Dinas Kehutanan
15.	Optimalnya tata kelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Formulasi penghitungan : Berdasarkan luas kawasan hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi Sumber data : Dinas Kehutanan		
		Persentase kerusakan kawasan hutan	Formulasi penghitungan : Luas kerusakan kawasan hutan Luas kawasan hutan X 100%		
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Formulasi penghitungan : Target indeks kualitas lingkungan hidup		Dinas Lingkungan Hidup
17.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani	Formulasi penghitungan : Indeks yang diterima petani Indeks yang diterima petani X 100%		Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

			Sumber data : BPS Provinsi Sulawesi Tengah	
18.	Meningkatnya produksi dan mutu tanaman hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	PDRB sektor pertanian PDRB total X 100% Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Jumlah PDRB sub sektor perkebunan	Formulasi penghitungan : Berdasarkan jumlah PDRB dari sub sektor perkebunan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
19.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan perikanan budidaya	Nilai tukar nelayan	Indeks yang diterima nelayan Indeks yang dibayar nelayan X 100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai ekspor hasil perikanan (USD)	Formulasi penghitungan : Berdasarkan nilai ekspor hasil perikanan pada tahun N Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan	
20.	Tuntasnya angka melek aksara	Persentase angka melek aksara	Jumlah penduduk usia > 10 thn yang bisa baca tulis Jumlah penduduk usia > 10 thn X 100% Sumber data : BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21.	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah	- Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A SMP/MTs/ Paket B SMA/MA/SMK/ Paket C - Angka	Jumlah siswa usia sekolah (SD,SMP,SMA) Jumlah penduduk usia sekolah X 100%	

		partisipasi murni SD/MI/Paket A SMP/MTs/ Paket B SMA/MA/SMK/ Paket C		
22.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Angka usia harapan hidup	Formulasi penghitungan : Dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (age spesifik death rate) atau dihitung berdasarkan program Mortpak life Sumber data : BPS	
23.	Suksesnya Keluarga Berencana dan terciptanya keluarga berkualitas	Cakupan peserta KB aktif	Formulasi penghitungan : $\frac{\text{Jumlah peserta program KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	Formulasi penghitungan : $\frac{\text{Jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I}}{\text{Jumlah keluarga}} \times 100\%$	

2.1.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 menetapkan 23 sasaran strategis dan 42 indikator kinerja utama yang ditargetkan mampu mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun sasaran utama dan Indikator Kinerja yang diharapkan terwujudnya pada tahun 2019 dapat dilihat pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	T A R G E T
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan efisien.	- Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	62,51-81,25%
2	Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.	- Opini BPK - Nilai akuntabilitas kinerja - Indeks Reformasi Birokrasi	WTP B 64
3	Tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan memadai.	- Persentase kemandirian jaringan jalan - Persentase rumah tangga pengguna listrik - Persentase rumah tangga pengguna air bersih - Persentase rumah layak huni - Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	65% 94% 61,49% 72,35% 14,08%
4	Menurunnya angka kemiskinan.	- Persentase penduduk diatas garis kemiskinan.	86,71-87,11%
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi.	- Indeks gini	0,354-0,344
6	Terwujudnya koperasi yang tangguh, berdaya saing, profesional dan mandiri.	- Persentase koperasi aktif.	65,67%
7	Meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktifitas perdagangan.	- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	32%

		- Ekspor bersih perdagangan.	1000 Juta USD
8	Terwujudnya industri yang tangguh, professional dan mandiri	- Pertumbuhan industri	7,40-7,60
9	Meningkatnya nilai dan realisasi investasi.	- Nilai realisasi investasi	
		PMDN	Rp. 1.331.000.000.000
		PMA	Rp. 17.968.500.000.000
10	Meningkatnya kesejahteraan gender dalam pembangunan ekonomi.	- Peningkatan indeks pembangunan Gender (IPG)	75,43%
		- Peningkatan indeks pemberdayaan Gender (GEM)	77,37%
11	Meningkatnya jumlah wisatawan	- Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara	19.500 orang
		- Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	3.600.000 orang
12	Terciptanya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja.	- Tingkat pengangguran terbuka	3,36%
		- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.	70,96%
13	Terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil.	- Persentase kabupaten/kota tidak tertinggal.	46,15%
14	Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dan lahan ditingkat tapak.	- Kontribusi PDRB sub sektor kehutanan	3%
15	Optimalnya tata kelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung.	- Persentase kerusakan kawasan hutan	0,01%
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	- Indeks kualitas lingkungan hidup.	83 Poin
17	Meningkatnya kesejahteraan petani.	- Nilai tukar petani.	104,73

18	Meningkatnya produksi dan mutu tanaman hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan.	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB - Jumlah PDRB sub sektor perkebunan	28,40% Rp. 12.722.383
19	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat nelayan dan perikanan budidaya.	- Nilai tukar nelayan - Nilai ekspor hasil perikanan (USD)	107,68 US\$ 3.200.000
20	Tuntasnya angka melek aksara.	- Persentase angka melek aksara	98,40-98,75%
21	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah.	- Angka Partisipasi Kasar (APK) : SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/MA/SMK/Paket C - Angka Partisipasi Murni (APM) : SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/MA/SMK/Paket C	104,25-104,85% 92,25-92,75% 84,00-84,85% 93,75-94,50% 73,50-74,24% 65,00-66,00%
22	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan.	- Angka usia harapan hidup.	68 Tahun
23	Suksesnya Keluarga Berencana dan terciptanya keluarga berkualitas.	- Cakupan peserta KB aktif - Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.	86,81% 47,03%

2.1.6 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana

sasaran akan dicapai. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran. Tujuan dan sasaran misi tersebut Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah dalam satu tahun tersebut.

2.1.6.1 Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk mencapai misi: *Melanjutkan reformasi birokrasi, mendukung penegakan supremasi hukum dan HAM*, yaitu :
 - a. Meningkatkan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur pemerintah.
 - b. Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah melalui pendidikan yang lebih tinggi dan bimbingan teknis (sertifikasi profesi).
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai.
 - d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi.
 - e. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dibudaaang hukum.
2. Strategi untuk mencapai misi: *Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah dan mendukung kemandirian energi*, yaitu:
 - a. Membangun dan meningkatkan infrastruktur Ke PU-an dan tata ruang.
 - b. Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air baku, air minum dan sanitasi.

- c. Menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah.
 - d. Mendorong peningkatan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara.
 - e. Membangun fasilitas infrastruktur dan SDM teknologi informasi dan komunikasi.
 - f. Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan sumber energi.
 - g. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pengembangan energi alternatif.
3. Strategi untuk mencapai misi: *Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan*, yaitu :
- a. Melanjutkan program-program khusus penanganan masyarakat miskin (seperti bedah kampung). serta mengoptimalkan pemanfaatannya.
 - b. Menumbuhkembangkan ekonomi rakyat.
 - c. Meningkatkan profesionalisme dan daya saing pelaku UKM dan koperasi.
 - d. Membangun pasar rakyat/tradisional dan modern serta mengoptimalkan pemanfaatannya.
 - e. Memberikan kemudahan dalam berinvestasi bagi para investor.
 - f. Mengoptimalkan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi.
 - g. Membangun, meningkatkan dan menata destinasi wisata.
 - h. Mendorong dan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikasi kompetensi.
 - i. Mendorong terbangunnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat.
 - j. Mendorong terbukanya kawasan ekonomi baru.
 - k. Pelibatan masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi.

4. Strategi untuk mencapai misi: *Mewujudkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan provinsi maju di kawasan timur Indonesia*, yaitu:
 - a. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan ditingkat tapak.
 - b. Meningkatkan jumlah dan mutu produksi hasil hutan alam dan hutan tanaman.
 - c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan.
 - d. Meningkatkan teknologi dan inovasi Pokmas.
 - e. Melakukan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan dan kehutanan.
 - f. Meningkatkan kapasitas aparat, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta penanggulangan bencana.
 - g. Menyediakan sarana dan prasarana sektor pertanian secara memadai.
 - h. Mengembangkan varietas unggulan berbagai jenis tanaman perkebunan yang banyak diusahakan petani.
 - i. Mengembangkan populasi berbagai jenis ternak potong dan unggas.
 - j. Mendorong dan memfasilitasi berbagai jenis inovasi teknologi dibidang peternakan.
 - k. Mendorong peningkatan kapasitas dan teknologi perikanan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan perikanan.
5. Strategi untuk mencapai misi: *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya*, yaitu:
 - a. Melakukan pendataan *by name by address* masyarakat buta aksara dan memberikan pendidikan khusus.
 - b. Meningkatkan peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.

- c. Meningkatkan penjamin mutu bagi sekolah menurut jenjang pendidikan.
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.
- e. Meningkatkan kepesertaan ber KB bagi pasangan usia subur.
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga untuk meningkatkan prestasi.
- g. Meningkatkan minat baca masyarakat.
- h. Memfasilitasi dan meningkatkan event-event budaya.
- i. Memfasilitasi dan meningkatkan intensitas pertemuan antar umat beragama.

2.1.6.2 Arah Kebijakan

1. Arah kebijakan untuk mencapai misi : *Melanjutkan reformasi birokrasi, mendukung penegakan supremasi hukum dan HAM*, yaitu :
 - a. Kebijakan pelayanan publik yang mudah (tidak birokratis).
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah
 - c. Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan public
 - d. Peningkatan pendidikan, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan
 - e. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
2. Arah kebijakan untuk mencapai misi: *Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah dan mendukung kemandirian energi*, yaitu:
 - a. Penyediaan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan infrastuktur secara merata di seluruh
 - b. Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air baku, air minum dan sanitasi dengan harga

- c. Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
 - d. Peningkatan alokasi anggaran untuk peningkatan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara
 - e. Penyediaan perangkat lunak dan keras serta SDM TIK yang berkemampuan informatika.
 - f. Pengembangan dan peningkatan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang potensial,
 - g. Peningkatan hubungan yang baik dengan pemerintah pusat dan pihak swasta dalam pengembangan energi.
3. Arah kebijakan untuk mencapai misi: *Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan*, yaitu:
- a. Pengembangan kehidupan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan
 - b. Pemampuan dan pemandirian ekonomi rakyat.
 - c. Optimalisasi peran Koperasi dan UKM dalam perekonomian
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana pasar tradisional dan modern yang memadai
 - e. Penataan Struktur Industri
 - f. Jaminan investasi yang aman bagi investor (*safe investment*)
 - g. Pemberdayaan perempuan dan peningkatan alokasi anggaran bagi kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk menunjang aktifitas ekonomi masyarakat
 - h. Peningkatan daya saing wisata Sulawesi Tengah di tingkat nasional dan internasional
 - i. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.
 - j. Peningkatan hubungan industrial.

- k. Pembinaan ekonomi masyarakat perdesaan.
- 4. Arah kebijakan untuk mencapai misi: *Mewujudkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan provinsi maju di kawasan timur Indonesia, yaitu:*
 - a. Penguatan kapasitas pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan ditingkat tapak.
 - b. Peningkatan mutu pengelolaan hutan produksi untuk meningkatkan produksi hasil hutan berkelanjutan
 - c. Peningkatan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat dengan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan.
 - d. Peningkatan kemampuan kelompok masyarakat pengelola perhutanan sosial melalui pengembangan TTG
 - e. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan yang tercermin pada meningkatnya kualitas hutan, lahan, air dan udara
 - f. Pelestarian dan keekonomian dari keanekaragaman hasil hutan melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan.
 - g. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan dunia usaha dan masyarakat tentang kebencanaan
 - h. Perbaikan jalur distribusi dan konsumsi hasil-hasil pertanian
 - i. Subsidi pupuk dan saprodi pertanian tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran serta menjamin stabilitas harga.
 - j. Perluasan dan pengembangan Lahan dan kawasan pertanian tanaman pangan.
 - k. Perluasan dan pengembangan Lahan dan kawasan pertanian tanaman perkebunan.

- l. Peningkatan mutu hasil pertanian melalui pembinaan SDM petani dan pengelola hasil pertanian.
 - m. Peningkatan mutu hasil pertanian melalui pembinaan SDM petani dan pengelola hasil perkebunan.
 - n. Peningkatan produksi daging dan telur untuk pemenuhan pangan asal ternak potong dan unggas.
 - o. Peningkatan upaya pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.
 - p. Pengembangan benih tanaman untuk pakan ternak.
 - q. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan tangkap dan budidaya.
 - r. Peningkatan sarana dan prasarana di bidang perikanan.
 - s. Pengembangan kawasan pesisir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
5. Arah kebijakan untuk mencapai misi: *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya*, yaitu:
- a. Penuntasan penduduk dari buta aksara
 - b. Penyediaan bantuan pendidikan untuk anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti pendidikan.
 - c. Penyediaan guru berdasarkan bidang ilmu sesuai kebutuhan.
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana sekolah/ruang kelas semakin baik.
 - e. Peningkatan kapasitas dan kualitas perpustakaan sekolah.
 - f. Peningkatan standar sekolah pada setiap jenjang pendidikan.
 - g. Peningkatan akreditasi di semua jejang pendidikan.
 - h. Peningkatan mutu dan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
 - i. Pemerataan tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota.

- j. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya ber-KB.
- k. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana dan promosi serta pergerakan kepada masyarakat.
- l. Penyediaan fasilitas bagi kegiatan kepemudaan dan penguatan kelembagaan pemuda.
- m. Penguatan kapasitas lembaga adat (*capacity building*).
- n. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana FKUB.
- o. Peningkatan dialog antaraumat beragama dikalangan tokoh agama, guru agama, pendakwa, cendekiawan, pemuda dan lembaga sosial keagamaan.
- p. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan hubungan kerjasama lembaga sosial keagamaan serta peningkatan sarana prasarana rumah ibadah dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

BAB

III

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Baik
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2019

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2019. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Capaian IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

No .	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91 ≤	76 ≤ 90	66 ≤ 75	51 ≤ 65	≤ 50
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	62,51-81,25%	82,71%	132%	√				
	Capaian Rata-Rata			132%	√				
2.	- Opini BPK	WTP	Masih menunggu hasil pemeriksaan BPK						
	- Nilai akuntabilitas kinerja	B	B	100%	√				
	- Indeks Reformasi Birokrasi	65	Masih menunggu hasil pemeriksaan Kemen PAN						
	Capaian Rata-Rata			100%	√				
3.	- Persentase kemandapan jaringan jalan	65%	60,57%	93,18%	√				
	- Persentase rumah tangga pengguna	94%	94,67%	100,7%	√				

	listrik.	61,49%							
	- Persentase rumah tangga pengguna air bersih.	72,35%	60,10%	97,74%	√				
	- Persentase rumah layak huni	14,08%	62,86%	86,88%		√			
	- Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB		15,13%	107,5%	√				
	Capaian Rata-Rata			99,60%	√				
4.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	86,71-87,11%	86, 82%	99,7%	√				
	Capaian Rata-Rata			99,7%	√				
5.	Indeks gini	0,354-0,344	0,330	95,9%	√				
	Capaian Rata-Rata			95,9%	√				
6.	Persentase koperasi aktif	65,67%	57%	86,80%		√			
	Capaian Rata-Rata			86,80%	√				
7.	- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	32%	20,07%	62,72%				√	
	- Ekspor bersih perdagangan.	1000 Juta USD	2.758,55 Juta USD	275,86%	√				
	Capaian Rata-Rata			169,29 %	√				
8.	Pertumbuhan industri.	7,60%	19,42	255,53%	√				
	Capaian Rata-Rata			255,53 %	√				
9.	Nilai realisasi investasi								

	- PMDN	1.331.000.000.000	4.438.790.800.000	333%%	√				
	- PMA	17.968.500.000.000	27.075.580.350.000	151%	√				
	Capaian Rata-Rata			242 %	√				
10.	- Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG).	75,43%	75,43%	100%	√				
	- Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,37%	77,37%	100%	√				
	Capaian Rata-Rata			100%	√				
11.	- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.	19.500 Orang	24.660 Org	126%	√				
	- Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	3.600.000 Orang	3.090.171 Org	86%	√				
	Capaian Rata-Rata			106%	√				
12.	- Tingkat pengangguran terbuka	3,36%	3,15%	93,8%	√				
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,96%	67,59%	95,25%	√				
	Capaian Rata-Rata			94,53%	√				
13.	Persentase kabupaten/kota tidak tertinggal.	56,15%	76,92%	142,84%	√				
	Capaian Rata-Rata			142,84 %	√				

14.	Kontribusi PDRB sub sektor kehutanan	3%	856,82%	28.560%	✓				
	Capaian Rata-Rata			28.560 %	✓				
15.	- Persentase kerusakan kawasan hutan.	0,01%	0,01%	100%	✓				
	Capaian Rata-Rata			100	✓				
16.	Indeks kualitas lingkungan hidup.	70 poin	83	118,57%	✓				
	Capaian Rata-Rata			118,57	✓				
17.	Nilai tukar petani	104,73	95,40	91,09	✓				
	Capaian Rata-Rata			91,09%	✓				
18.	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.	28,40%	26,23%	92,36%	✓				
	- Jumlah PDRB sub sektor perkebunan.	Rp. 12.722.383	Rp. 12.480.042	98,10%	✓				
	Capaian Rata-Rata			95,23%	✓				
19.	- Nilai tukar nelayan.	107,68	106,77	99,15%	✓				
	- Nilai ekspor hasil perikanan (USD)	3.200.000	3.763.124,02	117,60%	✓				
	Capaian Rata-Rata			108,37 %	✓				
20.	Persentase angka melek aksara.	98,40-98,75	96,50	97,72%	✓				
	Capaian Rata-Rata			97,72%	✓				
21.	- Angka Partisipasi Kasar (APK) :	104,25-	104,30%	99,48%	✓				

	SD/MI/Paket A	104,80 %							
	SMP/MTs/Paket B	92,25-92,75%	92,30%	99,51%	✓				
	SMA/MA/SMK/Paket C	84,00-84,85%	84,75%	99,88%	✓				
	- Angka Partisipasi Murni (APM) :								
	SD/MI/Paket A	93,70-94,50%	94,00%	99,47%	✓				
	SMP/MTs/Paket B	73,50-74,25%	74,00%	99,66%	✓				
	SMA/MA/SMK/Paket C	65,00-66,00%	65,75%	99,62%	✓				
	Capaian Rata-Rata			99,60%	✓				
22.	Angka usia harapan hidup	68 Tahun	67,78 Tahun	99,5%	✓				
	Capaian Rata-Rata			99,5%	✓				
23.	- Cakupan peserta KB aktif.	86,84%	78%	89,85%		✓			
	- Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.	47,03%	68,13%	60,77%				✓	
	Capaian Rata-Rata			75,31%			✓		

Data diolah dari beberapa Perangkat Daerah Prov. dan BPS Prov. Sulteng, 2020

Tabel diatas dapat menggambarkan bahwa dari 42 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 35 IKU telah memenuhi kriteria sangat baik, 3 IKU memenuhi kriteria tinggi, 2 IKU capaiannya rendah serta 2 IKU yaitu opini BPK realisasinya masih menunggu hasil pemeriksaan BPK dan Indeks Reformasi Birokrasi masih menunggu hasil evaluasi Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mayoritas IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 telah berhasil dicapai dengan kriteria sangat baik bahkan ada yang mencapai lebih dari 100% (10 IKU).

Pencapaian IKU tersebut diatas bila diukur dengan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 diukur dengan skala nilai peringkat kinerja

No	Tingkat capaian	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	32	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	5	Tinggi
3	$66 \leq 75$	1	Sedang
4	$51 \leq 65$	2	Rendah
5	≤ 50	-	Sangat Rendah
6		2	Indikator Kinerja Sasaran Opini BPK masih menunggu hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemda dan Indeks RB masih menunggu hasil evaluasi Kemenpan RB.
JUMLAH		42	

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja secara umum sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian evaluasi dan analisis capaian kinerja akan diuraikan persasaran strategis .

1. Sasaran Kesatu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien dinilai dengan tingkat kepuasan masyarakat.

Pencapaian dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2019 THD RPJMD
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	83,21	102%	94,83%	116%	82,71%	101,80 %	65,51-81,25	94,83%

Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD

Tabel diatas menunjukan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil survey yang dilakukan selama 3 tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Tahun 2017 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukan kinerja yang sangat baik, karena terealisasi diatas target yang direncanakan yaitu sebesar 83,21% dengan capaian kinerja 102%. Terjadi kenaikan sebesar 13,94% pada tahun 2018 dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 94,83% dengan capaian kinerja 116%. Selanjutnya pada tahun 2019 Indeks Kepuasan Masyarakat turun 14,65% dari tahun 2018 karena hanya terealisasi sebesar 82,71% dengan capaian kinerja 101,80%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 ini telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu telah mencapai 101,80%.

Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Survey Kepuasan Masyarakat ini ditentukan berdasarkan hasil survei responden dengan pengukuran 14 unsur pelayanan. Selain itu berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan

Publik, terdapat perubahan klasifikasi angka pada pengkategorian Mutu Layanan. Pengukuran hasil survei menunjukkan IKM terhadap pelayanan perizinan sebesar **82,71**, indeks ini jika berdasarkan target dalam RPJMD berada pada kategori **Sangat Baik** yakni *range* (rentang jarak) 81,26 – 100,00. Akan tetapi jika berdasarkan aturan baru pada Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tersebut maka IKM 82,71% berada pada kategori **Baik** yakni *range* 76,61 – 88,30. Untuk lebih jelasnya, hasil survei IKM pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Survei IKM Tahun 2019

Keterangan :			No.	UNSUR PELAYANAN	NRR
- U1 s/d U14		=Unsur-Unsur Pelayanan	U1	Prosedur Pelayanan	3.236
- NRR		=Nilai Rata-Rata	U2	Persyaratan Pelayanan	3.248
- IKM		=Indeks Kepuasan Masyarakat	U3	Kejelasan Petugas dalam Memberi Informasi	3.274
- *)		=Jumlah NRR.IKM tertimbang	U4	Kepastian Kehadiran Petugas	3.235
- **)		=Jumlah NRR.Tertimbang x 25	U5	Tanggung jawab Petugas dalam memberikan pelayanan	3.292
- NRR Per Unsur		=Jumlah nilai per unsur dibagi	U6	Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan	3.288
		Jumlah Kuesioner yang terisi	U7	Kecepatan Pelayanan	3.233
NRR tertimbang		=NRR per unsur x 0.071	U8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3.319
per unsur			U9	Kesopanan dan keramahan petugas	3.313
IKM UNIT PELAYANAN : 82,71			U10	Kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan	3.302
Mutu Pelayanan :			U11	Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan	3.346
A (Sangat Baik)	: (3,5324 - 4,00)	88,31 - 100,00	U12	Ketetapan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan	3.359
B (Baik)	: (3,0644 - 3,532)	76,61 - 88,30	U13	Kenyamanan lingkungan pelayanan	3.449
C (Kurang Baik)	: (2,60 - 3,064)	65,00 - 76,60	U14	Keamanan pelayanan	3.428
D (Tidak Baik)	: (1,00 - 0,5996)	25,00 - 64,99			

Sumber data : DPMPTSP, 2020

Beberapa faktor penunjang tercapainya sasaran ini adalah:

- Adanya kegiatan peningkatan pengembangan sistem pelayanan terpadu. Kegiatan ini memberikan penyebaran informasi pelayanan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan, diantaranya dengan menyediakan mekanisme dan standar perizinan secara terpadu.
- Kegiatan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang merupakan kegiatan melakukan pembinaan tentang standar pelayanan perizinan dan non perizinan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik dengan menyediakan SOP dan SPM sebagai standar dan dasar pelaksanaan pelayanan perizinan, juga sebagai sarana dalam mengukur kinerja terhadap penyelenggaraan PTSP.

Program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut:

- Program pembinaan kinerja dan pelayanan publik;
- Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan

2. Sasaran Kedua Meningkatnya Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Sasaran meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dengan tiga indikator kinerja yaitu opini BPK, nilai akuntabilitas kinerja dan nilai reformasi birokrasi, berikut capaian dan penjelasannya:

1) Opini BPK

Realisasi dan capaian kinerja dan opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Opini BPK Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2019 THD RPJMD
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	Masih menunggu hasil pemeriksaan BPK		WTP	

Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara periodik setiap tahun ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017 dan 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dengan capaian masing-masing 100%. Sedangkan untuk tahun 2019 Opini BPK atas laporan keuangan belum dapat diukur karena masih menunggu hasil audit BPK ketika laporan ini disusun.

Sebagai bagian penting dari proses pemeriksaan, aspek pengendalian internal berperan penting dalam reformasi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik. Melalui penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan yang terjadi yang disebabkan oleh kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui

pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

2) Nilai Akuntabilitas Kinerja.

Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja
Nilai akuntabilitas kinerja Tahun 2017, 2018, 2019 dan
capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD**

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2019 THD RPJMD
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1	Nilai akuntabilitas kinerja	Predikat	B	B	B	B	B	100%	BB	B

Tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2017 memperoleh nilai 66,31 dengan predikat B (capaian 100%) dan pada tahun 2018 memperoleh nilai 67,16 juga dengan predikat B (capaian 100%). Sedangkan pada tahun 2019 nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 68,30 dengan predikat B atau capaian 100%.

Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseraan baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggungjawabkan mandat

yang diberikan publik dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara.

Untuk indikator sasaran nilai hasil evaluasi sapik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan adalah nilai B untuk akuntabilitas kinerja pemerintah dan telah berhasil dicapai 100% atau bernilai kinerja sangat baik. Uraian singkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memperbaiki sistem manajemen kinerja, yang ditunjukkan dengan meningkatnya komitmen pemimpin daerah bersama dengan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- Beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja dalam dokumen Renstra OPD belum berorientasi hasil, kurang spesifik, kurang relevan dan kurang cukup untuk mengukur capaian sasaran strategis;
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh OPD telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal dan memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja yang cukup memadai. Namun masih terdapat indikator kinerja yang belum berorientasi hasil , kurang relevan dan kurang cukup untuk mengukur capaian sasaran strategis serta IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen penganggaran;
- Beberapa OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun *cascading* kinerja, mulai dari sasaran RPJMD yang diturunkan ke sasaran Renstra OPD, kemudian dijabarkan ke kinerja eselon III dan eselon IV. Namun *cascading* kinerja tersebut belum

sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja khususnya di level eselon III dan IV.

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menggunakan aplikasi manajemen kinerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja namun belum terintegrasi dengan aplikasi perencanaan dan penganggaran;
- Laporan kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan beberapa OPD telah menyajikan analisis pencapaian kinerja, dan perbandingan data kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Namun analisis capaian kinerja dan efisiensi yang disampaikan masih belum memadai. Selain itu, informasi keuangan belum dikaitkan dengan pencapaian kinerja organisasi;
- Evaluasi internal atas implementasi SAKIP OPD yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan terhadap OPD, namun kualitas hasil evaluasi masih belum dapat digunakan secara optimal untuk perbaikan implementasi SAKIP di OPD.

Beberapa hal telah dilakukan oleh Pemda Sulawesi Tengah untuk mendorong akuntabilitas juga terlihat dari upaya pengembangan *e-Government*. Dalam konsep e-government tersebut, peran dan keterlibatan masyarakat dalam berinteraksi melalui jaringan elektronik akan lebih terberdayakan. Masyarakat dapat ikut terlibat dan berperan aktif dalam mendukung dan memberikan partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan.

Pembangunan infrastruktur jaringan computer di Pemda Sulawesi Tengah terus mengalami pengembangan. Pembangunan jaringan komputer tersebut memungkinkan terkoneksiya tiap-tiap OPD dalam jaringan internet, sehingga transformasi data dan informasi antar unit kerja dapat berjalan semakin lancar. Beberapa pelayanan secara *on-line* untuk pelayanan masyarakat dan pelayanan internal pemerintah antara lain LPSE, SIMDA, e-Planing, e-monev, Si-AKIP dan lain-lain.

3) Indeks Reformasi Birokrasi.

Indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Indeks reformasi Birokrasi Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2019 THD RPJMD
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	61,6	99,5%	61,80	96,56%	Masih menunggu hasil pemeriksaan Kemen PAN RB		70	

Tabel diatas menunjukan bahwa Indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2017 memperoleh nilai 61,6 dengan capaian kinerja 99,5%, kemudian tahun 2018 memperoleh nilai 61,80 dengan capaian 96,56%. Untuk Indeks Reformasi

Birokrasi tahun 2019 ini masih menunggu hasil evaluasi Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Reformasi birokrasi diarahkan pada perubahan di delapan aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, Tata laksana, Peraturan Perundang-Undangan, Sumberdaya Manusia, Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Pola Pikir (*mind-set*) serta Budaya Kerja (*culture-set*). Setiap tahun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah seperti :

- a. Telah dilakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. Telah mulai penerapan *e-government* dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan;
- c. Telah dibangun zona integritas terutama untuk unit-unit yang terkait dengan pelayanan langsung kepada masyarakat;

- d. Penguatan akuntabilitas kinerja dengan mulai menumbuhkan budaya kinerja di seluruh unit organisasi.

Beberapa hal yang masih harus diperhatikan terkait dengan upaya untuk menjalankan program reformasi birokrasi adalah :

- a. Belum dilakukan evaluasi atas penerapan kebijakan agen perubahan sebagai upaya untuk melakukan perubahan *mind set* aparatur;
- b. Kajian atas peraturan perundangan dilingkungan Provinsi Sulawesi Tengah belum optimal terutama terkait dengan identifikasi berbagai kebijakan yang tidak selaras, tidak lagi diperlukan serta kebijakan yang bersifat lintas sector;
- c. Penilaian kinerja individu belum selaras dengan kinerja organisasi;
- d. Evaluasi atas kebijakan pengawasan perlu disempurnakan terkait dengan pengembangan manajemen resiko, penanganan benturan kepentingan, *whistle blowing system* serta penanganan gratifikasi.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu :

- 1. Melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan kebijakan agen perubahan agar dapat diidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan perubahan *mind set* aparatur dapat terwujud;
- 2. Melakukan penyegaran terhadap aparatur berupa pelatihan dan sebagainya untuk memperkuat integritas aparatur. Selain itu perlu dilakukan penyempurnaan

sistem integritas terkait pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran dan mekanisme hubungan kerja antar pegawai serta mensosialisasikan hal tersebut kepada seluruh pegawai;

3. Melakukan kajian atas peraturan perundangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan berfokus pada penyederhanaan prosedur serta tetap memperhatikan pengendalian atas pelaksanaannya;
4. Mendorong penerapan *e-government* secara merata dalam manajemen pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Menerapkan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi serta melakukan pengukuran kinerja secara periodik sehingga capaian kinerja individu dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan pegawai berkelanjutan.
6. Memperkuat penerapan sistem integritas dengan menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System* (WBS) dan benturan kepentingan, terutama implementasinya diberbagai SKPD serta meneruskan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
7. Setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik agar melakukan reviu secara berkala atas pelayanan standar pelayanan maupun SOP pelayanan dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut dengan melibatkan Inspektorat dan Biro Organisasi

Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan pengawasan, akuntabilitas dan reformasi birokrasi dilakukan melalui program:

- Program pembinaan kinerja dan pelayanan publik
- Program penataan dan penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

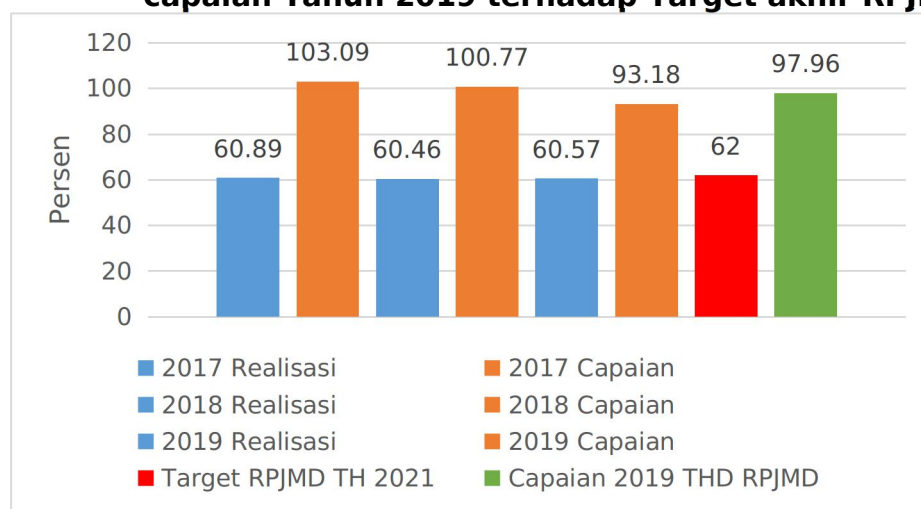
3. Sasaran Ketiga Tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan memadai.

Sasaran Tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan memadai dengan lima indikator kinerja sasaran, data capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase kemandapan jaringan jalan dalam kondisi baik
 Realisasi dan capaian kinerja Persentase kemandapan jaringan jalan dalam kondisi baik dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.1

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase Jaringan jalan dalam kondisi baik Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD.



Gambar diatas menunjukkan bahwa Persentase jaringan Jalan dalam kondisi baik tahun 2017 sebesar 60,89% dengan capaian kinerja 103,09%. Terjadi penurunan jaringan jalan dalam kondisi baik Tahun 2018 sebesar 0,71%, dimana tahun 2018 jaringan dalam kondisi baik tercatat sebesar 60,46% dengan

capaian kinerja 100,77%. Selanjutnya tahun 2019 Persentase jaringan Jalan dalam kondisi baik tercatat sebesar 60,57% dengan capaian kinerja 93,18%. Terhadap target akhir RPJMD RPJMD tahun 2021 telah terealisasi sebesar 97,69%.

Panjang jalan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah 12.513,00 Km. Panjang jalan yang menjadi kewenangan Provinsi adalah sepanjang 1.763,74 km, dengan panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap adalah 995,64 Km atau 60,57% dan kondisi tidak mantap sepanjang 648,10 Km atau 39,45%.



Jalan Provinsi pada umumnya dibangun melalui program IPJP (APBN murni) dan proyek bantuan luar negeri oleh pemerintah pusat. Sampai dengan tahun 2016 belum pernah dilaksanakan

peningkatan kondisi jalan atau pemeliharaan berkala jalan yang berbasis link. Oleh karena itu, jalan provinsi di Sulawesi Tengah umumnya telah berumur lebih dari 18 tahun. Pada tahap ini, laju penurunan kondisi jalan menjadi lebih cepat. Kondisi ini diperparah dengan kerap terjadinya bencana alam berupa longsor, baik dilereng bukit maupun pada badan jalan. Dari aspek regulasi,

sejak diterbitkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 01/PRT/M/201, maka indikator kinerja penyelenggaraan jalan bukan hanya kemantapan jalan tetapi juga tingkat konektivitas (keterhubungan) pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi. Hal ini berarti bahwa kegiatan penanganan jalan juga harus mulai melaksanakan kegiatan pembangunan pada ruas-ruas jalan yang belum tembus.

Memperhatikan kondisi tersebut, pada awal Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Bina Marga Daerah menetapkan strategi penanganan jalan yang lebih memberdayakan kegiatan pemeliharaan rutin, yaitu dengan meningkatkan anggaran pelaksanaan serta melengkapi peralatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR). Peralatan UPR juga akan sekaligus berfungsi sebagai peralatan *Disaster Relief Unit* (DRU) saat kondisi tanggap darurat/bencana alam, serta menjadi peralatan utama dalam melaksanakan pembangunan jalan yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat demi meningkatkan konektivitas daerah. Adapun kegiatan peningkatan kondisi jalan dilaksanakan secara selektif dengan memilih segmen kondisi rusak/rusak berat pada suatu ruas jalan yang mempunyai peran lebih vital dibandingkan ruas jalan lainnya. Selanjutnya kendala anggaran diminimalkan dengan mengoptimalkan sumber-sumber anggaran lainnya yaitu dana alokasi khusus (DAK) dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pihak swasta. Hasil dari upaya-upaya tersebut mulai terlihat pada akhir tahun 2019, yaitu laju

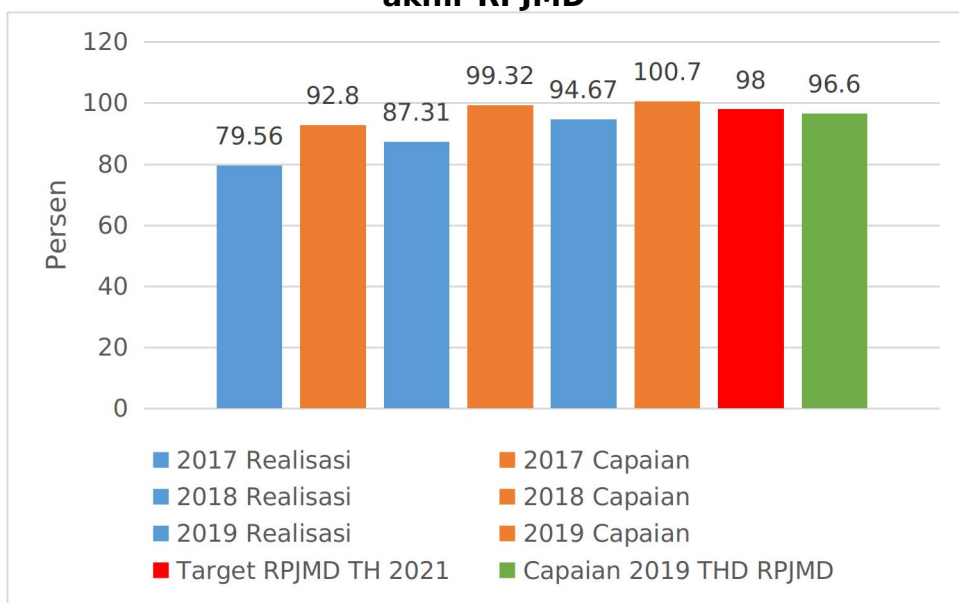
penurunan kondisi jalan dapat ditekan (selisih antara kemantapan jalan teoritis dengan aktual).

2) Persentase rumah tangga pengguna listrik

Realisasi dan capaian kinerja Persentase rumah tangga pengguna listrik dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.3

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase rumah tangga pengguna listrik Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD



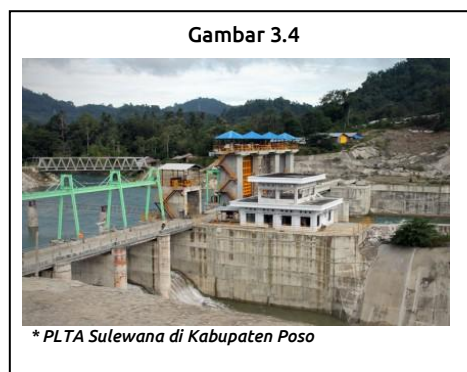
Gambar diatas menunjukkan bahwa persentase rumah tangga pengguna listrik mengalami kenaikan selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2017 persentase rumah tangga pengguna listrik di Sulawesi Tengah tercatat sebesar 79,56% dengan capaian kinerja 92,8%. Terjadi peningkatan 9,74% pada tahun 2018, dimana persentase pengguna listrik menjadi 87,31% dengan capaian kinerja 99,32%. Selanjutnya pada tahun 2019 persentase rumah tangga pengguna listrik naik lagi menjadi 94,67% dengan capaian kinerja mencapai 100,7%.

Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 telah tercapai sebesar 96,60%.

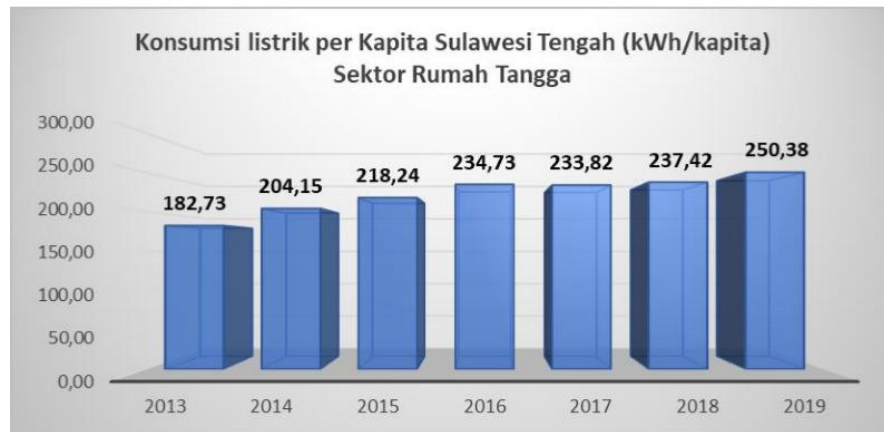
Pada tahun 2019 tercatat 837.718 rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah rumah tangga yang teraliri listrik sebanyak 793.290 atau 94,67%.

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian,

kebutuhan energi listrik juga turut meningkat. Selain penggunaan energi fosil untuk pembangkitan tenaga listrik yang lambat laun mulai dikurangi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas ESDM mengoptimalkan pengelolaan energi daerah yang berasal dari energi baru terbarukan. Hal ini menjadi salah satu sasaran strategis dengan nilai konsumsi listrik per kapita yang diharapkan meningkat tiap tahunnya. Nilai konsumsi listrik per kapita menjadi indikator tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah. Nilai konsumsi listrik per kapita Sulawesi Tengah khusus untuk sektor rumah tangga meningkat, dari yang semula 237,4 kWh/kapita di tahun 2018 meningkat menjadi 250,4 kWh/ kapita di tahun 2019. Adapun data runtun waktu konsumsi listrik per kapita Sulawesi Tengah sector rumah tangga dapat digambarkan oleh grafik berikut :



Gambar 3.5

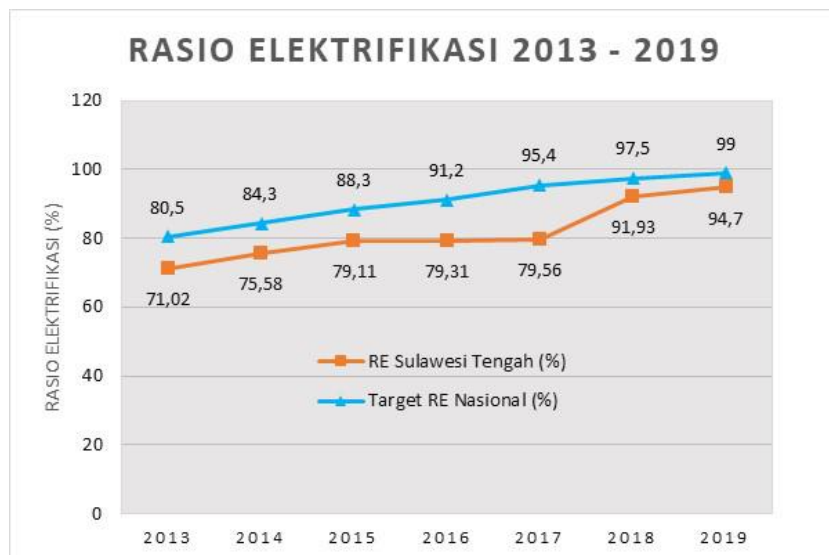


Sumber : Dinas ESDM Prov. Sulteng, 2020

Dari data yang tersaji pada grafik di atas tergambar bahwa rata-rata pertumbuhan nilai konsumsi listrik per kapita Sulawesi Tengah dari sektor rumah tangga dari tahun 2013 sampai tahun 2019 berada di angka 5%. Jika dihitung secara keseluruhan (termasuk sector rumah tangga, sosial, bisnis, industry, pemerintahan dan layanan khusus), konsumsi listrik per kapita Sulawesi Tengah mencapai 375,3 kWh/kapita. Nilai ini masih jauh di bawah angka nasional yaitu 1.142 kWh/kapita di tahun 2019.

Selanjutnya rasio elektrifikasi rumah tangga meningkat sebesar 2,77% menjadi 94,7% di tahun 2019 dari angka tahun sebelumnya yaitu 91,93%. Walaupun terjadi peningkatan, rasio elektrifikasi (RE) Provinsi Sulawesi Tengah masih jauh di bawah target RE nasional yaitu sebesar 99%. Grafik berikut menunjukkan peningkatan rasio elektrifikasi Sulawesi Tengah dan rasio elektrifikasi nasional selama 7 (tujuh) tahun terakhir.

Gambar 3.6



Sumber data : Dinas ESDM Prov. Sulteng, 2020

Secara total, rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Tengah berada pada angka 94,7% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan peningkatan dari rasio elektrifikasi tahun sebelumnya yaitu 91,93%. Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah bersama-sama dengan PT. PLN (Persero) berusaha meningkatkan rasio elektrifikasi dengan rata-rata peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 3,9% dari tahun 2013 sampai dengan 2019. Namun angka rasio elektrifikasi Sulawesi Tengah masih berada di bawah angka target nasional yaitu sebesar 99% di tahun 2019.

Rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Tengah dapat dijabarkan lagi menjadi rasio elektrifikasi tiap kabupaten/kota, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.9

RASIO ELEKTRIFIKASI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)	JUMLAH KELUARGA PENGGUNA LISTRIK (KK)		JUMLAH KELUARGA BELUM BERLISTRIK (KK)	RASIO ELEKTRIFIKASI (%)			TOTAL RASIO ELEKTRIFIKASI (%)
			PLN	NON PLN		PLN	NON PLN	BELUM BERLISTRIK	
1	2	3	4	5	6	$7 = (4/3) \times 100$	$8 = (5/3) \times 100$	$9 = (6/3) \times 100$	$10 = (4+5)/3 \times 100$
1	Banggai Kepulauan	35.980	28.450	1.889	5.641	79,07	5,25	15,68	84,32
2	Banggai	103.359	98.937	1.769	2.653	95,72	1,71	2,57	97,43
3	Morowali	42.234	33.883	6.095	2.256	80,23	14,43	5,34	94,66
4	Poso	62.533	60.970	1.043	520	97,50	1,67	0,83	99,17
5	Donggala	83.443	71.939	5.716	5.788	86,21	6,85	6,94	93,06
6	Toli-Toli	60.674	54.862	2.183	3.629	90,42	3,60	5,98	94,02
7	Buol	37.979	32.035	2.857	3.087	84,35	7,52	8,13	91,87
8	Parigi Moutong	125.818	112.085	4.268	9.465	89,09	3,39	7,52	92,48
9	Tojo Una-Una	46.569	35.637	8.734	2.198	76,53	18,75	4,72	95,28
10	Sigi	73.145	59.842	7.521	5.782	81,81	10,28	7,90	92,10
11	Banggai Laut	20.969	13.870	5.853	1.246	66,15	27,91	5,94	94,06
12	Morowali Utara	35.347	29.061	4.140	2.146	82,22	11,71	6,07	93,93
13	Palu	109.668	109.451	200	17	99,80	0,18	0,02	99,98
TOTAL		837.718	741.022	52.268	44.428	88,46	6,24	5,30	94,70

Tabel di atas menunjukkan rasio elektrifikasi per kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Palu memiliki rasio elektrifikasi terbesar yaitu 99,98%, sedangkan Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki rasio elektrifikasi terendah yaitu 84,32%. Namun, jika dilihat dari elektrifikasi yang dilaksanakan oleh PLN, Kabupaten Banggai Laut berada di posisi terendah yaitu 66,15%. Hal ini dikarenakan oleh topografi Kabupaten Banggai Laut yang merupakan daerah kepulauan.

Salah satu faktor peningkatan jumlah rumah tangga pengguna listrik tahun 2019 adalah melalui pengadaan instalasi dan sambungan listrik gratis untuk golongan masyarakat tidak mampu dengan realisasi 345 KK tersambung, yaitu Kabupaten Morowali, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Morowali, Banggai Kepulauan dan Kota Palu dengan spesifikasi sambungan kapasitas daya 450 VA dan instalasi untuk 3 titik mata lampu dan 1 titik kotak

kontak. Adapun lokasi pengadaan instalasi dan sambungan listrik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Lokasi pemasangan instalasi dan sambungan listrik gratis Tahun 2019

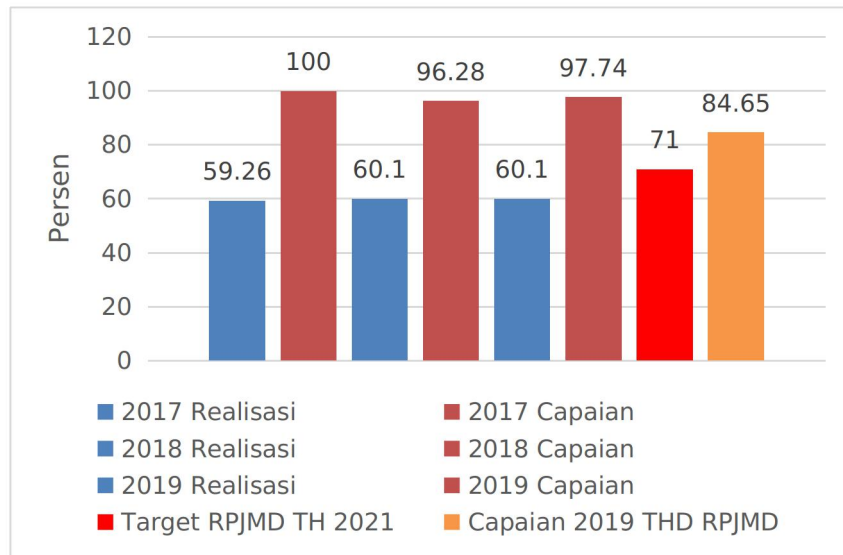
Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Sambungan
Morowali	Menui Kepulauan	Terebino	89 KK
Donggala	Sojol	Balukang	74 KK
Parigi Moutong	Bolano Lambunu		50 KK
Poso	Lore Peore	Tatabosa	37 KK
Morowali Utara	Lembo	Wawopada	13 KK
Banggai	Liang		61 KK
Kepulauan Palu	Ulujadi	Tipo	21 KK
Total sambungan			345 KK

Sumber Data : Dinas ESDM Prov. Sulteng thn 2020

3) Persentase rumah tangga pengguna air bersih

Realisasi dan capaian kinerja Persentase rumah tangga pengguna air bersih dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3.7
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase rumah tangga pengguna air bersih Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD



Gambar diatas menunjukkan bahwa Persentase rumah tangga pengguna air bersih tahun 2017 terealisasi sebesar 59,26% dengan capaian kinerja mencapai 100%. Terjadi peningkatan sebesar 1,84% pada tahun 2018, dimana tahun 2018 persentase rumah tangga pengguna air bersih terealisasi 60,10% dengan capaian kinerja 96,28%. Selanjutnya tahun 2019 Persentase rumah tangga pengguna air bersih masih sama dengan kondisi tahun 2018 yaitu sebesar 60,10% dengan capaian kinerja 97,74%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 telah tercapai sebesar 84,65%.

Cakupan pelayanan rumah tangga pengguna air bersih Tahun 2019 mencapai 556.363 rumah tangga, sehingga sampai akhir tahun 2019 cakupan pelayanan mencapai 60,10%. Kondisi ini sama dengan tahun 2018 artinya tidak ada peningkatan jumlah rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2019, hal ini disebabkan karena pada saat pelaksanaan konstruksi, debit sungai sudah berkurang (tidak sesuai lagi dengan perencanaan) sehingga jumlah Rumah tangga yang terlayani berkurang.

Pencapaian kinerja Cakupan pelayanan rumah tangga pengguna air bersih Tahun 2019 ini didukung oleh pembiayaan APBN melalui satuan kerja pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan Sanitasi (Satker PAMS) yang juga melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana air minum melalui kegiatan SPAM IKK, SPAM kawasan MBR, SPAM Desa, SPAM Kawasan Khusus dan Bantuan Program Penyehatan PDAM yang telah melayani 113.117 rumah tangga atau sebesar 21,03%. Angka ini telah memberikan akses peningkatan pelayanan air minum di Sulawesi Tengah.

Pencapaian indikator sasaran tersebut didukung oleh upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain :

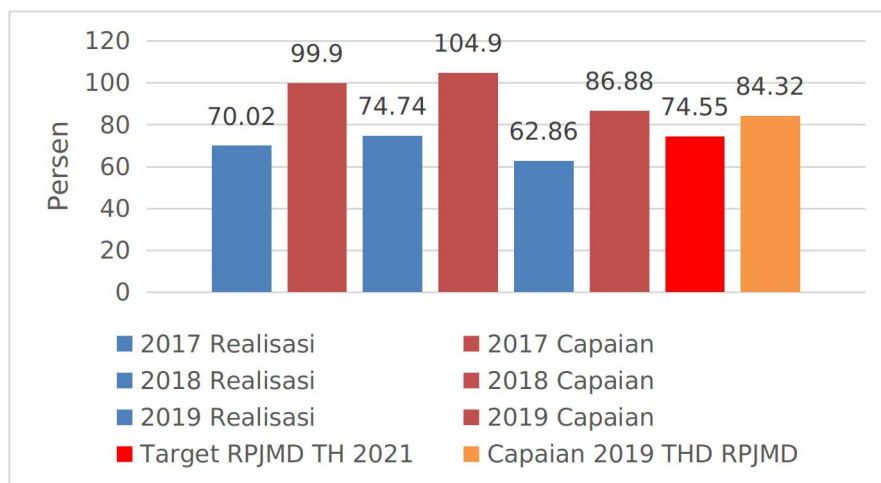
1. Penyediaan Jaringan Air Bersih, dimana pada tahun 2019 telah terbangun jaringan air bersih bagi masyarakat miskin untuk 3.657 KK;
2. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin untuk 250 KK.

4) Persentase rumah layak huni

Realisasi dan capaian kinerja Persentase rumah layak huni dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.8

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase rumah layak huni Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD



Gambar diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja rumah layak huni selama 3 tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Tahun 2017 rumah layak huni tercatat sebesar 70,02% dengan capaian kinerja 99,9%. Kemudian tahun 2018 naik 4,72% hingga terealisasi sebesar 74,74% dengan capaian kinerja mencapai 104,9%. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi rumah layak huni turun sebesar 11,88% karena hanya terealisasi sebesar 62,86% dengan capaian kinerja 86,88%. Terhadap target RPJMD tahun 2021 realisasi rumah layak huni tahun 2019 ini baru mencapai mencapai 84,32%.

Pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan serius. Setiap tahun diperkirakan terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru. Pembangunan/pengembangan unit baru diharapkan akan meningkat sebesar 1,1% pertahun hingga tahun 2021. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah mengidentifikasi masih terdapat 255.931 unit rumah tidak layak huni. Tahun 2019 terealisasi sebesar 433.423 unit rumah layak huni, dengan rincian

pembiayaan berdasarkan alokasi dana APBD Provinsi sebesar 72 unit, APBD kabupaten/kota sebesar 686 unit, APBN (BSPS) sebesar 5.698 unit, DAK sebesar 1.336 unit, dana strategis sebesar 500 unit sehingga diperoleh capaian realisasi sebesar 8.292 unit atau setara dengan 433.423 unit (62,86%).

Data kondisi perumahan tidak layak huni dan layak huni di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Data Kondisi Perumahan Di Sulawesi Tengah Tahun 2019

No.	Kabupaten/Kota	DATA		
		Jumlah Rumah (unit)	Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Rumah Layak Huni (Unit)
1	Kota Palu	72.959	56.914	16.045
2	Kabupaten Donggala	71.289	42.567	28.722
3	Kabupaten Parigi Moutong	109.214	24.541	84.673
4	Kabupaten Poso	57.134	5.627	51.507
5	Kabupaten Tojo Una-una	34.461	9.693	24.768
6	Kabupaten Banggai	88.366	13.705	74.661
7	Kabupaten Morowali	26.918	7.229	19.689
8	Kabupaten Toli-toli	53.086	21.485	31.601

9	Kabupaten Buol	37.968	10.426	27.542
10	Kabupaten Banggai Kepulauan	30.202	15.632	14.570
11	Kabupaten Sigi	58.967	34.718	24.258
12	Kabupaten Banggai laut	19.666	7.333	12.333
13	Kabupaten Morowali utara	28.938	6.061	22.877
	Jumlah Total	689.177	255.931	433.246

Sumber data :Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulteng 2020

Gambar 3.9

**Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial
Kegiatan Stimulasi Rehabilitas / Pembangunan Rumah Akibat
Bencana Alam
Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019**

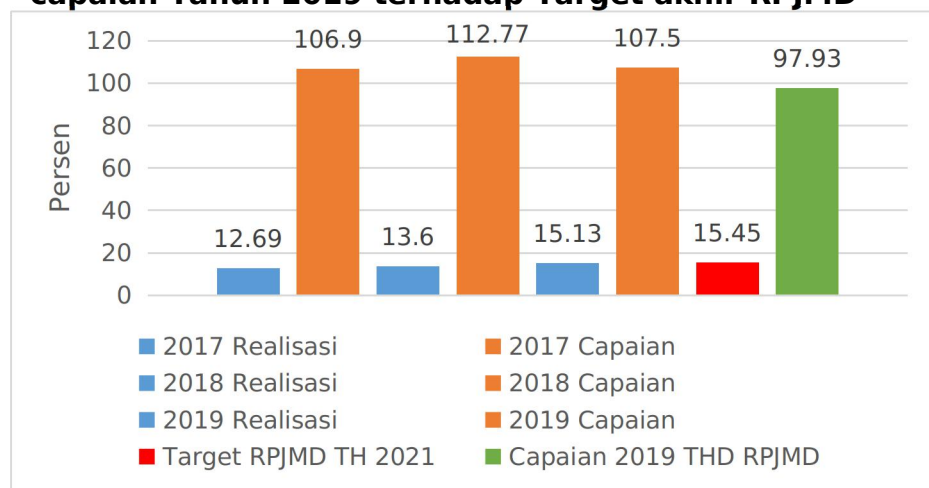


5) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Realisasi dan capaian kinerja Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.10

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD



Dari gambar diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB selama 3 tahun terakhir. Tahun 2017 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tercatat sebesar 12,69% dengan capaian kinerja 106,9%. Tahun 2018 meningkat menjadi 13,60% dengan capaian kinerja 112,77% dan pada tahun 2019 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB sebesar 15,13% dengan capaian kinerja mencapai 107,5%. Terhadap target akhir RPJMD, pencapaian tahun 2019 ini telah memberikan kontribusi sebesar 97,93%.

Kontribusi sektor pertambangan dan galian terhadap PDRB yang mencapai 15,13% dipicu oleh besarnya subsektor non migas. Dilihat dari peranannya dalam

perekonomian secara keseluruhan masih relative rendah, padahal komoditi sektor ini seperti pasir kuarsa, nikel, pasir dan batu merupakan salah satu komoditi andalan baik diekspor antar pulau maupun digunakan untuk kebutuhan pembangunan daerah. Dengan masuknya migas sebagai salah satu komoditas andalan, sektor ini akan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah.

Selain itu peningkatan persentasi Kontribusi sektor pertambangan dan galian terhadap PDRB ini juga dipengaruhi oleh nilai Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sector pertambangan yang juga meningkat dari tahun sebelumnya.

PDRB sektor pertambangan dan penggalian atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 sebesar 25183 milyar rupiah dan harga konstan 2010 sebesar 17842 milyar rupiah. Data runtun waktu dari PDRB sektor pertambangan dan penggalian ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 3.12
PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Sektor Pertambangan dan Penggalian atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 Tahun 2017 - 2019 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Pertambangan dan Penggalian	17.192	20.253	25.183	14.272	15.345	17.842

Sumber data : Dinas ESDM Prov. Sulteng Prov. 2020

Dari tabel di atas, terlihat bahwa PDRB sektor pertambangan dan penggalian Provinsi Sulawesi Tengah mengalami trend naik 2019. Laju pertumbuhan rata-rata dari tahun 2017 hingga 2019 sebesar 12,95%. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program pendukung pencapaian peningkatan nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian.

Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan berbagai infrastruktur yang memadai dilakukan melalui program :

- Program penyelenggaraan jalan.
- Program pengaturan jasa konstruksi.
- Program pemberdayaan jasa konstruksi.
- Program pengawasan jasa konstruksi.
- Program penyediaan dan pengelolaan air baku.
- Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
- Program pengembangan perumahan.
- Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial.
- Program pengelolaan kegiatan usaha pertambangan
- Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan
- Program pengembangan bidang geologi dan air tanah.

4. Sasaran Keempat Menurunnya Angka Kemiskinan.

Sasaran menurunnya angka kemiskinan yang diukur melalui persentase penduduk diatas garis kemiskinan, data capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Tahun
2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap
Target akhir RPJMD**

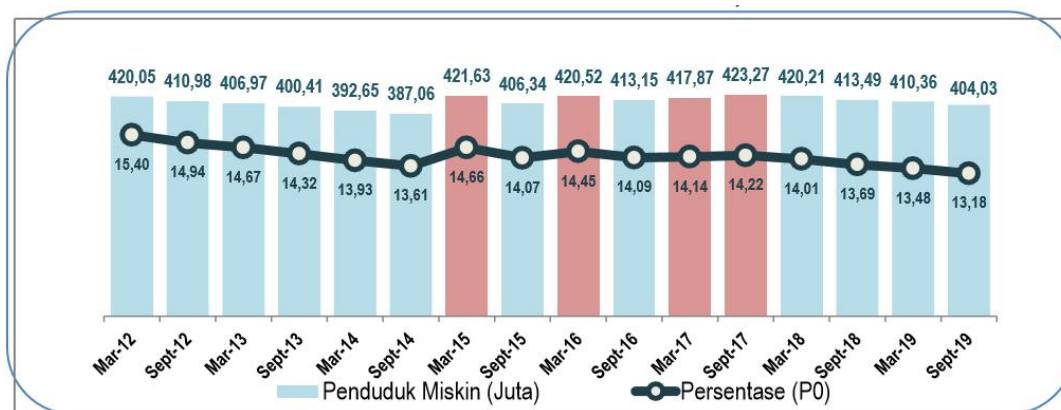
No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Targ RPJM TH 202
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	85,8	97,6%	86,2%	99,65%	86,82%	99,7%	85,9 86,3

Tabel diatas menggambarkan bahwa persentase penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah yang berada diatas garis kemiskinan pada tahun 2017 adalah sebesar 85,8% dengan capaian kinerja mencapai 97,6%. Terjadi kenaikan 0.4 poin pada tahun 2018 dimana persentase penduduk diatas garis kemiskinan terealisasi sebesar 86,2% dengan capaian kinerja 99,65%. Sedangkan pada tahun 2019 persentase penduduk diatas garis kemiskinan terealisasi sebesar 86,82% dengan capaian kinerja 99,7% atau terjadi kenaikan sebesar 0,6 poin dari tahun 2018. Selanjutnya untuk capaian terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, persentase penduduk diatas garis kemiskinan telah melebihi target yang direncanakan karna telah mencapai 100,4%.

Tahun 2019 (posisi bulan September) penduduk miskin tercatat sebesar 13,18% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 404,03 ribu orang. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 6,33 ribu orang dibandingkan Maret 2019. Sementara dibandingkan September 2018 jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 9,46 ribu orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2019-September 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 3,28 ribu orang dan daerah perdesaan turun sebesar 3,05 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 9,32% menjadi 8,90%, sedangkan di perdesaan turun dari 15,26% menjadi 15,01%.

Secara umum, pada periode Maret 2012-September 2019 tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, namun sejak 2015 tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat hingga 2017 sebelum akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga 2019. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2012 sampai dengan September 2019 ditunjukkan oleh Grafik dibawah ini.

Gambar 3.11
Jumlah dan Persentase Penduduk miskin di Sulawesi Tengah Tahun 2012- 2019



Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2020

Dilihat dari sebarannya, persentase penduduk miskin di kawasan perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan kawasan pedesaan. Dimana jumlah penduduk miskin perkotaan tahun 2019 adalah sebesar 81,46 ribu orang (8,90%) dan penduduk miskin pedesaan sebesar 322,57 ribu orang (15,01%). Hal ini bisa dipahami karena penduduk pedesaan memiliki akses layanan publik yang lebih rendah, seperti rendahnya tingkat pendidikan. Disamping itu mayoritas penduduk pedesaan bekerja disektor pertanian dimana nilai produk pertanian semakin menurun. Karenanya penduduk pedesaan memiliki pendapatan yang relative rendah dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Upaya-upaya pengurangan kesenjangan dengan memfokuskan pembangunan dikawasan pedesaan menjadi prioritas

dengan pengembangan wilayah pesisir secara terpadu, mengingat wilayah pesisir Sulawesi Tengah merupakan daerah tertinggal dan miskin. Perencanaan tata ruang juga mengedepankan kepentingan masyarakat lokal dan daya dukung lingkungan. Selain itu upaya peningkatan pendapatan untuk mendorong pengentasan kemiskinan juga perlu dilakukan dengan memfokuskan program penanggulangan kemiskinan di wilayah yang menjadi kantong kemiskinan. Sinergi program pengentasan kemiskinan termasuk dengan pihak non pemerintah dilakukan untuk menguatkan fokus program pengentasan kemiskinan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya persentase tingkat kemiskinan selama periode Maret 2019 - September 2019 antara lain adalah:

1. Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan September 2019 meningkat sebesar 0,93 poin menjadi 95,11 dari 94,18 pada Maret 2019.
2. Laju inflasi Maret 2019 - September 2019 turun sebesar 3,2% menjadi 1,2% dari 4,4% pada September 2018 - Maret 2019.
3. TPT Agustus 2019 mengalami penurunan sebesar 0,39% menjadi 3,15% dari 3,54% pada Februari 2019.
4. Beberapa komoditas penyumbang terbesar garis kemiskinan mengalami penurunan harga, seperti: telur ayam ras, tahu mentah, mie instan, dan bawang merah.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus

harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode Maret 2019-September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2019 adalah 2,33 dan pada September 2019 naik menjadi 3,19. Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan mengalami kenaikan dari 0,63 menjadi 1,15 pada periode yang sama (Tabel 5). Begitu juga apabila dilihat pada periode sebelumnya yaitu September 2018-September 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) mengalami kenaikan.

Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sulawesi Tengah menurut daerah posisi September 2018-September 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sulawesi Tengah menurut daerah posisi September 2018-September 2019

Tahun (1)	Perkotaan (2)	Perdesaan (3)	Total (4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
September 2018	1,30	2,68	2,28
Maret 2019	1,43	2,71	2,33
September 2019	1,98	3,71	3,19
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2)			
September 2018	0,42	0,78	0,68
Maret 2019	0,32	0,76	0,63
September 2019	0,54	1,41	1,15

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2019, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk daerah perkotaan sebesar sementara di daerah perdesaan

jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 3,71. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan adalah 0,54 sedangkan di daerah pedesaan mencapai 1,41

Selanjutnya tabel dibawah ini menunjukkan garis kemiskinan Sulawesi Tengah dalam perspektif regional Sulawesi, pada kondisi Bulan Maret 2019-September 2019.

Tabel 3.15
Garis Kemiskinan Menurut Provinsi dan Daerah Maret -
September 2019

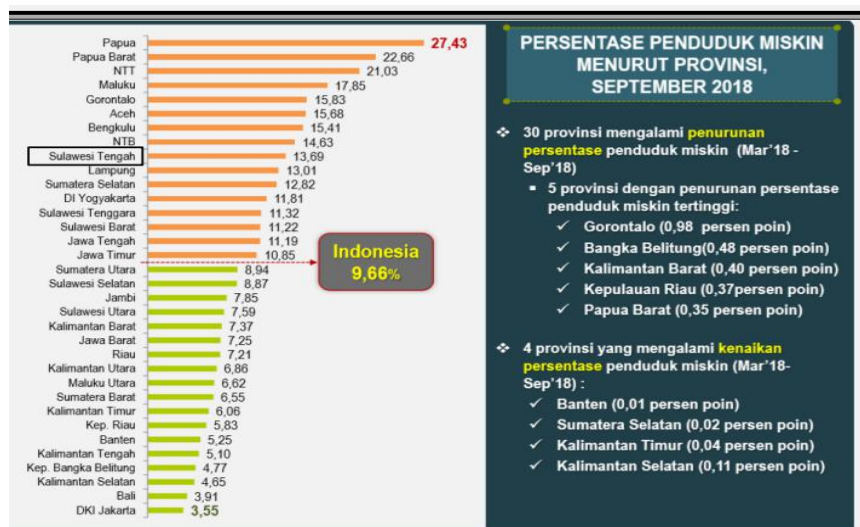
Provinsi	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Mar'19	Sep'19	Mar'19	Sep'19	Mar'19	Sep'19
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sulawesi Utara	369,608	377.597	372,194	381.883	371,283	379.923
Sulawesi Tengah	457,193	481.436	433,870	460.187	441,036	466.527
Sulawesi Selatan	338,997	354.770	322,223	331.063	329,880	341.555
Sulawesi Tenggara	336,877	356.235	321,197	340.065	327,402	346.466
Gorontalo	339,000	353.074	328,597	351.940	333,070	353.109
Sulawesi Barat	328,806	340.649	328,014	339.838	328,144	339.942
Indonesia	442,063	458.380	404,398	418.515	425,250	440.538

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah berada pada urutan kedua perbandingan garis kemiskinan dalam perspektif regional Sulawesi pada periode Bulan Maret-September 2019. Pada periode Maret 2019 garis kemiskinan di Sulawesi Tengah (Rp/kapita/bulan) untuk perkotaan sebesar 457,193 dan bulan September sebesar 481,436. Sedangkan garis kemiskinan di Sulawesi Tengah (Rp/kapita/bulan) untuk pedesaan periode Maret 2019 tercatat sebesar 433,870 dan periode September sebesar 460,187.

Dalam perspektif nasional tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah Periode September 2018 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.12



Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2019

Gambar diatas menunjukkan bahwa Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah masih berada diatas presentase kemiskinan nasional sebesar 9,66%, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran presentase menurunnya khususnya di Sulawesi Tengah. Pemerintah bersama instansi terkait akan mengambildalam perspektif nasional masih belum baik.

Penurunan angka kemiskinan kedepan merupakan peran dan komitmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta para stakeholder dalam upaya mengeroyok kemiskinan khususnya di Sulawesi Tengah. Pemerintah bersama instansi terkait akan mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan pengendalian harga. Tiga pilar penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah yang harus dibangun terus-menerus yaitu :

1. Memperluas kesempatan kerja (*Pomoting Opportunities for the Poor*);
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*Facilitating Empowerment*);
3. Memperkuat ketahanan sosial (*Enhancing Social Security*).

Diharapkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat menekan angka kemiskinan.

Peran pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dilakukan melalui program :

- Program penanganan fakir miskin.
- Program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
- Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
- Program perlindungan sosial korban bencana alam.
- Program Perlindungan sosial korban bencana sosial.
- Program Jaminan sosial keluarga (Bantuan Tunai Bersyarat/PKH)

5. Sasaran Kelima Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi dengan indikator kinerja sasaran indeks gini, data capaian kinerjanya terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.16

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Indeks gini Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Target RPJMD TH 2021
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	

1	Indeks gini	Indeks	0,345	127,5%	0,317%	111,30%	0,330%	95,9%	0,334-0,324
---	-------------	--------	-------	--------	--------	---------	--------	-------	-------------

Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi realisasi indeks gini di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2017 indeks gini tercatat sebesar 0,345 dengan capaian kinerja sebesar 127,5%. Tahun 2018 turun menjadi 0,317 dengan capaian kinerja sebesar 111,30% dan pada tahun 2019 kembali terjadi kenaikan hingga mencapai 0,330 dengan capaian kinerja 95,9%. Sedangkan untuk capaian terhadap target akhir RPJMD, pencapaian tahun 2019 ini telah melebihi target yang ditetapkan karena telah mencapai 101, 9%.

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Pada September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tengah yang diukur oleh gini ratio adalah sebesar 0,330.

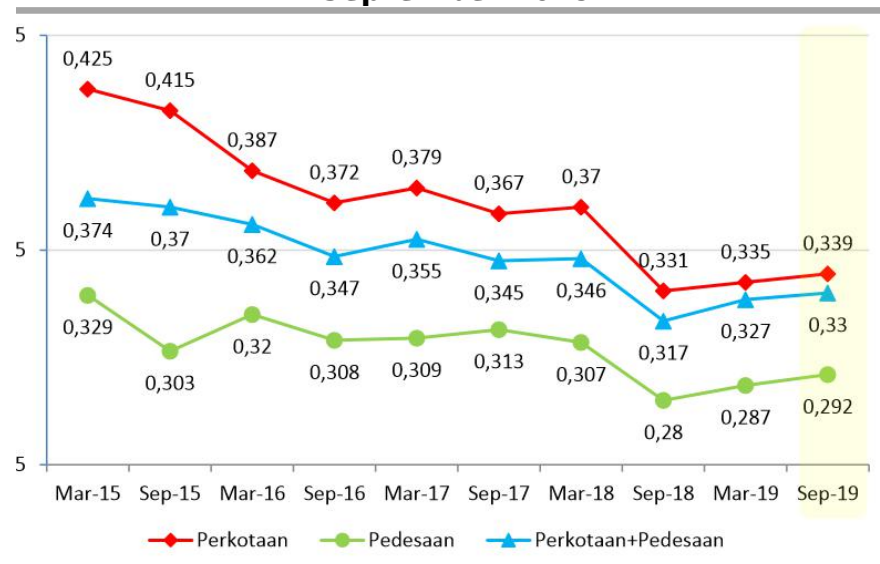
Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,013 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,317, sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,327, angka tersebut relatif stagnan, hanya naik sebesar 0,003 poin. • Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 0,339, naik dibanding Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,331, dan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,335. Di daerah perdesaan Gini Ratio pada September 2019 sebesar 0,292, naik dibanding Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,28 maupun dibanding Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,287. • Pada September 2019, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah

sebesar 20,48 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, tingkat ketimpangan baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan berada pada kategori rendah. Di perkotaan angkanya tercatat sebesar 18,10 persen, sementara untuk daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 22,66 persen.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, gini ratio di daerah perkotaan sebesar 0,331, sedangkan gini ratio di daerah perdesaan sebesar 0,280.

Gambar dibawah ini menunjukkan perkembangan gini ratio Sulawesi Tengah, kondisi Maret 2015 – September 2019.

Gambar 3.13
Perkembangan Gini Ratio Sulawesi Tengah Maret
September 2019



Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2020

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat

ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Pada September 2019, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 20,48 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2019 ini turun jika dibandingkan dengan kondisi September 2018 yang sebesar 20,95 persen tetapi naik jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yang sebesar 20,28 persen

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pengeluaran selama tahun 2019 diantaranya adalah :

- a. Berdasarkan data Susenas, tercatat bahwa kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 20 persen teratas meningkat lebih cepat dibanding penduduk kelompok 40 persen terbawah.
- b. Kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita periode Maret 2019 – September 2019 untuk kelompok penduduk 20 persen teratas adalah 1,98 persen dan 40 persen terbawah berturut-turut adalah 1,48 persen.
- c. Kenaikan pengeluaran yang merefleksikan peningkatan pendapatan kelompok penduduk terbawah tidak terlepas dari upaya pembangunan infrastruktur padat karya, serta berbagai bentuk program bantuan sosial (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan).

Gambar dibawah ini menunjukkan Gini Ratio menurut Provinsi Se-Sulawesi September 2018, Maret 2019, dan September 2019.

Gambar 3.14
Gini Ratio menurut Provinsi Se-Sulawesi September 2018,
Maret 2019, dan September 2019

Kode	PROVINSI	September 2018			Maret 2019			September 2019		
		Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
71	Sulawesi Utara	0,364	0,368	0,372	0,369	0,346	0,367	0,375	0,346	0,376
72	Sulawesi Tengah	0,331	0,280	0,317	0,335	0,287	0,327	0,339	0,292	0,330
73	Sulawesi Selatan	0,391	0,353	0,388	0,394	0,345	0,389	0,393	0,354	0,391
74	Sulawesi Tenggara	0,410	0,356	0,392	0,406	0,361	0,399	0,402	0,353	0,393
75	Gorontalo	0,397	0,413	0,417	0,392	0,388	0,407	0,399	0,393	0,410
76	Sulawesi Barat	0,451	0,311	0,366	0,445	0,317	0,365	0,438	0,320	0,365
	INDONESIA	0,391	0,319	0,384	0,392	0,317	0,382	0,391	0,315	0,380

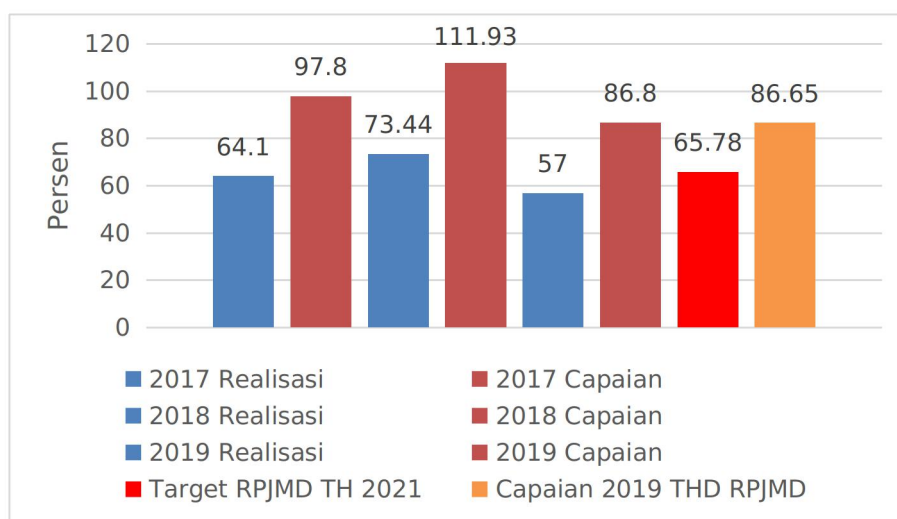
Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama periode September 2018 September 2019, nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah termasuk yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi. Bahkan pada September 2018, nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah sebesar 0,317 merupakan yang ke-5 terendah se-Indonesia, namun pada September 2019, dengan nilai Gini Ratio sebesar 0,330 menjadikan Sulawesi Tengah pada urutan ke-11 terendah se-Indonesia. Untuk wilayah perkotaan, nilai Gini Ratio perkotaan di Sulawesi Tengah selama periode tersebut selalu yang terendah (Tabel 2). Dibanding dengan Gini Ratio nasional pada September 2019 sebesar 0,380, hanya Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara yang memiliki nilai Gini Ratio lebih rendah. Kondisi ini masih sama jika dibandingkan dengan September 2018 maupun Maret 2019.

6. Sasaran Keenam Terwujudnya koperasi yang tangguh, berdaya saing, profesional dan mandiri.

Sasaran terwujudnya koperasi yang tangguh, berdaya saing, profesional dan mandiri dengan indikator kinerja koperasi aktif, data capaian kinerjanya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.15
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase koperasi aktif Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD



Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase koperasi aktif di Sulawesi Tengah selama tiga tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Tahun 2017 koperasi aktif tercatat sebesar 64,1% dengan persentase capaian kinerja 97,8%. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018, dimana koperasi aktif tahun 2018 terealisasi sebesar 73,44% dengan capaian kerja mencapai 111,64%. Dan pada tahun 2019 koperasi aktif mengalami penurunan sebesar 16,44% karena hanya terealisasi sebesar 57% dengan capaian kinerja 86,80%. Sedangkan terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 telah terealisasi sebesar 86,65%.

Indikator meningkatnya koperasi aktif dapat diukur dengan bertambahnya kelembagaan koperasi yang

berkualitas. Koperasi merupakan soko guru perekonomian di Indonesia. Peranan koperasi dalam pembangunan perekonomian ialah menghimpun skala-skala usaha kecil dan menjadikannya lebih besar dengan segala aspeknya. Koperasi juga digunakan sebagai alat untuk memberantas para rentenir yang banyak terdapat di daerah. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya masyarakat dipedesaan belum memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk mengembangkan usahanya sendiri karena mereka memerlukan bantuan dan bimbingan dari pemerintah melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dan koperasi lainnya yang dapat memberikan pelayanan kepada setiap anggotanya terutama dalam menyediakan pangan dan kebutuhan lainnya. Pada tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah tercatat 2.087 unit koperasi, dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 1189 unit atau 57% dan koperasi tidak aktif sebanyak 898 unit atau 43%. Berikut data jumlah koperasi aktif dan tidak aktif di Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir :

Tabel 3.17
Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif
Tahun 2015- 2019 (dalam unit)

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Koperasi Aktif	1.494	1.526	1.469	1.576	1189
2	Koperasi Tidak aktif	759	712	604	570	898
	Jumlah	2.253	2.238	2.073	2.146	2.087

Sumber data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah koperasi aktif di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 387 unit koperasi atau 24,55% dari jumlah koperasi aktif tahun 2018, sedangkan koperasi tidak aktif tahun 2019

mengalami kenaikan sebanyak 328 unit koperasi atau 36,52% dari tahun 2018.

Secara komulatif berkurangnya jumlah koperasi tahun 2019 menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah. Sangat dibutuhkan peran aktif Pemerintah Daerah baik dari segi pembinaan maupun dari segi pemberdayaan. Dan yang terpenting lagi keseriusan pengurus koperasi dalam melaksanakan kewajibannya khususnya pelaksanaan RAT sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan. Beberapa hal telah dilakukan dalam upaya pemecahan masalah di sektor koperasi adalah :

- 1) Peningkatan kualitas SDM perlu terus dilakukan diantaranya melalui kegiatan pelatihan, Bimtek, Sosialisasi, magang dan bantuan tenaga ahli.
- 2) Peningkatan kemampuan permodalan melalui bantuan sarana usaha, bantuan sertifikasi tanah sebagai agunan tambahan untuk akses modal dengan perbankan dan fasilitasi dengan lembaga keuangan perbankan.
- 3) Terus mengupayakan bantuan fasilitasi pemasaran dan permodalan, baik melalui promosi, jaringan kemitraan dan temu usaha bisnis.
- 4) Melakukan penyuluhan perkoperasian untuk meningkatkan kesadaran anggota tentang pentingnya berkoperasi, melakukan klasifikasi koperasi untuk memberikan penilaian koperasi yang berkualitas.

Capaian kinerja untuk sasaran terwujudnya koperasi yang tangguh, berdaya saing, profesional dan mandiri didukung oleh program :

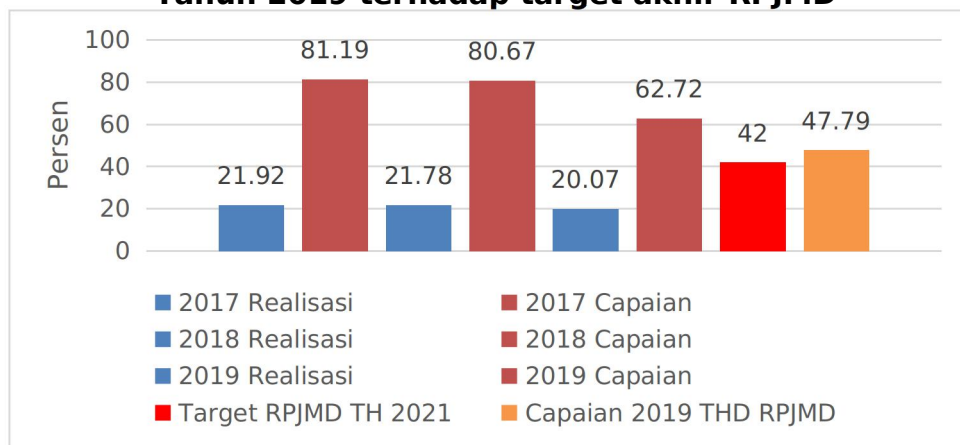
- Program Pemberdayaan Koperasi;
- Program Pengembangan Balai Latihan Koperasi;

7. Sasaran Ketujuh Meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktifitas perdagangan.

Sasaran meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktivitas perdagangan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan ekspor bersih perdagangan capaian rata-ratanya sebesar 167,45%. Data capaian kinerjanya dapat dilihat pada gambar berikut:

1) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Gambar 3.16
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD



Gambar diatas menunjukkan bahwa realisasi kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB selama tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan. Tahun 2017 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB terealisasi sebesar

21,92% dengan persentase capaian 81,19%. Pada tahun 2018 terjadi penurunan 0,64% dimana kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB terealisasi sebesar 21,78% dengan capaian kinerja sebesar 80,67%. Dan pada tahun 2019 kembali turun 1,71% dimana kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tercatat sebesar 20,07% dengan capaian kinerja hanya sebesar 62,72%. Terhadap target akhir RPJMD, pencapaian tahun 2019 ini baru mencapai 47,79%.

Realisasi nilai PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2019 berdasarkan Nilai Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan IV Tahun 2019, menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku. Ekonomi Sulawesi Tengah Triwulan I-IV-2019 terhadap Triwulan I-IV-2018 (c-to-c) tumbuh 7.15%. Pertumbuhan terjadi hampir pada semua lapangan usaha, kecuali pada tiga lapangan usaha, yaitu Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Adapun pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 16,27 %. Pertumbuhan yang cukup tinggi juga terjadi pada lapangan usaha Konstruksi dan Informasi dan Komunikasi, masing-masing tumbuh sebesar 14,34 % dan 9,81 %.

Belum tercapainya realisasi pada Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB, dikarenakan pada sisi pengeluaran konsumsi RT masih tumbuh rendah yang diakibatkan distribusi BAPOKTING yang belum berjalan lancar dan beberapa hal seperti waktu bongkar muat yang lama akibat belum berfungsinya crane pada pelabuhan secara maksimal, serta juga dipengaruhi oleh factor cuaca

dan ketersediaan beberapa barang pokok yang ketersediaannya dipengaruhi oleh jumlah impor.

Pencapaian target kinerja presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dipengaruhi oleh banyak faktor pada sector-sektor perdagangan yang berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung pada pendapatan domestik regional bruto di tiap provinsi termasuk provinsi Sulawesi Tengah. Kontribusi sektor perdagangan tidak hanya disumbang oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda saja, namun sektor lain juga termasuk dalam perhitungan analisis kontribusi yang mempengaruhi PDRB seperti sektor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya.

2) Ekspor bersih perdagangan

Data kinerja Ekspor bersih perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.18
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja ekspor bersih perdagangan Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Targ RPJM TH 202
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Ekspor bersih perdagangan	US\$	1.734,23	192,69%	2.288.10	254,23%	2.758,55	275,86%	4.320

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi ekspor bersih perdagangan selama tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Ekspor bersih perdagangan tahun 2017 terealisasi sebesar US\$ 1.734.23 dengan capaian kinerja 192,69%. Selanjutnya tahun 2018 terealisasi sebesar US\$ 2.288.10 dengan capaian kinerja mencapai 254,23% atau naik sebesar 31,94%. Dan pada tahun 2019 ekspor bersih perdagangan terealisasi sebesar US\$ 2.758.55 atau naik sebesar 20,56% dibanding tahun 2018. Namun terhadap target akhir RPJMD, pencapaian tahun 2019 ini baru memberikan kontribusi sebesar 63,86%.

Selama Januari - Desember 2019, total nilai ekspor Sulawesi Tengah tercatat US\$ 5,893.47 juta atau meningkat US\$ 784.96 juta (15.37 %) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar US\$ 5,108.51 juta. Jika dirinci, ekspor melalui Sulawesi Tengah senilai US\$ 5,811.78 juta dan provinsi lain senilai US\$ 81.69 juta. Sementara jumlah nilai Impor Selama Januari-Desember 2019, terjadi kenaikan US\$ 314.23 juta atau sebesar 11.14 % menjadi US\$ 3,134.92 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dilihat dari neraca perdagangan dengan seluruh negara mitra dagang, Sulawesi Tengah mengalami surplus senilai US\$ 186.66 juta selama Desember 2019 dan surplus senilai US\$ 2,758.55 juta selama Januari-Desember 2019. Sementara tingkat kemajuan ekspor bersih perdagangan sampai dengan tahun 2019 terhadap target RPJMD di akhir periode tahun 2021 sebesar 156.96%.

Selama Januari-Desember 2019, kelompok besi dan baja mendominasi pangsa ekspor senilai US\$ 4,402.06 juta atau 74.69 % dari total ekspor dan bahan bakar mineral senilai US\$ 1,121.87 juta (19.04 %). Sementara itu, kontribusi

ekspor kelompok komoditas lainnya terhadap total ekspor masing-masing di bawah 4,00 %. Peningkatan aktifitas ekspor, khususnya untuk komoditas besi dan baja, dimana kawasan industri morowali (KIM) Morowali memiliki sumbangsih paling besar dalam peningkatan ekspor Sulawesi Tengah tahun 2019, juga didukung oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Perusahaan Mineral dapat melakukan Ekspor Nikel kualitas rendah yang sebelumnya dilarang. Perkembangan nilai dan volume ekspor selama tujuh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Ekspor berdasarkan Nilai Tahun 2013-2019
(US\$ Juta)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Non Migas	276	46	283	647	1,924	3,632.92	4,771.60
- Hasil Industri	229	24	122	638	1,905	3,615.98	4,664.44
- Non Industri	46	22	161	9	19	16.94	107.16
Migas	22	35	200	623	1,098	1,476.26	1,121.87
Total Ekspor	297	81	482	1270	3,022	5,109.18	5,893.47

Sumber data : Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2020

Tabel 3.20
Ekspor berdasarkan Volume Tahun 2013-2019

Produk Komoditi	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Non Migas	TON	12,900,416	1,211,202	533,130	690,140	1,346,370	3,149,840	4,771.60
Migas	TON	29,425	29,058	155,240	1,815,650	2,456,630	2,642,930	1,121.87
Total		12,929,840	1,240,260	688,370	2,505,790	3,803,000	5,792,770	5,893.47

Sumber data : Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2020

Adapun Laporan Ekspor tahun 2019 berdasarkan Dokumen SKA Sulawesi Tengah yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak US\$ 6,454.14 Juta, sedangkan laporan ekspor tahun 2019 BPS Sulteng berdasarkan Dokumen PEB selama Januari-Desember 2019, tercatat sebesar US\$ 5,893.47 juta, melalui Sulawesi Tengah sebesar US\$ 5,811.78 juta dan provinsi lain senilai US\$ 81.69 juta dan dapat dilihat perkembangannya pada tabel Kinerja Ekspor Daerah tahun 2019 berikut :

Tabel 3.21
Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2019 (US\$ Juta)

BULAN	BPS			SKA		
	NILAI EKSPOR (JUTA US\$)	IMPOR (JUTA US\$)	EKSPOR BERSIH (JUTA US\$)	NILAI EKSPOR (JUTA US\$)	FORM TERJUAL (SET)	NEGARA TUJUAN EKSPOR TERBANYAK
JANUARI	471.59	211.73	259.86	964.88	238	VIETNAM
FEBRUARI	437.46	365.62	71.84	245.30	158	PAKISTAN
MARET	492.94	218.61	274.33	370.10	260	VIETNAM
APRIL	405.60	289.79	115.81	224.82	227	VIETNAM
MEI	434.44	270.82	163.62	2,124.44	243	INDIA
JUNI	431.19	168.80	262.39	115.05	205	PAKISTAN
JULI	504.15	263.67	240.48	259.45	184	VIETNAM
AGUSTUS	530.19	216.61	313.58	289.60	173	VIETNAM
SEPTEMBER	549.79	242.91	306.88	218.03	210	VIETNAM
OKTOBER	650.50	293.50	357.00	938.84	150	VIETNAM
NOPEMBER	458.59	252.48	206.11	300.68	152	VIETNAM
DESEMBER	527.03	340.37	186.66	402.95	170	VIETNAM
TOTAL	5,893.47	3,134.92	2,758.55	6,454.14	2,370	

Sumber data : Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2020

Realisasi ekspor menurut negara tujuan berdasarkan Dokumen SKA Sulawesi Tengah tahun 2019, ekspor ke negara Vietnam mendominasi transaksi tahun 2019 dengan realisasi sebesar US\$ 3,969.35 Juta atau 61.50 persen dari

total transaksi tahun 2019. Rekapitulasi ekspor menurut negara tujuan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.22
Rekapitulasi Ekspor menurut Negara Tujuan Tahun 2019
(SKA)

No.	Negara Tujuan	Pelabuhan Muat	Realisasi Ekspor (US\$)	Volume (TON)
1	AFRIKA	Morowali	0.43	241.04
2	AMERIKA	Tg. Priuk	0.99	818.59
3	ARAB	Morowali/Tg. Perak	3.61	1,883.92
4	ARGENTINA	Morowali	0.12	62.06
5	AUSTRALIA	Tg. Priuk/Pantoloan	1.03	519.25
6	BELGIUM	Morowali/Tg. Perak/ Pantoloan	12.04	1,249.44
7	BRAZIL	Pantoloan/Morowali/Tg. Perak	2.114.536.295	6,380.478
8	BULGARIA	Tg. Perak	0.31	64.07
9	CANADA	Morowali	0.18	102.44
10	CINA	Morowali/Kolonodale/ Tg.Perak/Tg.Priuk/Pantoloan	3.091.07	2,526,651.09
11	COLOMBO	Pantoloan/Tg.Priuk/ Morowali	1.32	2,316.44
12	FRANCE	Pantoloan	0.02	19.92
13	INDIA	Morowali/Pantoloan	476.60	447,430.10
14	INGGRIS	Tg. Priuk	0.07	40.00
15	ITALY	Morowali/Tg.Perak/ Pantoloan/Kolonedali	1,033.06	215,927.48
16	JAPAN	Morowali/Pantoloan	0.42	250.47
17	JERMAN	Morowali	0.47	166.42
18	KOREA	Kolonodale/Pantoloan/ Morowali/Luwuk	72.37	127,572.58
19	MALAYSIA	Pantoloan/Morowali/ Tg.Perak	395,94	270,755.10
20	NETHERLANDS	Tg.Perak /Morowali	0.67	326.45
21	PAKISTAN	Pantoloan	42.82	69,064.01
22	PHILIPPINES	Pantoloan	21.18	36,285.51
23	POLAND	Tg.Perak / MOrowali / Tg. Priuk	3.93	2,086.42

24	ROMANIA	Morowali	0.06	36.66
25	RUSIA	Morowali	33.83	19,066.08
26	SINGAPORE	Morowali	9.67	10,376.75
27	SLOVENIA	Morowali	0.40	204.94
28	SPAIN	Tg.Perak/Morowali	2.05	1.101,62
29	TAIWAN	Morowali/Pantoloan	29.52	16,859.07
30	THAILAND	Tg.Perak / MOrowali / Tg. Priuk	91.83	62,888.51
31	TURKEY	Morowali/Tg.Priuk	68.52	13,001.90
32	UKRAINE	Morowali	0.26	138.86
33	VIETNAM	Morowali/Pantoloan/ Tg.Perak	1,056.90	204,705.80
34	YUNANI	Morowali	0.11	58.03
TOTAL			6,454.14	4,038,651.18

Sumber data : Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2020

Dibandingkan realisasi ekspor nasional tahun 2018 yang mencapai US\$ 180,059.2 Juta, realisasi ekspor di kawasan Sulampua menyumbang kontribusi sebesar 9,22% terhadap ekspor nasional. Dan realisasi ekspor Provinsi Sulteng tahun 2018 sebesar US\$ 5.109,18 juta merupakan capaian tertinggi di kawasan Sulampua dengan kontribusi 2,84% terhadap ekspor nasional, disusul oleh Provinsi Papua US\$ 3.941,8 juta dengan kontribusi 2,19% terhadap ekspor nasional, dan Provinsi Papua Barat US\$ 2.823,7 juta dengan kontribusi 1,57% terhadap ekspor nasional. Adapun realisasi ekspor 7 provinsi lainnya di kawasan Sulampua berkontribusi kurang dari 1 persen terhadap ekspor nasional. Perbandingan realisasi ekspor di kawasan Sulampua dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Ekspor berdasarkan nilai di kawasan Sulampua Tahun 2018

No.	Provinsi	2018 (Juta US\$)	Kontribusi (%)
Ekspor Nasional		180.059,2	
1	Sulsel	1.454,6	0,81
2	Sulut	974,0	0,54

3	Sulteng	5.109	2,84
4	Sultra	1.081,3	0,60
5	Sulbar	430,1	0,24
6	Gorontalo	35,2	0,02
7	Maluku	77,8	0,04
8	Malut	680,3	0,38
9	Papua	3.941,8	2,19
10	Papua barat	2.823,7	1,57
Jumlah		16.608	9,22

Sumber data : Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2020

Capaian diatas diraih melalui beberapa program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu :

- Program pengembangan dan pengamanan perdagangan dalam negeri.
- Program pengembangan dan pengamanan perdagangan luar negeri.

8. Sasaran Kedelapan Terwujudnya Industri Yang tangguh, Profesional dan Mandiri.

Terwujudnya industri yang tangguh, profesional dan mandiri yang diukur dengan persentase pertumbuhan industri realisasi dan capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja pertumbuhan industri Tahun 2017, 2018 dan capaian Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Ta RP - 20
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Pertumbuhan industri	%	7,20	100%	8,21%	110,95%	19,42%	255,53%	8

Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan industri di Sulawesi Tengah selama tiga tahun berturut-turut

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2017 pertumbuhan industri tercatat sebesar 7,20% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Tahun 2018 terealisasi sebesar 8,21% dengan capaian kinerja 110,95% atau naik 1,01% dari tahun 2017. Dan pada tahun 2019 pertumbuhan industri terealisasi sebesar 19,42% dengan capaian kinerja mencapai 242,75% atau naik 11,21% dari tahun 2018. Capaian pertumbuhan industri tahun 2019 ini telah melampaui target akhir RPJMD, karena telah terealisasi sebesar 242,75%.

Realisasi capaian kinerja sebesar 19.42% merupakan hasil pertumbuhan 8.444 unit usaha industri di Sulteng selama tahun 2019 dari sebelumnya di tahun 2018 sebesar 7.071 unit usaha industri.

Realisasi capaian kinerja sebesar 8,21% merupakan hasil pertumbuhan 7.071 unit usaha industri di Sulteng selama tahun 2018 dari sebelumnya di tahun 2017 sebesar 6.532 unit usaha industri. Capaian pertumbuhan industri tahun 2018 ini telah melampaui target akhir RPJMD, karena telah terealisasi sebesar 102,63%.

Berikut dapat dilihat perkembangan jumlah unit usaha industri di Sulawesi Tengah tahun 2018 dan tahun 2019.

Tabel 3.25

**Jumlah Unit Usaha Industri Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Kelompok Industri**

No.	Kelompok Industri	Tahun		Pertumbuhan (%)
		2018	2019	
1	Kecil	6,848	8,358	
2	Menengah	178	36	
3	Besar	45	50	
TOTAL		7,071	8,444	19,42

Sumber data : Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2020

Ada beberapa kabupaten yang pertumbuhan IKM nya meningkat karena adanya beberapa kawasan industri &

industri besar yang dibangun seperti Kabupaten Morowali (PT. IMIP), Morut, Touna, Banggai (PT. Donggi Senoro LNG) sehingga memicu pertumbuhan disekitarnya.

Industri kecil menengah yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan adalah industri : pangan, furnitur, alat angkut, sandang, barang dari kayu, logam, kimia, mesin, kerajinan, aneka kemasan / percetakan dan elektronika.

Berikut Rekapitulasi unit usaha industri Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 -2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.26

**Jumlah Unit Usaha Industri Provinsi Sulawesi Tengah
tahun 2016-2019**

No	Kabupaten/Kota	Unit Usaha				Pertumbuhan (%)		
		Tahun				Tahun		
		2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Palu	1,242	1,337	1,444	1,515	7.65	8.00	4.92
2	Donggala	502	532	572	633	5.98	7.52	10.66
3	Sigi	555	592	634	734	6.67	7.09	15.77
4	Parimo	256	284	315	393	10.94	10.92	24.76
5	Poso	467	500	535	574	7.07	7.00	7.29
6	Tojo Una-Una	528	573	621	803	8.52	8.38	29.31
7	Morowali	514	563	615	740	9.53	9.24	20.33
8	Banggai	182	192	212	206	5.49	10.42	-2.83
9	Banggai Kepulauan	471	509	549	823	8.07	7.86	49.91
10	Tolitoli	539	579	621	657	7.42	7.25	5.80
11	Buol	550	597	645	815	8.55	8.04	26.36
12	Morowali Utara	214	224	244	276	4.67	8.93	13.11
13	Banggai Laut	45	54	64	275	20.00	18.52	329.69
Total		6,065	6,536	7,071	8,444	7.77	8.19	19.42

Sumber data : Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019, terdapat peningkatan jumlah unit usaha industri menjadi sebanyak 8,444 jika dibandingkan dengan jumlah unit industri tahun 2018 yang berjumlah sebanyak 7,071. Peningkatan significant ini terjadi seperti contoh pada Kabupaten Banggai Laut, disebabkan karena adanya

industri-industri baru yang baru terbentuk serta instansi terkait telah melakukan pendataan yang menyeluruh di wilayah tersebut. Capaian pertumbuhan industri diraih melalui beberapa program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu :

- Program penataan struktur industri.
- Program peningkatan kemampuan teknologi industri.

9. Sasaran Kesembilan Meningkatnya Nilai dan Realisasi Investasi.

Meningkatnya nilai dan realisasi investasi yang diukur dengan indikator realisasi investasi PMDN dan PMA, capaian kinerjanya tahun 2019 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.27
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja nilai realisasi investasi PMDN dan PMA Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Target RPJMD TH 2022
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Nilai realisasi investasi								
	- PMDN	Rp	1.929.657.000.000	175,42%	12.689.562.560.000	1046%	4.438.790.800.000	333%	6.250.000.000.000
	- PMA	Rp.	16.335.000.000.000	110%	9.010.437.440.000	55,16%	27.075.580.350.000	151%	16.940.000.000.000

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja nilai investasi PMDN selama 3 tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 nilai investasi PMDN tercatat sebesar Rp. 1.929.657.000.000 dengan capaian kinerja 175,42%. Kemudian tahun 2018 nilai investasi PMDN tercatat sebesar Rp. 12.689.562.560.000 dengan capaian kinerja mencapai 1.046% atau terjadi kenaikan 557,60% dibandingkan realisasi tahun 2017. Selanjutnya nilai

investasi PMDN tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 4.438.790.800.000 dengan capaian kinerja 333%, turun 185,87% dibandingkan realisasi tahun 2018. Capaian realisasi nilai investasi PMDN tahun 2019 ini telah memberikan kontribusi sebesar 71,02% dari target akhir RPJMD tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 6.250.000.000.000,-

Sementara untuk nilai investasi PMA selama 3 tahun berturut-turut juga mengalami fluktuasi, dimana tahun 2017 nilai investasi PMA tercatat sebesar Rp. 16.335.000.000.000 dengan capaian kinerja 110%. Tahun 2018 nilai investasi PMA terealisasi sebesar Rp. 9.010.437.440.000 dengan persentase capaian hanya sebesar 55,16% atau turun 81,30% dibandingkan realisasi tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2019 nilai investasi PMA tercatat naik hingga 200,49% dibandingkan tahun 2018, dimana nilai investasi PMA terealisasi sebesar Rp. 27.075.580.350.000 dengan capaian kinerja mencapai 151%. Realisasi kinerja tahun 2019 ini telah mencapai 159,83% yang artinya telah melebihi target akhir RPJMD tahun 2021 yang ditargetkan mencapai Rp. 16.940.000.000.000,-

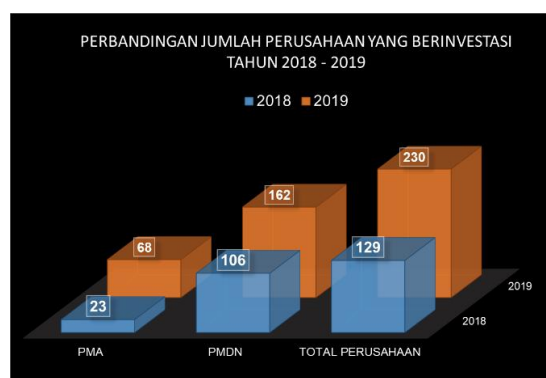
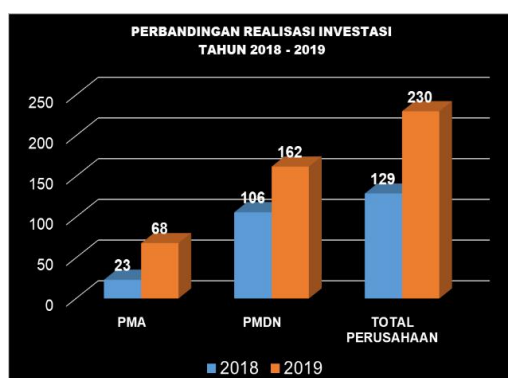
Pemicu pencapaian nilai investasi PMA tahun 2019 yang melebihi target tersebut adalah banyaknya Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Sulawesi Tengah. Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi sampai pada tahun 2019 telah melampaui target 5 tahunan, dengan capaian 670% untuk perusahaan PMA dan 1.715% untuk perusahaan PMDN. Sedangkan jika dilihat dari dokumen izin yang dikeluarkan sampai tahun 2019 telah melebihi target 5 tahunan dengan capaian 153% atau 3.432 dokumen izin dari 2.250 izin yang ditetapkan dalam RPJMD. Waktu proses pembuatan izin di tahun 2019 juga telah mencapai target tahunannya yaitu 100 % dan harapannya dalam kurun 5 tahun akan mencapai target yang telah ditetapkan yakni 10 hari kerja untuk izin usaha dan 3 hari kerja untuk izin non Usaha. Kualitas pelayanan yang diukur dengan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) juga telah memenuhi target dengan kategori sangat baik.

Data perbandingan realisasi investasi, jumlah perusahaan yang berinvestasi, jumlah dokumen perizinan yang dikeluarkan dan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018 dan 2019 tergambar pada grafik berikut ini :

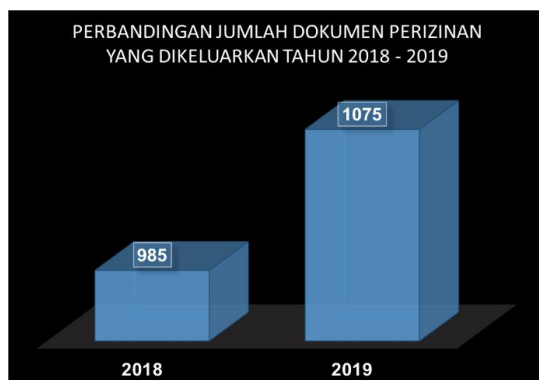
Gambar 3.17

Perbandingan Realisasi Investasi **Perbandingan**
Perusahaan Yang Masuk

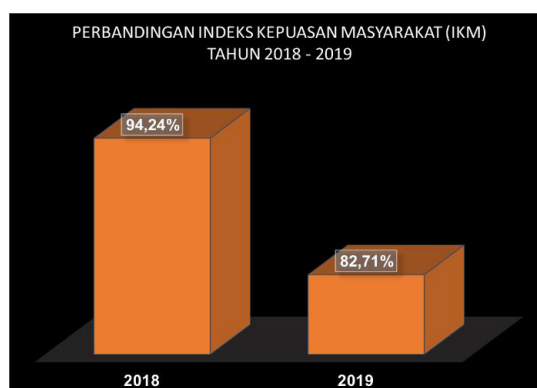


Sumber data : DPMPTSP Prov. Sulteng, 2020

Perbandingan Izin
Perbandingan Nilai IKM (%)



yang diterbitkan



Sumber data : DPMPTSP Prov. Sulteng, 2020

Dalam rangka terus meningkatkan realisasi investasi di Sulawesi Tengah, Pemerintah terus mengambil langkah strategis yaitu :

- Penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian masalah dan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan penanaman modal dan meningkatnya kualitas SDM aparatur akan tata kelola penanaman modal di wilayah Sulawesi Tengah.
- Melakukan kegiatan koordinasi dan fasilitasi kemitraan dunia usaha yang bertujuan untuk memfasilitasi pemberdayaan dan kemitraan usaha daerah. Kegiatan koordinasi dan fasilitasi dunia usaha ini menitik beratkan pada membantu mitra usaha untuk dapat memasarkan hasil usahanya sekaligus menjadi potensi utama komoditi Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dilakukan dengan membentuk satu aplikasi yang bertajuk e-kaledos yang merupakan aplikasi yang memuat beberapa potensi hasil dari usaha.
- Kegiatan peningkatan kualitas strategi dan pengembangan promosi penanaman modal yang berkaitan dengan pengkajian strategi promosi yang hendak dikembangkan. Tujuan kegiatan ini adalah bagaimana menganalisa keunggulan dan potensi yang akan dijadikan sebagai pencitraan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Pengolahan dan penyusunan data penanaman modal modal perizinan dan non perizinan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi penanaman modal yang bersumber dari perizinan dan non perizinan.
- Penyediaan sarana dan prasarana penanaman modal yang merupakan kegiatan dalam rangka menyediakan bahan informasi potensi penanaman modal berupa brosur, majalah, video dan multimedia lainnya dalam mendukung kualitas penyelenggaraan promosi penanaman modal. Tujuan kegiatan ini adalah

menyediakan bahan promosi penanaman. Target kegiatan ini meningkatkan kualitas penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal. Realisasi target kinerja kegiatan penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal berupa informasi potensi penanaman modal berupa brosur, majalah, video dan multimedia.

- Penyelenggaraan Pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal merupakan kegiatan guna mengetahui seberapa banyak perusahaan yang mendapat fasilitas penanaman modal. Tujuannya yaitu untuk mengetahui jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan fasilitas penanaman modal yang telah diberikan.
- Pemantauan perkembangan realisasi penanaman modal merupakan kegiatan guna mengetahui kendala dan masalah yang dihadapi oleh penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dalam menjalankan usahanya, selain itu dalam kegiatan ini juga dilakukan sosialisasi tata cara pengisian LKPM dalam rangka melaporkan realisasi investasi. Dari dua sub kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Penyusunan peta potensi investasi daerah yang bertujuan untuk menyediakan informasi potensi yang akurat dan *up-date* yang melalui aplikasi Geografi informasi sistem (GIS). Melalui kegiatan ini seluruh informasi baik dari sektor pertambangan, pertanian, kehutanan dan sektor lainnya dapat dipaparkan dari peta potensi yang dikeluarkan oleh aplikasi GIS. Selain itu aplikasi ini juga dapat menghasilkan data peta pendukung lainnya seperti dataran tinggi maupun peta sebaran penduduk Provinsi Sulawesi Tengah.
- Fasilitasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang merupakan kegiatan memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan. Tujuan dan sasaran kegiatan ini adalah

meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan untuk meningkatkan jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani.

Selanjutnya terkait rendahnya realisasi investasi PMA tahun 2018 memang telah diprediksikan mengingat beberapa permasalahan yaitu :

- a. Adanya implementasi atas regulasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui *online Single Submission (OSS)* yang masih dalam tahap pengembangan sehingga belum maksimal tersosialisasi kepada pelaku usaha yang berakibat terhambatnya pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) karena dalam peraturan BPKM RE No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dimana dalam pengisian LKPM *online* perusahaan harus memiliki NIB terlebih dahulu.
- b. Terkendalanya proses pemenuhan komitmen dikarenakan belum terintegrasinya beberapa aplikasi yang ada dikementerian terkait, lembaga dan daerah seperti SIMKADA, IMTA Online, Sicantik Cloud dan beberapa aplikasi lainnya yang menyulitkan pemilik NIB untuk memenuhi komitmen dalam melengkapi izinnya.
- c. Belum terbitnya Norma, Standar, Prosedur dan Ketentuan (NSPK) dari kementerian dan lembaga sehingga pelaku usaha sulit melakukan pemenuhan komitmen baik izin usaha maupun izin operasional.
- d. Masih kurangnya infrastruktur termasuk jaringan internet sehingga di beberapa daerah terhambat dalam proses penerapan secara *online*.
- e. Masih adanya peraturan (regulasi) yang tumpang tindih dan diperlukan harmonisasi kebijakan secara sektoral maupun daerah yang mendukung realisasi investasi.

- f. Banyak perusahaan masih dalam proses pengurusan perolehan fasilitas sehingga belum terealisasi investasi khususnya belanja modal.

Kondisi dan capaian diatas merupakan hasil dari serangkaian program untuk meningkatkan nilai dan realisasi investasi, yaitu melalui program :

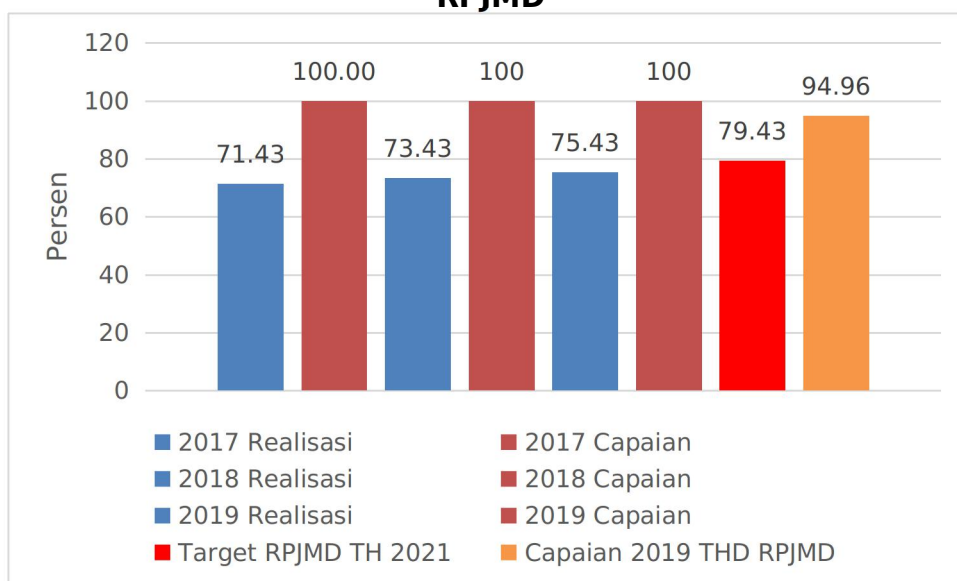
- Program peningkatan kualitas perencanaan.
- Program peningkatan daya saing penanaman modal.
- Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan.

10. Sasaran Kesepuluh Meningkatnya Kesejahteraan Gender Dalam Pembangunan Ekonomi.

Meningkatnya kesejahteraan gender dalam pembangunan ekonomi, yang diukur dengan indikator kinerja Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) realisasi dan capaian kinerjanya digambarkan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gambar 3.18
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Peningkatan Indeks Pembangunan Gender Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD

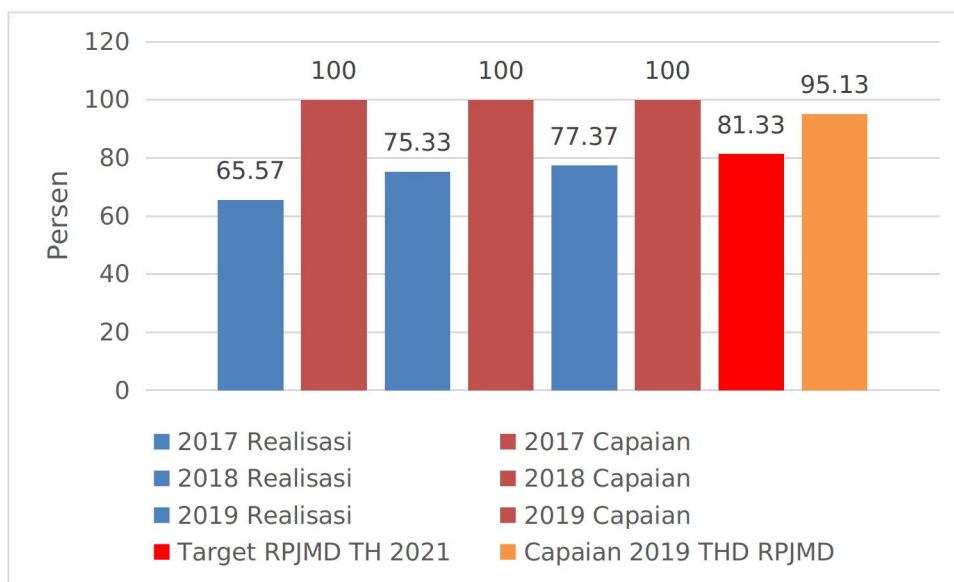


Gambar diatas menunjukkan bahwa Peningkatan Indeks Pembangunan Gender di Sulawesi Tengah setiap tahunnya

terus meningkat selama tiga berturut-turut. Pada tahun 2017 Peningkatan Indeks Pembangunan Gender terealisasi sebesar 71,43% dengan persentase capaian 100%. Terjadi kenaikan 2,80% pada tahun 2018, dimana Indeks Pembangunan Gender terealisasi sebesar 73,43% dengan persentase capaian 100%. Selanjutnya tahun 2019 terealisasi sebesar 75,43% dengan persentase capaian 100% atau naik 2,72% dibandingkan tahun 2018. Sementara untuk target akhir RPJMD tahun 2021 Peningkatan Indeks Pembangunan Gender telah mencapai 94,96%.

2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gambar 3.19
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja
Peningkatan
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2017, 2018, 2019
dan
capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD



Data peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dimana realisasi kinerjanya juga terus mengalami peningkatan selama tiga tahun berturut-turut. Tahun 2017 Indeks Pemberdayaan

Gender tercatat sebesar 65,57% dengan persentase capaian kinerja 100%. Tahun 2018 Indeks Pemberdayaan Gender terealisasi sebesar 75,33% dengan persentase capaian 100% atau naik 9,76% dibandingkan tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019 Indeks Pemberdayaan Gender terealisasi 77,37% dengan persentase capaian 100% atau naik 2,04% dari tahun 2018.. Sementara untuk target akhir RPJMD tahun 2021, peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2019 ini telah mencapai 95,13%.

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Sasaran Meningkatnya kesejahteraan gender dalam bidang pembangunan melalui indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender terdapat dalam Misi ke tiga pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021. Pada tahun 2019 capaian rata-rata indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender sebesar 100%. Pencapaian ini sangat terkait dengan keberhasilan pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan penguatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Partisipasi perempuan dilembaga swasta terhadap seluruh pekerja perempuan tahun 2019 sebesar 83,09%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar 51,70%. Partisipasi perempuan dilembaga swasta masih terlihat lebih dominan dibandingkan dengan

partisipasinya perempuan di pemerintahan. Dimana pada tahun 2019 partisipasi perempuan di pemerintahan sebesar 39,70% .

Sedangkan partisipasi Perempuan di lembaga legislatif pada tahun 2019 sebesar 22,30% terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar 19,30%.

Berbagai hal telah dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan gender yang antara lain melalui kegiatan-kegiatan seperti Pengembangan forum peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (PPEP) dan pembinaan Industri Rumahan Perempuan, Fasilitas Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan sosialisasi percepatan pemberantasan buta aksara perempuan, Bimbingan teknis manajemen usaha dan keterampilan bagi perempuan dalam mengelola usaha dan Pencegahan dampak negative lingkungan yang responsif gender.

Capaian atas meningkatnya kesejahteraan gender dalam pembangunan ekonomi merupakan hasil dari program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu :

- Program Peningkatan kualitas hidup perempuan.
- Program Pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

11. Sasaran Kesebelas Meningkatnya Jumlah Wisatawan.

Perkembangan pariwisata di Sulawesi Tengah menunjukkan capaian yang menggembirakan. Tingkat kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.28
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Jumlah kunjungan wisman dan wisnus Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2019 THD RPJMD
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1	Jumlah kunjungan	Orang	63.207	341%	25.741	135%	24.660	126%	21.500.	114.70 %

2.	wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	3.200.614	100,02 %	3.432.178	99%	3.090.171	86%	4.000.000	77,25%
----	--	-------	-----------	----------	-----------	-----	-----------	-----	-----------	--------

Data diatas menunjukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Tengah setiap tahun mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut. Tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Tengah tercatat sebanyak 63.207 orang dengan persentase capaian 341%, kemudian tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 25.741 orang dengan capaian kinerja 135% atau turun 37,46% dari tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Tengah tercatat sebesar 24.660 orang dengan capaian kinerja 126% atau turun 1,08% dari tahun 2018. Namun terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan mancanegaratahun 2019 ini telah memberikan kontribusi sebesar 114,70%.

Selanjutnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Sulawesi Tengah selama 3 tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan nusantara tercatat sebanyak 3.200.614 orang dan persentase capaian kinerja 100,02%. Kemudian tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan nusantara meningkat menjadi 3.432.178 dengan capaian kinerja 99%, terjadi peningkatan 7,89% dari tahun 2017. Dan pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan nusantara tercatat sebesar 3.090.171 orang dengan capaian kinerja 86%. Terhadap target RPJMD

2021, Jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun 2019 baru mencapai 77,25%.

Gambar 3.20



* Sail Tomini

Lama tinggal wisatawan mancanegara di Sulawesi Tengah rata-rata 3-5 hari/orang dengan pengeluaran harian mencapai 1.271,5 USD/hari. Sedangkan lama tinggal wisatawan

nusantara rata-rata 4-7 hari/orang dengan pengeluaran harian rata-rata mencapai Rp. 1.630.552 /hari.

Banyaknya jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Tengah didukung oleh beragamnya potensi obyek pariwisata di Provinsi Sulawesi Tengah, baik potensi alam, budaya serta berbagai potensi wisata lainnya. Kondisi ini tentunya memberikan nilai tambah dan daya saing yang semakin kuat baik secara nasional maupun internasional. Dalam pengembangan destinasi telah dilakukan kegiatan pembangunan sarana prasarana destinasi wisata dan peningkatan standarisasi pelaku usaha pariwisata. Selain itu juga dilakukan kegiatan penyelenggaraan event untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata di Sulawesi Tengah. Strategi penyelenggaraan event dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat atau komunitas.

Infrastruktur jalan yang bagus, sikap ramah tamah dan lingkungan yang nyaman diharapkan mampu meningkatkan

kunjungan wisatawan di Sulawesi Tengah. Pencapaian sasaran Meningkatnya Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara dapat

Gambar 3.21



* Festival Danau Poso

tercapai juga disebabkan oleh dukungan Programmeningkatkan dan Kegiatan pada aspek pelayanan dan kondisi spesifik usaha pariwisata. Pada aspek pelayanan, upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada Pemandu Wisata (*Tour Guide*) yakni bagaimana pelayanan terhadap wisatawan secara profesional, sehingga para wisatawan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Usaha lainnya adalah melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas obyek wisata, dengancara mengadvokasi obyek-obyek wisata yang fasilitasnya masih minim dan perlu perbaikan. Selanjutnya obyek wisata tersebut, diakomodir dalam program dan kegiatan untuk peningkatan dan perbaikan fasilitasnya. Dengan demikian diharapkan dapat memacu potensi penerimaan devisa dari kegiatan dan kunjungan wisatawan. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara diatas terjadi karena didukung oleh beberapa faktor, yaitu :

- Pengembangan sistim informasi guna mendukung kebijakan program bidang kepariwisataan;
- Tersedianya objek wisata alam dan budaya yang unik dan menarik, bervariasi dan sebagian masih asli dan alami;
- Adanya kerjasama yang baik bidang promosi pariwisata antara pemerintah, pemerintah daerah dan swasta yang meningkat;
- Peningkatan daya tarik objek wisata agar dapat bersaing dengan objek wisata didaerah lain;
- Peningkatan kualitas promosi dan pemasaran melalui berbagai media di dalam dan di luar negeri.

Selain hal tersebut diatas, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari berhasilnya

pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata ditingkat lokal, seperti, Festival Danau Poso dan Festival Bahari Togean.

Peningkatan jumlah wisatawan ke Sulawesi Tengah merupakan hasil dari beberapa program Pemerintah, yaitu :

- Program pengembangan pemasaran pariwisata.
- Program pengembangan destinasi pariwisata.
- Program Pengembangan industri wisata
- Program pengembangan kelembagaan pariwisata.

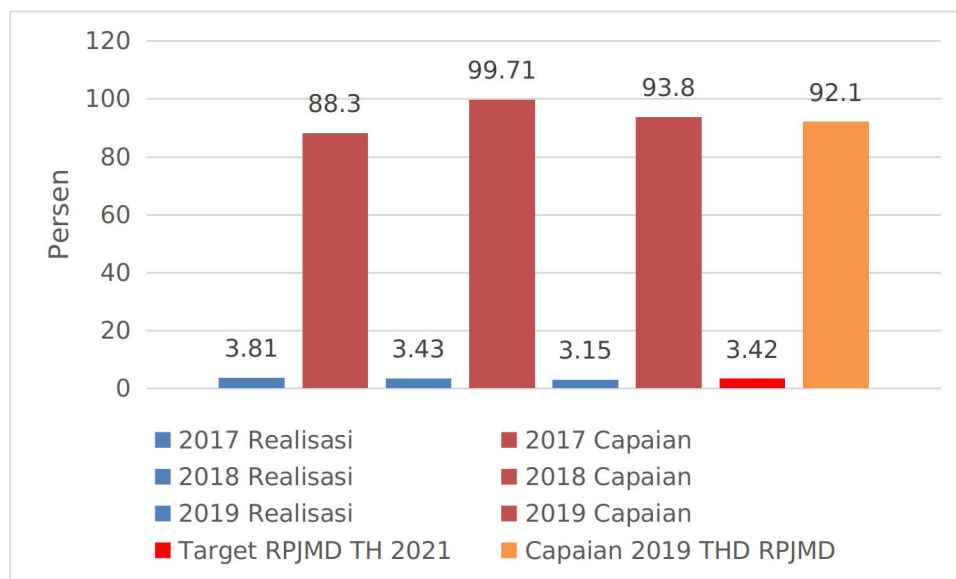
12. Sasaran Keduabelas Terciptanya Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.

Sasaran terciptanya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja dengan dua indikator kinerja sasaran, realisasi dan capaian kinerjanya dijelaskan dibawah ini :

- 1) Tingkat pengangguran terbuka.

Gambar berikut menyajikan realisasi dan capaian kinerja tingkat pengangguran terbuka :

Gambar 3.22
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tingkat pengangguran terbuka Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD

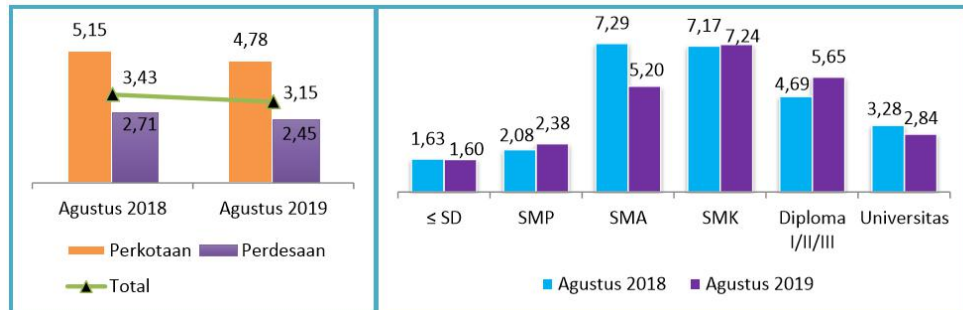


Gambar diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka setiap tahun selama tiga tahun berturut di Provinsi Sulawesi Tengah. Tahun 2017 realisasi tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,81% dengan capaian kinerja 88,3%. Sedangkan tahun 2018 realisasi tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,43% dengan capaian kinerja mencapai 99,71% (terjadi penurunan 11.07% dari tahun 2017). Sedangkan pada tahun 2019 realisasi tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,15% dengan capaian kinerja 93,8% atau terjadi penurunan 8,8% dari tahun 2018. Pencapaian tahun 2019 ini telah memberikan kontribusi 92, 1% dari target akhir RPJMD.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Gambar dibawah ini menunjukkan perkembangan TPT menurut daerah tempat tinggal dan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada periode 2018-2019.

Gambar 3.23
Perkembangan TPT menurut daerah tempat tinggal dan
menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan
pada periode
2018-2019.



Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2019

Dari gambar diatas terlihat bahwa TPT pada Agustus 2018 dibandingkan dengan Agustus 2019 mengalami penurunan sebesar 0,28 persen poin. Jika dilihat dari tempat tinggalnya, TPT di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT di perdesaan. Pada Agustus 2019, TPT di perkotaan sebesar 4,78 persen, sedangkan TPT di perdesaan sebesar 2,45 persen. Dibandingkan setahun yang lalu, terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka didaerah perkotaan sebesar 0,37 persen poin, sedangkan TPT di perdesaan turun 0,26 persen poin.

TPT pada Agustus 2018 dibandingkan dengan Agustus 2019 mengalami penurunan sebesar 0,28 persen poin.

Jika dilihat dari tempat tinggalnya, TPT di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT di perdesaan. Pada Agustus 2019, TPT di perkotaan sebesar 4,78 persen, sedangkan TPT di perdesaan sebesar 2,45 persen. Dibandingkan setahun yang lalu, terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka didaerah perkotaan sebesar 0,37 persen poin, sedangkan TPT di perdesaan turun 0,26 persen poin.

Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2019, TPT pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling

tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 7,24 persen, kemudian diikuti oleh Diploma I/II/III sebesar 5,65 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang lebih terutama pada tingkat pendidikan SMK dan Diploma I/II/III.

Mereka yang berpendidikan rendah, cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dapat dilihat dari TPT untuk pendidikan SD ke bawah memiliki nilai paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 1,60 persen. Pada Agustus 2019 jika dibandingkan kondisi setahun yang lalu, TPT yang mengalami penurunan terjadi pada tingkat pendidikan SD, SMA dan Universitas, kecuali pada tingkat pendidikan SMP, SMK, dan Diploma I/II/III.

Tabel berikut menunjukan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen) periode Agustus 2018 - Agustus 2019

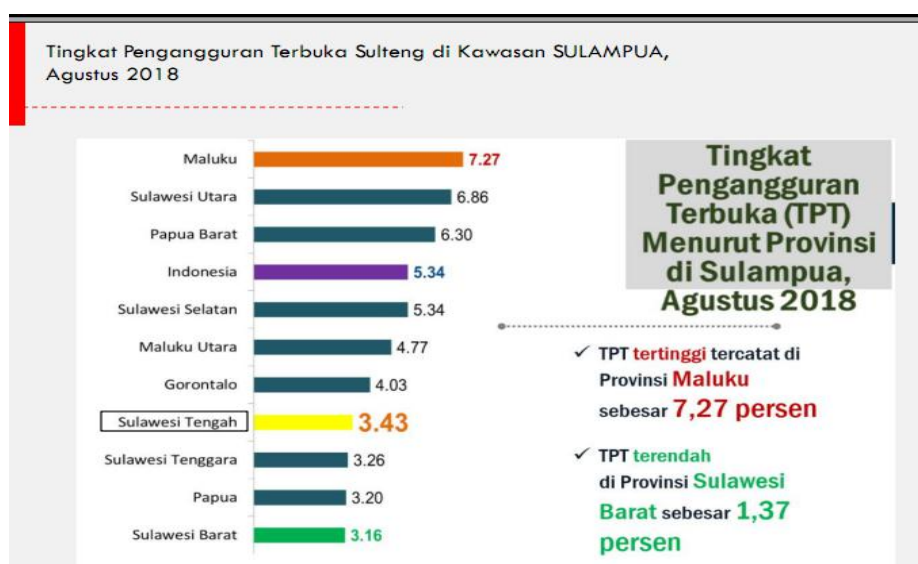
Tabel 3.29
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
(persen) periode Agustus 2018 - Agustus 2019

Kabupaten/Kota	TPAK			TPT		
	2018	2019	Perubahan	2018	2019	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banggai Kepulauan	70,18	73,55	3,38	3,60	2,02	-1,58
Banggai	71,49	66,93	-4,56	3,00	2,20	-0,80
Morowali	60,80	62,60	1,80	2,89	3,03	0,14
Poso	75,48	72,36	-3,11	2,47	2,25	-0,22
Donggala	63,82	65,52	1,70	2,85	2,81	-0,04
Toli-Toli	66,57	62,25	-4,31	3,18	3,16	-0,02
Buol	67,02	66,93	-0,09	4,57	4,05	-0,52
Parigi Moutong	72,05	68,09	-3,96	2,70	2,37	-0,33
Tojo Una-Una	76,58	78,59	2,01	3,74	2,97	-0,77
Sigi	69,10	69,00	-0,11	3,78	2,61	-1,17
Banggai Laut	69,30	65,17	-4,14	3,35	3,05	-0,30
Morowali Utara	75,45	65,65	-9,81	2,12	3,12	1,00
Palu	65,82	65,28	-0,54	5,81	6,36	0,55
Total	69,52	67,59	-1,93	3,43	3,15	-0,28

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2019

Selanjutnya disajikan Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Tengah di kawasan Sulampua, pada kondisi Agustus 2018.

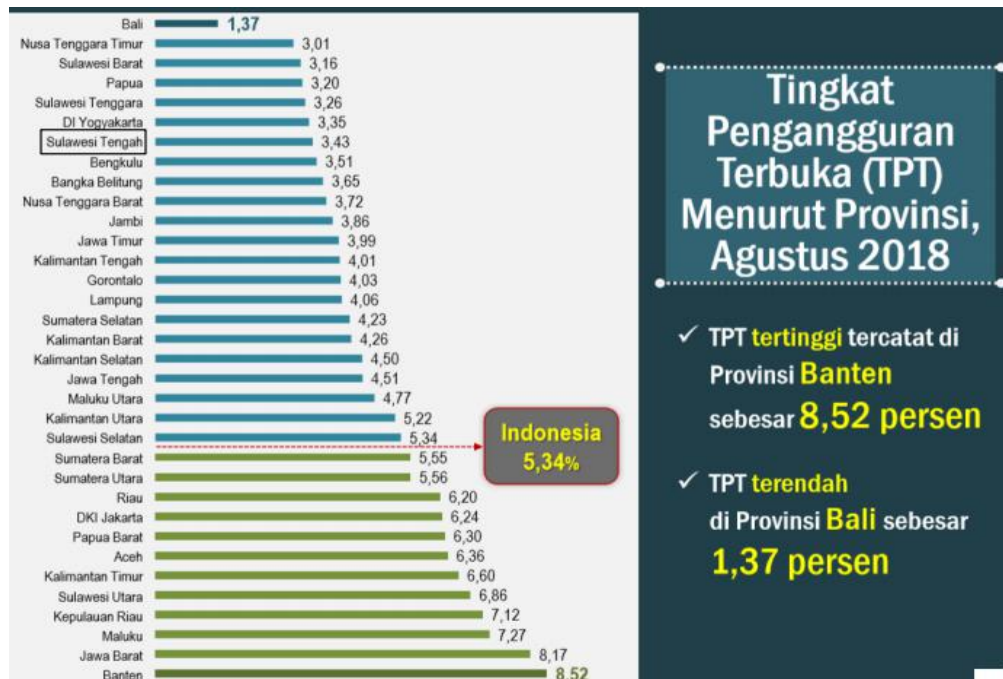
Gambar 3.24



Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2019

Gambar diatas menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah berada pada urutan ke delapan di kawasan Salumpua dengan persentase TPT sebesar 3,43%. Sedangkan untuk TPT tingkat nasional terlihat pada gambar berikut :

Gambar 3.25
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Tahun 2018



Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2019

Dari gambar diatas nampak bahwa TPT Provinsi Sulawesi Tengah pada kondisi Agustus 2018, berada pada urutan ke tujuh tingkat nasional dengan besaran TPT 3,43%, berada di atas TPT nasional yaitu 5,34%.

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Realisasi dan capaian kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 3.30
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017, 2018, 2019
dan
capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Target RPJMD TH 2021
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,14	90,12%	69,52	92,39%	67,59	92,52	76,75

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2017 realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sulawesi Tengah 67,14% dengan capaian kinerja 90,12%, kemudian tahun 2018 naik sebesar 2,37% sehingga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2018 terealisasi sebesar 69,52% dengan capaian kinerja 92,39%. Sedangkan pada tahun 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tercatat sebesar 67,59% pada kondisi Bulan Agustus 2019 dengan capaian kinerja 92,52% atau turun 1,93% dibandingkan tahun 2018. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2019 ini telah memberikan kontribusi sebesar 88,07%.

Pada Agustus 2019 tercatat jumlah Angkatan Kerja Sulawesi Tengah sebanyak 1,49 juta orang, mengalami penurunan sebanyak 16,41 ribu orang dibanding Agustus 2018. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2019 sebanyak 1,44 juta orang, turun sebanyak 11,73 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi turunnya penduduk yang bekerja adalah tenaga kerja yang dirumahkan oleh beberapa perusahaan karena tidak adanya kegiatan produksi serta bergesernya penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga/tidak dibayar yang sebagian besar membantu disektor pertanian berpindah ke kegiatan mengurus rumah tangga. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 46,80 ribu orang, juga mengalami penurunan sekitar 4,68 ribu orang dibanding setahun yang lalu.

Tabel 3.31
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis
Kegiatan Utama, 2018 - 2019

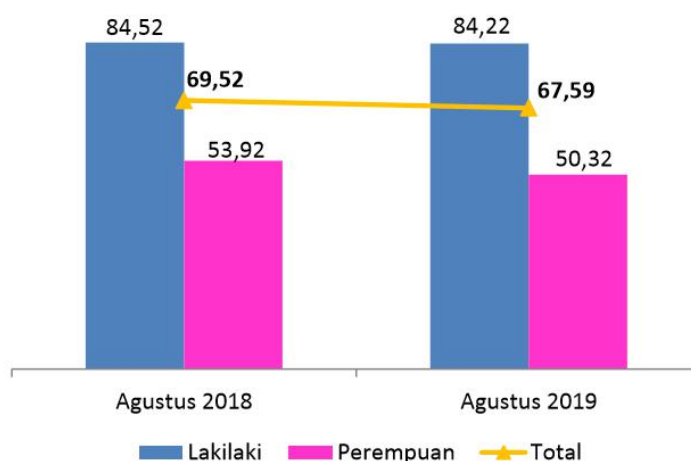
Status Keadaan Ketenagakerjaan	1 Tahun lalu Agustus 2018 (ribu orang)	Saat ini Agustus 2019 (ribu orang)	Perubahan 1 Tahunan (Agust 2018- Agust 2019)	
(1)	(2)	(3)	(4) ribu orang	(5) Persen
Penduduk Usia Kerja	2 161,87	2 199,32	37,45	1,70
Angkatan Kerja	1 502,97	1 486,56	-16,41	-1,10
Bekerja	1 451,49	1 439,76	-11,73	-0,81
Pengangguran	51,48	46,80	-4,68	-10,00
Bukan Angkatan Kerja	658,90	712,76	53,86	7,56
Sekolah	195,25	181,62	-13,63	-7,51
Mengurus Rumah Tangga	401,32	442,79	41,47	9,37
Lainnya	62,33	88,35	26,02	29,45
	Persen	Persen	Persen Poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,43	3,15	-0,28	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,52	67,59	-1,93	

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Agustus 2018. TPAK pada Agustus 2019 tercatat sebesar 67,59 persen, turun 1,93 persen poin dibanding setahun yang lalu. Penurunan TPAK memberikan indikasi adanya penurunan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja.

Berikut disajikan Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut jenis kelamin tahun 2018-2019 :

Gambar 3.26
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Tengah, 2018-2019



Dari gambar diatas nampak bahwa berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2019, TPAK laki-laki sebesar 84,22 persen, sementara TPAK perempuan hanya 50,32 persen. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, TPAK laki-laki turun 0,3 persen poin dan TPAK Perempuan juga mengalami penurunan sebesar 3,6 persen poin.

Program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menciptakan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja yaitu :

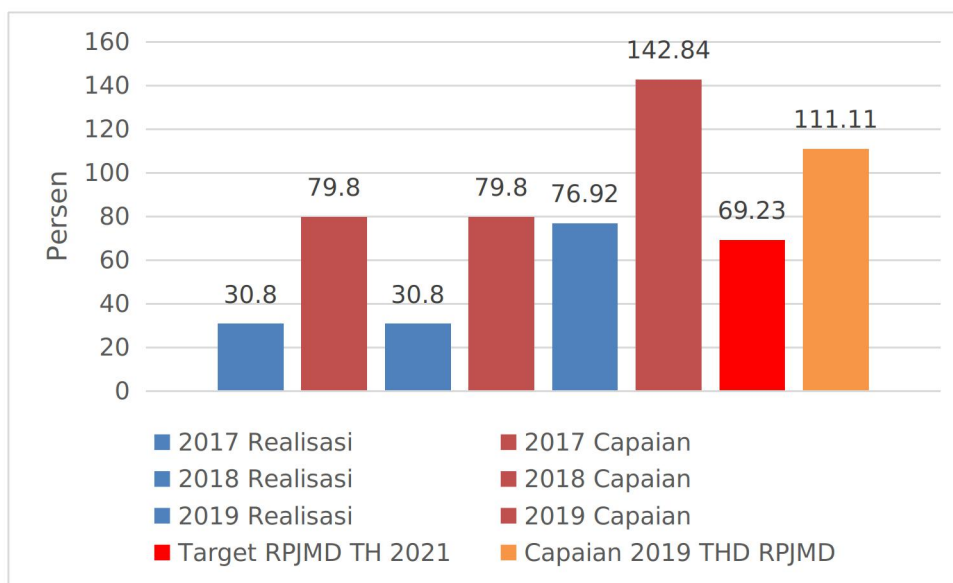
- Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktifitas.
- Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

13. Sasaran Ketigabelas Terbukanya Keterisolasian Daerah-daerah Terpencil.

Sasaran terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil yang diukur dengan indikator Persentase kabupaten/kota tidak tertinggal, pencapaiannya tersaji pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.27

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja
Persentase Kabupaten/Kota tidak tertinggal Tahun 2017, 2018,
2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD**



Gambar diatas menunjukkan bahwa persentase kabupaten/kota tidak tertinggal tahun 2017 dan tahun 2018 realisasi dan capaian kinerjanya sama yaitu masing-masing 30,8% untuk realisasi kinerja dan 79,8% untuk capaian kinerjanya. Sedangkan pada tahun 2019 persentase kabupaten/kota tidak tertinggal terealisasi sebesar 76,92% dengan capaian kinerja mencapai 142,84% atau naik 46,12% dibandingkan kondisi tahun 2017 dan 2018. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, capaian persentase kabupaten/kota tidak tertinggal tahun 2019 ini telah melampaui target karena telah terealisasi sebesar 111,11%.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Thn 2015 Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria :

- Perekonomian masyarakat;
- Sumber Daya Manusia;
- Sarana dan prasarana;
- Kemampuan keuangan daerah;

- Akseibilitas;
- Karakteristik daerah.

Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019, sampai dengan tahun 2018 di Sulawesi Tengah terdapat Sembilan Kabupaten yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal yaitu :

- a. Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Kabupaten Donggala,
- c. Kabupaten Tolitoli,
- d. Kabupaten Buol,
- e. Kabupaten Parigi Moutong,
- f. Kabupaten Tojo Unauna,
- g. Kabupaten Sigi,
- h. Kabupaten Banggai Laut,
- i. Kabupaten Morowali Utara.

Selama 3 tahun berturut-turut telah dilakukan pembinaan/pengembangan sesuai dengan regulasi yang ada, untuk mengentaskan 9 daerah/kabupaten yang masih tertinggal di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun dari 9 daerah/kabupaten tersebut, terdapat 6 daerah/kabupaten yang sudah terentaskan dan 3 daerah/kabupaten yang belum terentaskan pada tahun 2019. 6 daerah/kabupaten yang sudah terentaskan tahun 2019 tersebut yaitu 1) Kabupaten Parigi Moutong, 2) Kabupaten Tolitoli, 3) Kabupaten Buol, 4) Kabupaten Morowali Utara, 5) Kabupaten Banggai Kepulauan dan 6) Kabupaten Banggai Laut. Sedangkan 3 daerah/kabupaten yang belum terentaskan tahun 2019 adalah : 1) Kabupaten Sigi, 2) Kabupaten Donggala dan 3) Kabupaten Tojo Unauna, berikut penjelasannya :

1. Kabupaten Sigi merupakan kabupaten pasca bencana dan memiliki 13 indikator ketertinggalan yang belum

sepenuhnya terpenuhi yaitu KKD, air bersih, jalan aspal/beton, jalan diperkeras, jalan tanah, jumlah prasarana kesehatan, jumlah dokter, akses ke pelayanan kesehatan, bencana gempa, tanah longsor, banjir, desa dikawasan hutan lindung dan rata-rata desa berkonflik.

2. Kabupaten Donggala juga merupakan kabupaten pasca bencana dan memiliki 11 indikator ketertinggalan yang masih harus dipenuhi yaitu : air bersih, jalan aspal/beton, jumlah prasarana kesehatan, jumlah dokter, jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten yang membawahi, bencana gempa, tanah longsor, banjir, desa berlahan kritis dan desa berkonflik.
3. Kabupaten Tojo Unauna merupakan kabupaten yang secara topografis merupakan daerah yang membentuk pulau-pulau kecil, banyak terdapat pulau terluar. Adapun kabupaten Tojo Unauna memiliki 12 indikator ketertinggalan yang harus dipenuhi yaitu AHH, AHLS, jalan aspal/beton, jalan diperkeras, jalan tanah, jumlah dokter, jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten yang membawahi, tanah longsor, banjir, bencana lainnya, desa dikawasan hutan lindung dan rata-rata desa berkonflik.

Program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk sasaran terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil adalah :

- Program pembangunan daerah tertinggal.

14. Sasaran Keempatbelas Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Lahan Ditingkat Tapak.

Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dan lahan ditingkat tapak dengan indikator kinerja sasaran kontribusi PDRB sub sektor kehutanan, data capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.32
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Kontribusi PDRB sub sektor kehutanan Tahun 2017, 2018 dan capaian Tahun 2018 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Targ RPJM TH 2021
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Kontribusi PDRB sub sektor kehutanan	%	3	100%	856.82	28.561%	1541,04	51.368%	15

Tabel diatas menunjukan bahwa kontribusi PDRB sub sektor kehutanan tahun 2017 sebesar 3% dengan peresentase pencapaian 100%, sedangkan tahun 2018 target penerimaan pendapatan daerah bertambah berdasarkan Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2017 yaitu Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), maka mempengaruhi realisasi yang sangat tinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 856,82% dengan capaian kinerja mencapai 28.560%. Selanjutnya tahun 2019 kontribusi PDRB sub sektor kehutanan mencapai 1541,04% dengan capaian kinerja 51.368%. Data capaian pada tahun awal perencanaan ditambahkan realisasi 3% tahun 2017 dan tahun 2018 maka realisasi capaian sampai dengan tahun 2019 meningkat sangat signifikan sebesar 16.006%.

Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, capaian kontribusi PDRB sub sektor kehutanan tahun 2019 telah jauh melampaui target yaitu telah mencapai 16.006%.

Pencapaian ini ditunjang oleh beberapa faktor antara lain :

- Jumlah unit yang melaksanakan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan Iuran Kehutanan (SIPNBP) dalam rangka Pemanfaatan Hasil hutan secara tertib adalah SIPUHH sebanyak 434 unit dan SIPNBP sebanyak 428 unit atau Wajib Bayar, dengan rincian IUIPHHK (100 unit), PHAT/IPK/IPPKH (90 unit), IUPHHK (96 unit) dan IPHHBK (238 unit).
- Jumlah penyetoran kewajiban PNBK sesuai dengan hasil rekonsiliasi PNBK yang dilakukan Wajib Bayar yaitu IIUPH

Rp. 2.550.600., PSDH Rp. 3.578.321.607., dan DR USD 637,549.18 atau setara dengan Rp. 8.537.905.504,59. Pembayaran dilakukan oleh PT. Tower Jaya Sakti sebesar Rp. 2.550.600., yang merupakan IIUPH terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) untuk areal seluas 981 Ha.

- Pada Tahun 2018, Provinsi Sulawesi Tengah menerima Dana Bagi Hasil yang merupakan target sebesar 16 % dari setiap realisasi pembayaran wajib bayar baik PSDH, DR maupun IIUPH. Total sebesar Rp. 2.028.057.030,- merupakan bagian Prov.Sulteng dari Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Bidang Kehutanan yang telah disalurkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi melalui BPKAD Prov.Sulteng (Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah) secara bertahap setiap triwulan.
- Realisasi Produksi Kayu Bulat Tahun 2018 berasal dari IUPHHK 7.867,83 m³, IPK 4.132,31 m³, PHAT 24.465,57 m³, IPPKH 9.137,04 m³, HGU 1.005,05 m³. Realisasi Produksi Kayu Gergajian sebesar 23.170,7198 m³ sedangkan Realisasi Produksi Veneer yaitu sebesar 171,8600 m³.

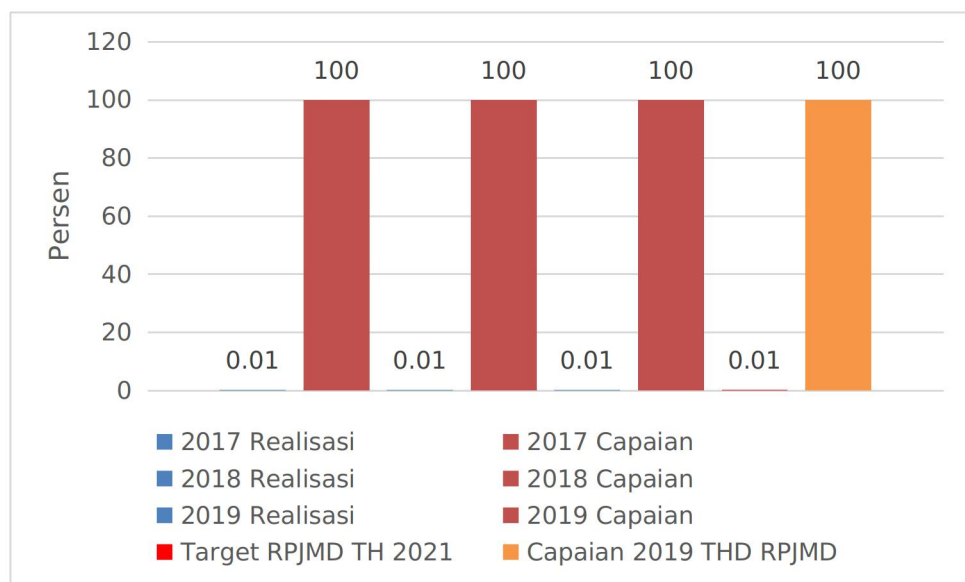
Program yang dilakukan untuk indikator kinerja kontribusi PDRB sub sektor kehutanan adalah :

- Program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan.
- Program planologi dan tata lingkungan hidup
- Program pengendalian perubahan iklim
- Program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- Program pengendalian DAS dan hutan lindung
- Program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.

15. Sasaran Kelimabelas Optimalnya Tata Kelola Hutan.

Sasaran Optimalnya tata kelola hutan dengan indikator kinerja Persentase kerusakan kawasan hutan, pencapaiannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

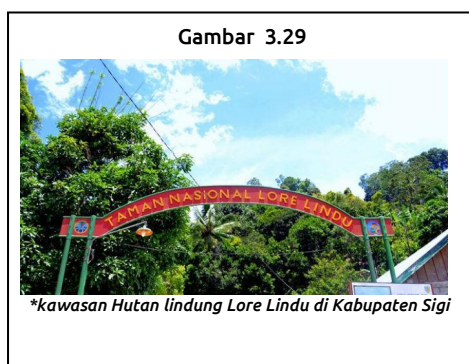
Gambar 3.28
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja
PersentaseKerusakan kawasan hutan Tahun 2017, 2018,
2019 dancapaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD



Dari data yang tersaji diatas nampak bahwa Persentase kerusakan kawasan hutan di Sulawesi Tengah selama 3 tahun berturut-turut realisasi dan capaian kinerjanya sama yaitu terealisasi sebesar 0,01% dengan capaian kinerja 100%. Pencapaian persentase kerusakan kawasan hutan tahun 2019 ini telah memenuhi target akhir RPJMD tahun 2021`dengan persentase capaian 100%.

Persentase kerusakan kawasan hutan di Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil pengolahan akhir analisis citra satelit resolusi sedang liputan tahun 2019, luas kerusakan kawasan hutan di Sulawesi Tengah mencapai 0,01% atau seluas 216.39 Ha dari total luas kawasan hutan yang mencapai 4.274.690,76 Ha.

Untuk mendukung penurunan kerusakan hutan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan berbagai upaya dengan mengalokasikan anggaran baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN melalui Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan dan Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Rehabilitasi areal lahan kritis yang dilaksanakan melalui Hkm pola agroforestry, pengkayaan tanaman, pembangunan Hutan Tanaman, penghijauan lingkungan, reboisasi, hutan rakyat, penanaman mangrove, UPSA dan kebun bibit rakyat (KBR) yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas yang membidangi kehutanan di 11 Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) UPT Kementerian Kehutanan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah.



Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga tetap terjaga daya dukung, produktivitas serta peranan hutan dan lahan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan.

Pada tahun 2019 Rehabilitasi Hutan dan Lahan mencapai 3.213 Ha. Kegiatan rehabilitasi hutan yang dilaksanakan

melalui pembuatan tanaman RHL pada UPT KPH seSulteng, menggunakan berbagai pola tanam dan lokasi kegiatan RHL dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Rehabilitasi dengan Pola Hutan Rakyat pada UPT KPH Balantak Ha tersebar di Kec. Lobu Desa Uha-uha, Kec. Pagimana Desa Bungawon, Kec. Balantak Utara Desa Pangkalaseang, Desa Talima A, Kec. Bualemo Desa Lembah Makmur, Kec Lamala Desa Kagitakan, Desa Labotan.
- b. Kegiatan Rehabilitasi dengan Pola Hutan Rakyat pada UPT KPH Banawa Lalundu tersebar di Kec. Banawa Selatan Desa Lumbulama, dan Pembuatan Tanaman Reboisasi Kec. Banawa Selatan Desa Malino, Kec. Rio Pakava Desa Tinauka, Kec.Pinembani Desa Dangaraa.
- c. Kegiatan Rehabilitasi dengan Pola Hutan Rakyat pada UPT KPH Dampelas Tinombo tersebar pada Kecamatan Moutong Desa Giro, Desa Lobu, Desa Ogobagis, Desa Ambason.
- d. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Dolago Tanggunung di Kec. Sigi Biromaru Desa Oloboju, Desa Vatunonju, Kec.Sirenja Desa Ujumbou, dengan Pola Hutan Rakyat di Kecamatan Sirenja Desa Ombo dan Kec. Sigi Biromaru Desa Vatunonju.
- e. Kegiatan Rehabilitasi dengan Pengembangan Model Tanaman HHBK pada UPT KPH Gunung Dako tersebar di Kec. Galang Desa Aung, Kec. Lampasio Desa Oyom, Kec. Basidondo Desa Labonu.
- f. Kegiatan Pemulihan Hutan dan Lahan Pola Hutan Rakyat pada UPT KPH Kulawi tersebar Kec. Dolo Selatan Desa Bangga.
- g. Kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Konservasi Tanah dan Air pada UPT KPH Pogogul tersebar di Kec. Palele Barat Desa Timbulon, Kec. Biau Desa Kelurahan Leok 1, Kec.Palele Barat Desa Oyak.

- h. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Pulau Peling dengan Pola Hutan Rakyat di Kec. Bulagi Utara Desa Sabang, Kegiatan Pengkayaan Reboisasi Kec.Bulagi Utara Desa Ombuli, Kec. Bulagi Selatan Desa Boluni, Kec Tinangkung Desa Ambelang, Desa Koakon.
- i. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Sintuwu Maroso dengan Pola Hutan Rakyat di Kec. Lage Desa Pandiri, Kegiatan Pengkayaan Reboisasi Kec.Lore Peore Desa Watutau.
- j. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Sivia Patuju dengan Pola Hutan Rakyat di Kec. Ampana Tete Desa Wanasari,Desa Mpoa, Desa Sukamaju, Desa Girimulyo, Kec. Tojo Barat Desa Matako, Kec. Tojo Desa Pancuma, Desa Tojo, Kec. Ulubongka Desa Mire, Desa Takibangke, Desa Marowo, Desa Uekambuno, Kec. Nuhon Desa Obo Balingara.
- k. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Tepe Asa Maroso dengan Pola Hutan Rakyat di Kec. Bungku Barat Desa Ambunu, Kec. Bungku Tengah Desa Tofuti.
- l. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Tepo Asa Aroa dengan Pola Hutan Rakyat di Kec.Soyo Jaya Desa Malino.
- m. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Toili Baturube dengan Pola Hutan Rakyat dan Pola Agroforestry di Kec. Nambo Desa Lumbe, Kegiatan Pengkayaan Tanaman Reboisasi pada Areal Penyangga KPH Di Kec.Toili Desa Uemea, Kec. Mamosalato Desa Tanasumpu, Kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat di Kec. Luwuk Selatan Desa Bubung, Kec Nambo Desa Koyoan. Kegiatan pembuatan tanaman hutan maupun penghijauan lingkungan di berbagai wilayah penyangga UPT KPH yang berada di Kabupaten/Kota se Sulteng dengan jenis tanaman produktif yang dapat menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi baik kayu maupun turunannya.

Selain itu untuk mencegah kerusakan kawasan hutanterus dilakukan upaya yang mendukung program pemerintah dalam menekan laju kerusakan kawasan hutan, yaitu melalui program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan yang lebih dititikberatkan kepada kegiatan penyidikan dan pengamanan hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan serta kegiatan pengembangan kawasan konservasi dan pembinaan hutan lindung guna meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat sekitar hutan agar kerusakan kawasan hutan yang diakibatkan praktek illegal logging, perambahan kawasan hutan dan hal-hal lain dapat diminimalisir dan persepsi masyarakat dapat ditingkatkan dalam menjaga keutuhan kawasan hutan. Tahun 2019 luas hutan yang dikelola masyarakat seluas 15.862,70 Ha.

Sesuai arahan Presiden RI yang tertuang dalam “Nawa Cita” posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang mengacu pada kebijakan pembangunan kehutanan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, areal kelola masyarakat serta penyelesaian konflik tenurial. Dalam P.83/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Hingga tahun 2019 Luas Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah mencapai 70.059,52 Ha. Sebelum penerbitan izin dari Kementerian LHK, Dinas dan KPH selaku perangkat

daerah melakukan sosialisasi terhadap perangkat Desa/Dusun maupun masyarakat setempat, membantu dalam pengajuan perda serta pembuatan peta usulan penyiapan kawasan perhutanan sosial.

Kewenangan Hak kelola berada di Kementerian dan Setelah Penerbitan hak atau izin oleh Kementerian, daerah sebagai fasilitasi maupun pendamping masyarakat dalam pembuatan Rencana Kerja usaha, Pemanfaatan Potensi Usaha serta penghubung dengan pihak swasta.

Peraturan Menteri dimaksudkan dapat memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di Bidang Perhutanan Sosial serta bertujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

Program yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk optimalnya tata kelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung adalah :

- Program pengendalian DAS dan hutan lindung.
- Program planologi dan tata lingkungan hidup.
- Program pengendalian perubahan iklim.
- Program konservasi sumberdaya alam dan ekosistem.

16. Sasaran Keenambelas Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup, data capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.33
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Indeks
kualitas lingkungan hidup Tahun 2017, 2018, 2019 dan
capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Targ RPJM TH 202
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	69,39	102,04%	69,50	100,72%	83	118,57%	71

Tabel diatas menggambarkan bahwa indeks kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Tengah setiap tahun mengalami peningkatan selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2017 indeks kualitas lingkungan hidup tercatat sebesar 69,39 poin dengan capaian kinerja 102,04%, kemudian pada tahun 2018 indeks kualitas lingkungan hidup tercatat sebesar 69,50 poin dengan capaian kinerja 100,72% atau terjadi kenaikan 0,15% dibandingkan tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2019 indeks kualitas lingkungan sebesar 83 poin dengan capaian kinerja mencapai 118,57% atau naik sebesar 19,42% dari tahun 2018. Pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2019 ini telah melebihi target yang ditetapkan pada akhir RPJMD, karena telah terealisasi sebesar 116,90% dari target akhir RPJMD tahun 2021.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH

merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia.

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coli, dan total coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO₂ dan NO₂; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Untuk penghitungan nilai Undeks Kualitas Air digunakan data hasil sampling di Sungai Lariang (Sigi dan Poso) dan untuk Indeks Kualitas udara menggunakan metode *Passive Sampler* yang dilaksanakan di 9 Kabupaten/Kota. Sehingga dengan menggunakan rumus : $IKLH_{Provinsi} = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$. Maka nilai IKLH Provinsi Sulawesi Tengah adalah 83,00 poin.

Program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah :

- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
- Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.
- Program pembinaan kajian lingkungan hidup strategis.
- Program penataan dan penegakan hukum lingkungan.
- Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
- Program peningkatan penyuluhan dan sumber daya manusia.

17. Sasaran Ketujuhbelas Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Sasaran meningkatnya kesejahteraan petani dengan indikator kinerja nilai tukar petani telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, karena persentase capaiannya sebesar 91,09%. Data capaian nilai tukar petani dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.34
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai tukar petani Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Target RPJMD TH 2021
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Nilai tukar petani	%	96,01	97,48%	95,09	96,05%	95,40	91,09%	99,5-100,5

Tabel diatas menggambarkan bahwa realisasi nilai tukar petani tahun 2017 sebesar 96,01% dengan capaian kinerja 97,48% lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar 95,09% dengan capaian kinerja sebesar 96,05%. Sedangkan pada tahun 2019 nilai tukar petani terealisasi sebesar 95,40% dengan capaian kinerja 91,09%. Nilai tukar petani tahun 2019 ini telah memenuhi 94,93% dari target akhir RPJMD tahun 2021.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu proksi indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. NTP diatas angka 100 dapat diartikan bahwa petani mengalami surplus (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha melebihi pertumbuhan pengeluaran rumah tangga). NTP sama dengan 100 berarti petani mengalami titik impas (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha sama dengan pengeluaran rumah tangga dan NTP di bawah 100 berarti petani mengalami defisit (tingkat

pertumbuhan pendapatan usaha dibawah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga). Secara sederhana angka NTP diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Pada tahun 2019, realisasi kinerja nilai tukar petani mencapai 95,40 yang berarti bahwa petani mengalami defisit dimana tingkat pertumbuhan pendapatan usaha berada dibawah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga.

Penyebab tidak tercapainya target NTP tahun 2018 disebabkan karena indeks yang diterima petani lebih kecil dibandingkan dengan indeks yang dibayar petani. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan NTP adalah dengan :

- (1) Meningkatkan indeks yang diterima petani, upaya yang dilakukan adalah bagaimana harga jual produk hasil pertanian tanaman pangan dapat ditingkatkan melalui peningkatan mutu, kontrol pasokan produk di pasar produsen, distribusi produk pertanian ke pasar konsumen dan terjadinya tunda jual saat memasuki musim panen.
- (2) Stabilitas atau penurunan indeks yang dibayar petani, upaya yang dilakukan adalah menjaga stabilitas barang konsumsi meliputi bahan makanan, makanan jadi dan sandang, disamping itu bagaimana menekan biaya transportasi dari tingkat petani menuju pasar tingkat produsen.
- (3) Menekan biaya biaya produksi dan menekan penambahan biaya modal, upaya yang dilakukan adalah stabilitas biaya transportasi barang konsumsi dan bahan modal menuju ke pasar produsen, disamping itu

terjaminnya ketersediaan benih dan bibit juga akan mengurangi naiknya indeks yang harus dibayar petani.

Selain hal tersebut diatas, solusi lain yang dilakukan adalah efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dilakukan melalui :

- (1) Peningkatan penggunaan pupuk kandang/organik sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk organik, dengan demikian volume penggunaan pupuk anorganik dapat ditekan sehingga kelangkaan pupuk ditingkat konsumen dapat dikurangi dan harga pupuk non subsidi tidak meningkat;
- (2) Penggunaan pestisida didasarkan pada hasil pengamatan perkembangan hama dan penyakit, keadaan ini akan menekan penggunaan pestisida.
- (3) Meningkatkan mekanisme dalam pertanian, hal ini akan mencegah peningkatan upah buruh ditingkat petani.
- (4) Stabilitas dan penurunan harga BBM akan berdampak pada stabilitas dan penurunan biaya transport menuju pasar produsen.

Program yang dilakukan untuk menunjang peningkatan NTP adalah dengan melakukan peningkatan indeks yang diterima petani melalui peningkatan harga hasil produk yang dihasilkan petani, melalui pengendalian pasokan petani ke pasar produsen dengan perlunya pengembangan program yang terkait dengan Resi Gudang, Program LPDM, Program Cadangan Pangan, Pembelian Bulog. Program tersebut semuanya akan dapat mengurangi masuknya produk hasil pertanian dalam jumlah yang besar sehingga penurunan harga hasil pertanian dapat dicegah, melalui :

- Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan;

- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Holtikultura Berkelanjutan.

18. Sasaran Kedelapanbelas Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Holtikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan.

Sasaran meningkatnya produksi dan mutu tanaman holtikultura, tanaman pangan dan perkebunan dengan dua indikator kinerja sasaran yaitu kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan jumlah PDRB sub sektor perkebunan data capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

1) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Data capaian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.35
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2017,
2018, 2019 dan capaian Tahun 2018 terhadap Target
akhir RPJMD

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Target RPJMD TH 2021
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	28,98	94,27%	27,73	91,55%	26,23	92,36%	28,92

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB setiap tahunnya menurun selama 3 tahun berturut-tahun. Tahun 2017 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tercatat sebesar 28,98% dengan

capaian kinerja 94,27% lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar 27,73% dengan capaian kinerja mencapai 91,55%. Selanjutnya tahun 2018 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tercatat sebesar 26,23% dengan capaian kinerja 92,36% atau turun 1,30% dibandingkan tahun 2018. Sedangkan terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, pencapaian tahun 2019 ini telah memberikan kontribusi sebesar 90,70%.

Menurunnya kontribusi pertanian terhadap PDRB Sulawesi Tengah selama 3 tahun terakhir disebabkan akibat terjadinya perubahan struktur ekonomi dari lapangan usaha pertanian ke pertambangan dan penggalian serta terjadinya peningkatan kontribusi pada perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor. Selain itu kurang berminatnya investor swasta untuk menanamkan modalnya disektor pertanian (khususnya sub sektor tanaman pangan dan hortikultura) akibat adanya keterbatasan infrastruktur terutama jalan dan pelabuhan serta investasi dibidang pertanian memiliki resiko yang tinggi juga merupakan salah satu faktor tidak tercapainya target PDRB tahun 2019.

2) Jumlah PDRB sub sektor perkebunan.

Data capaian PDRB sub sektor perkebunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.36
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja
Jumlah PDRB sub sektor perkebunan Tahun 2017, 2018,
2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir
RPJMD

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2019 THD RPJMD
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1	Jumlah PDRB sub	Rp	11.55 1.515	96,33%	12.009	97,23	12.480 .042	98,10	13.497. 176	92,46

	sektor perkebunan				.909					
--	----------------------	--	--	--	------	--	--	--	--	--

Tabel diatas menggambarkan bahwa realisasi jumlah PDRB sub sektor perkebunan setiap tahun mengalami peningkatan selama tiga tahun berturut-turut. Tahun 2017 jumlah PDRB sub sektor perkebunan tercatat sebesar Rp. 11.551.515 dengan capaian kinerja 96,33%, tahun 2018 meningkat 3,97% dimana terealisasi sebesar Rp. 12.009.909 dengan capaian kinerja 97,23% dan pada tahun 2019 jumlah PDRB sub sektor perkebunan naik menjadi Rp. 12.480.042 dengan capaian kinerja mencapai 98,10% atau terjadi kenaikan 3,76% dari tahun 2018. Sedangkan terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 jumlah PDRB sub sektor perkebunan telah memberikan kontribusi sebesar 92,46%.

Pencapaian jumlah PDRB sub sektor perkebunan yang hampir mencapai target ini, didukung oleh meningkatnya produksi beberapa komoditas unggulan perkebunan Sulawesi Tengah dan meningkatnya populasi peternakan.

Dari 8 komoditas unggulan perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 5 komoditas yang telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu Kelapa Dalam, Pala, Lada, Kelapa Sawit, dan Karet. Sedangkan untuk komoditi Cengkeh, Kopi dan Kakao belum mencapai target yang telah ditetapkan. Bantuan bibit dan peremajaan komoditas Kelapa Dalam, Pala, Lada, Kelapa Sawit dan Karet yang diberikan tahun 2012-2015 telah menunjukkan keberhasilan, melalui bimbingan penyuluh dan tenaga lapangan, sehingga produksi kelima komoditas tersebut dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi produksi komoditas Kelapa Dalam mencapai 189.780 ton (111,57%) pada tahun 2019 dari target yang telah di tetapkan yaitu sebesar (170.099 ton) dan mencapai 107,16% terhadap target jangka menengah

(177.092 ton). Produksi komoditas Pala mencapai realisasi sebesar 337 ton (132,16%) dari target tahun 2019 yaitu sebesar (255 ton) dan 115,41 % terhadap target jangka menengah (292 ton). Produksi komoditas Lada juga mencapai realisasi sebesar 223 ton (229,90%) dari target tahun 2019 sebesar (97 ton) dan 223% terhadap target jangka menengah (100 ton). Realisasi produksi komoditas Kelapa Sawit mencapai 445.892 ton (139,18%) dari target tahun 2019 sebesar (320.382 ton) dan mencapai 131,19% terhadap target jangka menengah (339.893 ton). Sedangkan untuk komoditas Karet realisasi produksinya mencapai 2.510 ton (102,41%) dari target tahun 2019 yaitu sebesar (2.451 ton) dan 96,54% terhadap target jangka menengah (2.600 ton).

Peningkatan produksi ke 5 komoditas unggulan tersebut sangat dipengaruhi karena adanya intensitas dan distribusi curah hujan yang cukup tinggi dan merata yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018. Keadaan ini sangat mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dimana tanaman mendapat cukup banyak air yang diperlukan pada proses penyerapan hara dan proses fotosintesis sehingga proses pembentukan bunga dan buah lebih maksimal.

Sebaliknya komoditas Cengkeh, Kopi dan Kakao menunjukkan hal yang berbeda dimana ketiga komoditas ini produksinya justru mengalami penurunan. Produksi Cengkeh mencapai 86,00% atau 15.575 ton dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 17.998 ton dan apabila disandingkan dengan target jangka menengah maka diperoleh hasil produksi cengkeh mencapai 79,44% dari target jangka menengah sebesar 19.606 ton. Produksi komoditi Kakao mencapai 87,88% atau capaian sebesar 125.473 ton dari target yang ditetapkan pada tahun 2019

yaitu sebesar 142.785 ton dan capaian 87,63% jika dibandingkan dengan target Jangka Menengah yang ditetapkan sebesar 143.185 ton. Untuk komoditas Kopi pada tahun 2019 mencapai 98,01% atau sebesar 2.671 ton dari target yang ditetapkan sebesar 2.817 ton, dan capaian produksi komoditas Kopi ini sama dengan capaian jika dibandingkan dengan target Jangka Menengah yaitu sebesar 98,01% atau produksi sebesar 2.671 ton. Capaian produksi dari komoditas Cengkeh, Kakao dan Kopi pada tahun 2019 tersebut dapat dikatakan sangat baik walaupun seluruhnya tidak mencapai target 100%. Banyak faktor yang sangat mempengaruhi yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut diantaranya adalah masih cukup tingginya serangan hama dan penyakit tanaman serta harga komoditi yang kurang stabil.

Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi pada akhir tahun 2018 dan di awal tahun 2019 juga merupakan hal yang mempengaruhi tingkat produksi komoditi Cengkeh, Kakao dan Kopi, karena secara fisiologis tingkat curah hujan yang tinggi akan mempengaruhi proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman.

Selanjutnya proses pasca panen juga akan terganggu mengingat komoditi Cengkeh, Kakao dan Kopi sangat membutuhkan sinar matahari yang cukup banyak untuk proses pengeringan, yang jika hal ini tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi mutu hasil produksinya.

Berikut jumlah produksi komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019.

Tabel 3.37
Jumlah produksi komoditas unggulan Prov. Sulteng
Tahun 2019

No.	Komoditas	Jumlah produksi (ToN)
1.	Kelapa dalam	189.780
2.	Cengkeh	15.575
3.	Kopi	2.761
4.	Kakao	125.473
5.	Pala	337
6.	Lada	223
7.	Kelapa sawit	445.892
8.	Karet	2.510

Sumber data : Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2020

Sedangkan untuk populasi peternakan, komoditas sapi potong menjadi salah satu komoditas unggulan Sulawesi Tengah telah berhasil mencapai sasaran produksi sebesar 94,24% dengan jumlah populasi ternak tahun 2018 sebanyak 343.630 ekor. Hal ini dapat tercapai dengan baik melalui dukungan Program Sulawesi Tengah Sejuta Sapi (S3) yang mulai menunjukkan keberhasilannya dan juga didukung oleh Program Nasional Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUSIWIAB).

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kesejahteraan petani dan meningkatnya produksi dan mutu tanaman hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan didukung oleh program :

- Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengolahan serta pemasaran hasil perkebunan.

- Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan;
- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Holtikultura Berkelanjutan

19. Sasaran Ke sembilanbelas Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Nelayan dan Perikanan Budidaya.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan perikanan budidaya, dengan 2 indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

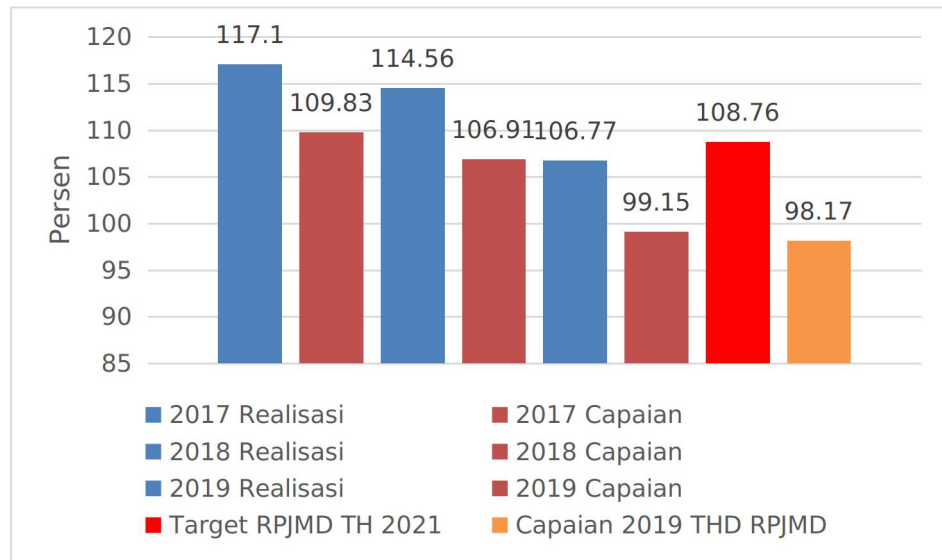
1) Nilai tukar nelayan

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu proksi indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani/ nelayan/pembudidaya dari waktu ke waktu. NTP di atas angka 100 dapat diartikan bahwa petani/nelayan/pembudidaya mengalami surplus (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha melebihi pertumbuhan pengeluaran rumah tangga), NTP sama dengan 100 berarti petani/nelayan/pembudidaya mengalami titik impas (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha sama dengan pengeluaran rumah tangga) dan NTP di bawah 100 berarti petani/nelayan/pembudidaya mengalami defisit (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha di bawah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga). Secara sederhana angka NTP diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani/nelayan/pembudidaya (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani/nelayan/pembudidaya (Ib). Mulai Januari 2013 dilakukan perubahan tahun dasar

penghitungan NTP dari tahun dasar (2007=100) menjadi tahun dasar (2012=100). Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan/pergeseran pola produksi hasil pertanian/perikanan dan pola konsumsi rumah tangga pertanian/perikanan di pedesaan dan perluasan cakupan subsektor pertanian. Pada tahun dasar yang baru, terdapat peningkatan cakupan komoditas baik pada paket komoditas It maupun Ib. Penghitungan NTP juga mengalami perluasan khususnya pada subsektor perikanan, yang kompilasinya dilakukan secara terpisah antara Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPPI) sehingga input data dimulai dari 0. Tahun 2019 target Nilai Tukar Perikanan Budidaya 85,00 dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap 107,68. Realisasi Nilai Tukar Perikanan yang dicapai oleh kedua sub sektor ini adalah untuk perikanan budidaya adalah sebesar 87,11 (102,49%) dan perikanan tangkap sebesar 112,98 (104,93%). Berikut Capaian NTN dan NTPPI selama tahun 2019.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai tukar nelayan tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD tersaji pada gambar berikut :

Gambar 3.30
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai tukar nelayan Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD



Gambar diatas menunjukkan bahwa realisasi nilai tukar nelayan setiap tahun mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun 2017 realisasi nilai tukar nelayan tercatat sebesar 117,1% dengan capaian kinerja 109,83%, terjadi penurunan nilai sebesar 2,2% dimana realisasi nilai tukar nelayan tahun 2018 sebesar 114,56% dengan capaian kinerja 106,91%. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi nilai tukar nelayan tercatat sebesar 106,77% dengan capaian kinerja sebesar 99,15% atau turun 7,30% dari tahun 2018. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 realisasi nilai tukar nelayan tahun 2019 ini telah memberikan kontribusi sebesar 98,17%.

Berikut disajikan capaian NTN dan NTPPi selama tahun 2019 :

Tabel 3.38
Capaian NTN dan NTPPi Sulawesi Tengah
Tahun 2019

Bulan	NTN	NTPPi	NTNP (Nilai Tukar Petani subsektor Perikanan)
Januari	114,17	85,67	106,29
Februari	114,72	85,73	106,70
Maret	112,37	85,68	104,99
April	112,74	86,42	105,46
Mei	110,18	86,86	103,72
Juni	112,86	87,74	105,91
Juli	112,58	88,63	105,95
Agustus	114,98	88,92	107,76
September	113,41	88,57	106,53
Oktober	111,17	87,95	104,74
November	111,92	87,02	105,02
Desember	114,69	86,12	106,77

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulteng, 2020

Nilai tukar subsektor perikanan berfluktuasi sepanjang 2019, untuk perikanan tangkap dan budidaya mencapai titik tertinggi pada bulan Agustus. Bila dibandingkan, nilai tukar pada subsektor perikanan tangkap relatif lebih tinggi dibandingkan perikanan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa nelayan masih mengandalkan hasil produksi perikanan secara musiman. Sementara itu, masih rendahnya nilai tukar pada subsektor perikanan budidaya antara lain disebabkan masih rendahnya indeks yang diterima oleh pembudidaya (It) dalam hal ini rendahnya harga jual panen dibandingkan dengan indeks yang dibayarkan (Ib). Indeks yang dibayarkan pada sektor budidaya mencakup 2 (dua) aspek yaitu: (a) aspek teknis, terdiri dari biaya produksi yang masih tinggi, dipengaruhi oleh harga benih/bibit dan indukan dimana pada tahun 2019 pembudidaya kesulitan mendapatkan benih/bibit dan indukan berkualitas serta

sulitnya diperoleh pakan dan pupuk; (b) aspek non teknis mencakup pengeluaran rumah tangga terutama untuk kepentingan pendidikan, kesehatan dan perumahan.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan perikanan budidaya dengan indikator kinerja sasaran nilai tukar nelayan adalah sebagai berikut :

➤ Jumlah produksi perikanan budidaya.

Perikanan budidaya meliputi budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya karamba dan budidaya sawah. Komoditi unggulan perikanan budidaya Sulawesi Tengah adalah rumput laut dan ikan air tawar (nila, mas dan lele). Dominasi produksi yang cukup besar terdapat pada pengembangan komoditi rumput laut, yaitu *Euchema Cottoni* yang banyak diusahakan pada budidaya laut dan *Glacillaria sp* yang diusahakan pada budidaya tambak.

Target produksi budidaya pada tahun 2019 adalah sebesar 1.009.800,00 ton dengan pencapaian sementara tahun 2019 adalah sebesar 918.186,40 ton* atau mencapai 90,92%. Data ini masih merupakan angka sementara karena proses penghitungan data statistik yang masih berjalan dan menunggu validasi. Rendahnya pencapaian produksi perikanan budidaya sampai dengan data terakhir tahun 2019 diperoleh disebabkan menurunnya produksi rumput laut Sulawesi Tengah sehingga mulai tahun 2019 Dinas Kelautan dan Perikanan memprogramkan kegiatan kultur jaringan rumput laut untuk mengatasi ketersediaan bibit dan peningkatan kualitas rumput laut. Data produksi

budidaya tahun 2019 per kabupaten kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.39
Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019 Per
Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Produksi
1	Banggai Kepulauan	647.058,46
2	Banggai Laut	16.440,81
3	Banggai	4.062,86
4	Morowali	182.410,14
5	Morowali Utara	7.181,95
6	Poso	3.292,06
7	Donggala	19.142,70
8	Toli-toli	6.441,39
9	Buol	1.114,19
10	Parigi Moutong	24.320,53
11	Tojo Una Una	5.644,91
12	Kota Palu	118,90
13	Sigi	957,50
	T o t a l	918.186,40

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulteng, 2020

➤ Jumlah produksi perikanan tangkap

Perikanan tangkap meliputi perikanan laut dan perairan umum daratan (PUD). Target produksi perikanan tangkap di Sulawesi Tengah pada tahun 2019 adalah 228.286,66 ton dan terealisasi sementara sebesar 171.115,00 ton*. Nilai ini lebih rendah dari target yang ditetapkan Rendahnya capaian pada tahun 2019 ini disebabkan oleh faktor cuaca, dimana selama beberapa bulan nelayan dilarang/tidak turun melaut karena cuaca yang tidak menentu. Akan tetapi, capaian tahun 2019 ini

diperkirakan masih akan naik mengingat data produksi triwulan IV (empat) dari beberapa kabupaten belum masuk. Data produksi tangkap tahun 2019 per kabupaten kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.40
Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019 Per
Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Produksi
1	Banggai Kepulauan	12.491,50
2	Banggai	14.712,30
3	Morowali	34.126,60
4	Poso	7.581,90
5	Donggala	18.412,90
6	Toli-toli	20.781,10
7	Buol	14.717,70
8	Parigi Moutong	16.809,00
9	Tojo Una Una	9.023,80
10	Morowali Utara	1.849,10
11	Banggai Laut	19.378,40
12	Palu	1.110,70
13	Sigi	120
	T o t a l	171.115,00

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulteng, 2020

Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga mengembangkan beberapa inovasi dibidang kelautan perikanan yang bertujuan untuk peningkatan dan pengelolaan produksi perikanan. Inovasi-inovasi yang dikembangkan tersebut adalah :

a. Bandeng bebas duri (BABERI)

Sebagai ikan komoditas pangan, bandeng menempati urutan pertama dalam pemenuhan omega 3 sebesar

14,20% diatas Sarden, Salmon dan Tuna. Energi yang dihasilkan Bandeng adalah sebesar 129 kkal, protein sebesar 20 gr, lemak 4,8 gr, kalsium 20 mg, fosfor 150 mg, zat besi 2 mg serta mengandung vitamin A dan B1. Bandeng bebas duri merupakan salah satu diversifikasi produk olahan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Produk ini cukup diminati yang dapat dilihat dari permintaan pasar yang besar terutama pada bandeng dengan ukuran 500-600 gram perekornya. Proses pengolahan bandeng bebas duri tidak hanya dilakukan oleh karyawan dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi tengah, namun juga ditularkan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pelatihan. Tahun 2019 dilakukan pelatihan cabut duri untuk bandeng bagi UMKM di Kota Palu.

Gambar 3.31
Bandeng Bebas Duri



Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulteng, 2020

b. Budidaya udang supra intensif.

Inovasi budidaya udang supra intensif skala rakyat merupakan inovasi yang dilakukan oleh DKP Sulteng dimana budidaya udang yang dulunya hanya dilakukan oleh pengusaha besar dengan modal besar sekarang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha kecil dan menengah. Budidaya udang skala rakyat ini dibangun di Mambo, Kota Palu dengan kolam berukuran 8 x 2,2 meter sebanyak 2 (dua) kolam dengan padat tebar udang vaname masing-masing kolam 15.000 ekor. Inovasi ini

dimulai pada September 2019 dengan masa budidaya 3 (tiga) bulan.

Gambar 3.32
Budidaya Udang Supra Intensif Skala Rakyat di Mambo Kota Palu



Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulteng, 2020

c. Kolam budidaya hemat air.

Kolam budidaya hemat air merupakan inovasi dibidang budidaya ikan yang dikembangkan dengan menggunakan terpal. Inovasi kolam budidaya hemat air ini dimulai pada Agustus 2019 di Kabupaten Sigi sebanyak 3 kolam, dengan ukuran 20 x 12 meter. Komoditas yang digunakan adalah ikan nila dengan padat tebar 7.500 ekor dan masa budidaya kurang lebih 4 bulan.

Gambar 3.33
Kolam Budidaya Hemat Air di Kabupaten Sigi



Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulteng, 2020

d. Kolam Ikan Semi Intensif Teknologi Bioflok

Tahun 2019 DKP Sulteng membuat inovasi program pemberdayaan ekonomi yaitu budidaya ikan air tawar

berupa kolam terpal dengan teknologi bioflok semi intensif di Kota Palu. Kolam yang dibuat berupa silinder dengan konstruksi anyaman besi beton berlapis terpal dengan diameter 2 (dua) meter dan tinggi 150 centimeter sebanyak 2 kolam, dengan komoditas ikan lele dan nila dan padat tebar masingmasing 1.000 ekor dan 1.500 ekor dengan masa budidaya kurang lebih 4 bulan. Untuk produktivitasnya ikan lele dengan padat tebar 1.000 ekor dapat menghasilkan sedikitnya 300 kg. Sistem bioflok ini dapat mencapai siklus panen 3 (tiga) kali dalam setahun.

Gambar 3.34
Kolam Ikan Semi Intensif Teknologi Bioflok di Kota Palu



Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulteng, 2020

2) Nilai ekspor hasil perikanan

Nilai ekspor hasil perikanan tahun 2019 sebesar US\$ 3.763.124,02. Data pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.41

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja
Nilai ekspor hasil perikanan Tahun 2017, 2018, 2019
dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD**

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2019 THD RPJMD
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1	Nilai ekspor hasil perikanan	US\$	3.227.836	68,31%	4.961.250	100,2%	3.763.124,02	117,60%	3.784.000	99,45

Tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai ekspor hasil perikanan tahun 2017 terealisasi US\$ 3.227.836 dengan capaian 68,31% sedangkan pada tahun 2018 terealisasi US\$ 4.961.250 dengan capaian 100,2% atau terjadi peningkatan sebesar 11,09% dibandingkan tahun 2017. Namun pada tahun 2019 Nilai ekspor hasil perikanan turun sebesar 11,98% karena hanya terealisasi sebesar US\$ 3.763.124,02 dengan capaian kinerja 117,60%. Tingginya capaian kinerja ini disebabkan karena adanya revisi target Nilai ekspor hasil perikanan dalam RPJMD. Pencapaian tahun 2019 ini telah memberikan kontribusi sebesar 99,45% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

Jenis komoditi perikanan yang diekspor dari Sulawesi Tengah selama Tahun 2019 antara lain: Gurita beku, fillet ikan beku dan sotong beku, dengan negara tujuan Perancis, China, Malta, USA, Vietnam, Slovenia dan Reunion. Komoditas dan nilai ekspor hasil perikanan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.42
Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2019**

No	Komoditas	Volume (kg)	Nilai Ekspor (US\$)
1	Gurita beku	514.069,78	2.917.790,67
2	Fillet ikan beku	68.996,06	381.180,16
3	Sotong beku	99.735.000	464.153,02
	T O T A L	682.800,04	3.763.124,02

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulteng, 2020

Program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pencapaian sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan perikanan budidaya adalah :

- Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap
- Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya.
- Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- Program pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya.
- Program pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

20. Sasaran Keduapuluh Tuntasnya Angka Melek Aksara.

Angka Melek Aksara adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Dalam perencanaan pembangunan wilayah, Angka Melek Aksara digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah. Persentase angka melek aksara di Sulawesi Tengah, pengukuran kinerjanya dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 3.43
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja
Persentase angka melek aksara Tahun 2017, 2018, 2019
dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2019 THD RPJMD
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Angka Melek Aksara	%	96,1	98,11%	96,50	98,65%	96,53	97,75%	99,25-100	96,53

Dari tabel diatas diketahui bahwa persentase angka melek aksara di Sulawesi Tengah tahun 2017 sebesar 96,1 dengan capaian kinerja sebesar 98,11%. Terjadi kenaikan 0,40% pada tahun 2018, dimana persentase angka melek aksara tahun 2018 terealisasi sebesar 96,53% dengan persentase capaian 98,65%. Kemudian tahun 2019 persentase angka melek aksara tercatat sebesar 96,50% atau naik sebesar 0,03% dari tahun 2018. Terhadap target RPJMD tahun 2021, pencapaian persentase angka melek aksara ini telah memberikan kontribusi sebesar 96,53%.



Target penuntasan melek aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan di Sulawesi Tengah, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga

negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan seperti pembangunan pemerataan ekonomi dan sosial.

Strategi yang digunakan dalam rangka mengurangi melek aksara di Sulawesi Tengah adalah melalui program Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar berdasarkan data by

name by address. Dalam pemberantasan buta aksara harus jelas sasarannya, siapa orangnya dan dimana tempat tinggalnya. Program ini akan fokus dilaksanakan di wilayah-wilayah khusus atau wilayah yang sulit dijangkau, karena sebagian besar penduduk buta aksara pada umumnya tinggal di wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau seperti pada beberapa daerah di Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong dan Tojo Unauna. Kendala yang menjadi tantangan dalam program ini selain wilayahnya yang terpencil, juga adalah faktor kemauan warga belajar, karena itu perlu pendekatan khusus yang menggunakan bahasa lokal (daerah) dari para tutor untuk bagaimana memotivasi warga sasaran untuk mau menjadi warga belajar.

21. Sasaran Kedua puluh satu Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Untuk Menuntaskan Pendidikan Dasar Dan Pengembangan Pendidikan Menengah.

Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah dengan 6 indikator kinerja sasaran data capaian kinerjanya dapat dilihat dibawah ini :

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usia pada jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka

Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan SMA/MA/SMK/Paket C di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 3.44

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Target RPJMD TH 2021
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1.	APK SD/MI/Paket A	%	104,00	97,7%	103	98,10%	104,30	99,48%	103,75%
2.	SMP/MTs/Paket B	%	91,50	99,6%	92,00	99,66%	92,30	99,66%	93,75%
3.	SMA/MA/SMK/Paket C	%	83,50	99,6%	83,75	99,41%	84,75	99,88%	85,75%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2017 APK SD/MI/Paket A terealisasi 104,00% dengan capaian kinerja 97,7%, sementara tahun 2018 turun menjadi 103% dengan capaian kinerja 98,10%. Sedangkan tahun 2019 APK SD/MI/Paket A tercatat sebesar 104,30% dengan capaian kinerja 99,48%. Pencapaian APK SD/MI tahun 2019 ini telah memberikan kontribusi sebesar 100,53% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

Selanjutnya APK SMP/MTs/Paket B tahun 2019 terealisasi sebesar 91,50% dengan capaian kinerja 99,6%, terjadi peningkatan 0,55% di tahun 2018 dimana APK SMP/MTs/Paket B terealisasi sebesar 92% dengan capaian kinerja 99,66% dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar 92,30% dengan capaian kinerja sebesar 99,66%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 telah memberikan kontribusi sebesar 98,45%.

Sedangkan APK SMA/MA/SMK/Paket C tahun 2017 terealisasi sebesar 83,50% dengan capaian kinerja 99,6%

dan pada tahun 2018 terealisasi sebesar 83,75% dengan capaian kinerja 99,41%, kemudian tahun 2019 APK SMA/MA/SMK/Paket C terealisasi sebesar 84,75% dengan capaian kinerja 99,88%. Terhadap target RPJMD tahun 2021 telah memberikan kontribusi sebesar 98,83%.

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah disetiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan dan semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan otonomi daerah. APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM ini digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Pencapaian APM SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan SMA/MA/SMK/Paket di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 3.45

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Target RPJMD TH 2021
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
	APM	%		99,7%		93,00%		99,47%	96,25

201

1	SD/MI/Paket A	%	92,50	99,4%	103	99,32%	94,00	99,66%	75,25
2.	SMP/MTs/ Paket B	%	72,00	99,36%	73,00	98,85%	74,00	99,62%	70,00
3.	SMA/MA/SMK/ Paket C		64,50		64,75		65,75		

Tabel diatas menunjukan bahwa tahun 2017 APM SD/MI/Paket A terealisasi 92,50% dengan capaian kinerja 99,7%, sementara tahun 2018 naik menjadi 103% dengan capaian kinerja 93,00%, kemudian tahun 2019 kembali turun karena hanya terealisasi sebesar 94,00% dengan capaian kinerja 99,47%. Pencapaian APM SD/MI tahun 2019 ini telah memberikan kontribusi sebesar 97,66% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

Selanjutnya APM SMP/MTs/Paket B tahun 2017 terealisasi sebesar 72,00% dengan capaian kinerja 99,4%, terjadi peningkatan 1,39% di tahun 2018 dimana APM SMP/MTs/Paket B terealisasi sebesar 73% dengan capaian kinerja 99,32%. Kemudian pada tahun 2019 APM SMP/MTs/Paket B terealisasi sebesar 74,00 dengan capaian kinerja 99,66%. Pencapaian APM SMP/MTs/Paket B tahun 2019 ini telah memberikan kontribusi sebesar 98,34% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021

Sedangkan APM SMA/MA/SMK/Paket C tahun 2017 terealisasi sebesar 64,50% dengan capaian kinerja 99,36% dan pada tahun 2018 terealisasi sebesar 64,75% dengan capaian kinerja 98,85%. Kemudian tahun 2019 APM SMA/MA/SMK/Paket C terealisasi sebesar 99,62%. Terhadap target RPJMD tahun 2021 pencapaian tahun 2019 telah memberikan kontribusi sebesar 93,93%.

Pencapaian sasaran meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan

Gambar 3.36



*SMP Negeri 2 Palu

dasar dan pengembangan pendidikan menengah ini didukung oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memasukan kurikulum muatan lokal agar selaras dengan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga dapat meningkatkan akses keterampilan hidup bagi peserta didik. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan dan pencapaian pelaksanaan pendidikan ditingkat sekolah terutama dalam rangka mengatasi pengaruh krisis ekonomi di era globalisasi.

Dalam rangka perluasan akses pendidikan, upaya yang dilakukan adalah menambah ketersediaan sekolah yakni ketersediaan sarana pendidikan yang memadai. Pada Tahun 2019, realisasi rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dan persentase kondisi bangunan adalah sebagai berikut :

- Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada tingkat SD/MI telah mencapai 88,84% dengan kondisi sekolah dalam keadaan baik sebesar 70,85%;
- Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMP/MTs) terhadap penduduk usia sekolah menengah tingkat SMP/MTs mencapai 75,85%, dengan kondisi bangunan baik sebesar 85,96%;
- Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMK/MA) per 10000 penduduk usia sekolah menengah atas mencapai 51,50% dengan kondisi bangunan SMA/MA dalam keadaan baik sebesar 88,65%, sedangkan rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMK/SLB) per 10000 penduduk usia sekolah menengah atas mencapai 51,50% untuk bangunan SMK keadaan baik mencapai 93,36%.

Selain keberadaan gedung sekolah yang memadai, ketersediaan guru terhadap murid akan berkorelasi terhadap peningkatan mutu dan pemenuhan hak warga atas pendidikan. Pada Tahun 2019, rasio guru terhadap murid (SD/MI) perkelas rata-rata 27 siswa/guru, rasio guru terhadap murid pada tingkat SMP/MTs perkelas rata-rata 27 siswa/guru dan rasio guru terhadap murid pada tingkat SMA/MA/SMK perkelas rata-rata juga mencapai 27 siswa/guru.

Capaian yang telah diuraikan diatas berkaitan dengan 2 sasaran strategis yaitu tuntasnya angka melek aksara dan meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk meningkatkan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah telah dilakukan melalui program-program berikut ini :

- Program fasilitasi tugas pembantuan kependidikan.
- Program pembinaan pendidikan menengah atas.
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- Program pendidikan menengah kejuruan.
- Program BOS di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.

22. Sasaran Keduapuluhdua Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

Sasaran meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan indikator kinerja Usia Harapan Hidup menunjukan keberhasilan, dimana tahun 2019 capaian kinerjanya mencapai 99,% yang bermakna sangat baik. Berikut data dan penjelasannya :

Tabel 3.46

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	Satuan	2017		2018		2019		Target RPJMD TH 2021	Capaian 2019 THD RPJMD
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,35	101%	67,32	99,96%	67,78	99,5%	68	99,68

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Usia Harapan Hidup di Sulawesi Tengah tahun 2017 sebesar 67,35 dengan capaian kinerja 101%, namun pada tahun 2018 turun 0,04% menjadi 67,32 tahun dengan capaian kinerja 99,96%. Sedangkan pada tahun 2019 Usia Harapan Hidup di Sulawesi Tengah tercatat 67,78 tahun dengan capaian kinerja 99,5% atau naik 0,68% dibandingkan tahun 2018. Pencapaian angka usia harapan hidup tahun 2019 ini telah memenuhi 99,68% dari target akhir RPJMD tahun 2021.

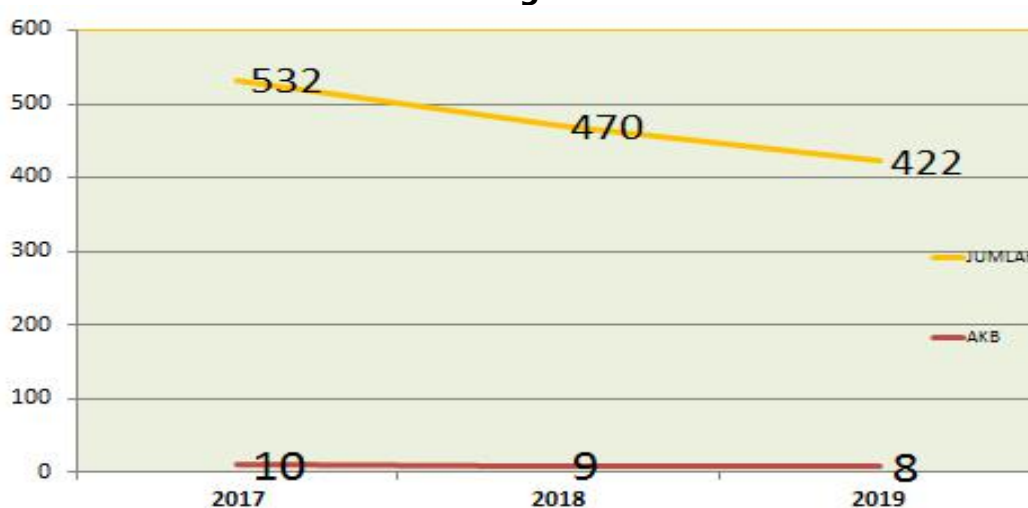
Pencapaian angka harapan hidup yang tinggi juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama disektor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan angka usia harapan hidup dipengaruhi dari beberapa faktor yang dalam hal ini faktor kesehatan lebih berperan penting selain faktor lain seperti ekonomi, budaya dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat dan juga pelayanan kesehatan yang baik juga akan sangat mempengaruhi.

Beberapa trend juga menunjukan dinamika dalam pencapaian derajat kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah, sebagai contoh adalah trend tentang prevelensi balita gizi buruk. Tahun 2019 persentase balita gizi buruk di Sulawesi Tengah sebesar 6,2%. Hal ini ditunjang dengan adanya *Terauphatic Feeding Centre* (CFC) di beberapa

Kabupaten/Kota sehingga kasus gizi buruk segera dapat tertangani. Ditahun 2019 terdapat 620 kasus gizi buruk.

Selain gizi buruk, Angka kematian bayi ini juga merupakan salah satu indikator yang sangat sensitif untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat disuatu wilayah. Trend jumlah dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Sulawesi Tengah selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 3.37
Trend Jumlah dan Angka Kematian Bayi
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2019



Sumber data : Dinas Kesehatan Prov. Sulteng, 2020

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dari 3 tahun terakhir jumlah dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Sulawesi Tengah sudah mengalami penurunan. Jumlah kematian tahun 2017 sebanyak 532 turun menjadi 470 pada tahun 2018 dan turun menjadi 422 tahun 2019. Begitu pula dengan angka kematian bayi pada tahun 2017 sebesar 10 per 1000 kelahiran hidup, turun menjadi 9 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2018 dan turun menjadi 8 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019. Bila di dibandingkan dengan target AKB Nasional sebesar 24, maka AKB Provinsi Sulawesi Tengah yang sebesar 8 yang berarti masih di bawah AKB Nasional tersebut.

Pencapaian kinerja AKB ini di dukung dengan beberapa kegiatan antara lain:

- Program SALAMA INA (Selamatkan Ibu dan Anak) bertujuan mendekatkan akses pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan. Adapun bentuk kegiatannya meliputi antenatal care (pemeriksaan kehamilan), Pertolongan persalinan dan nifas, Pelayanan Komplikasi, Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi serta pelayanan bayi baru lahir sesuai standar.
- Mengoptimalkan pelaksanaan kelas ibu hamil yang bertujuan untuk mempersiapkan ibu agar dapat melalui proses persalinan dengan selamat dan melahirkan bayi yang sehat.

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi faktor penting dalam pembangunan kesehatan. Hal ini juga perlu diikuti dengan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi pelayanan kesehatan yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum tercatat sebesar 473 orang, dokter spesialis sebesar 249 Orang, dokter gigi 294 orang, tenaga kesehatan lainnya mencapai 10.082 orang yang terdiri atas apoteker, asisten apoteker, sarjana kesehatan masyarakat, bidan dan perawat. Hampir separuh dari tenaga kesehatan non dokter tersebut adalah perawat, yaitu sebesar 55,40%.

Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Sulawesi Tengah tahun 2019 sebanyak 3.498 unit dengan rasio 0,2. Hal ini dapat diartikan bahwa satu unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melayani 835,3 penduduk. Sedangkan untuk proyeksi 2019, jumlah penduduk yang

meningkat akan mempengaruhi rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu persatuan penduduk. Namun yang perlu menjadi perhatian, rasionya dari tahun ke tahun semakin menurun, dan ini menjadi tantangan ke depan bagi pemerintah daerah.

Selain Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, sarana kesehatan lain yang penting adalah rumah sakit. Berdasarkan jenis dan pengelolaannya, rumah sakit di Sulawesi Tengah dibagi dalam kategori rumah sakit umum (Daerah dan Swasta) sebanyak 25 rumah sakit. Dengan jumlah penduduk Sulawesi Tengah 2.921.715 jiwa, rasio rumah sakit persatuan penduduk Sulawesi Tengah tahun 2019 adalah sebesar 0,001 dengan kata lain satu rumah sakit melayani 121.738 jiwa.

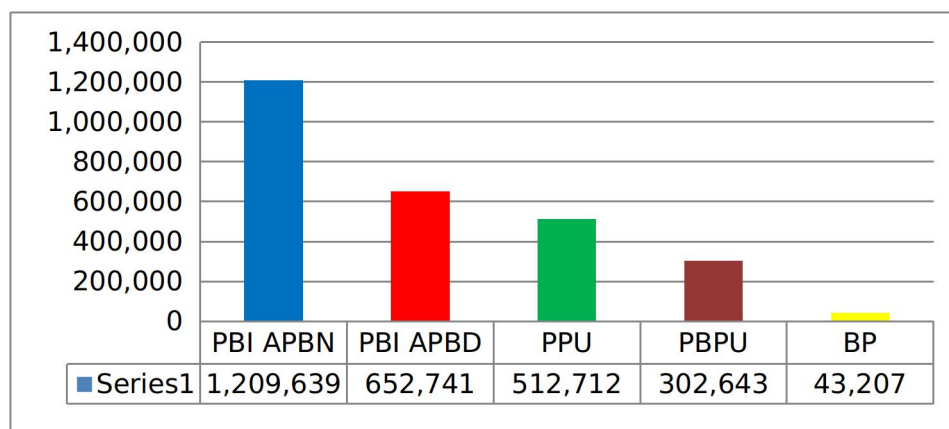
Selain itu, data penting yang terkait dengan pencapaian indikator angka usia harapan hidup adalah cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Integrasi Jamkesda ke JKN merupakan suatu keharusan sesuai roadmap JKN yang telah ditetapkan secara nasional yakni pada tahun 2019 diharapkan dapat terwujud *Universal Health Coverage* (UHC). Perkembangan integrasi Jamkesda merupakan salah satu indikator kemajuan peningkatan cakupan JKN terutama bagi keluarga miskin (Gakin) dan tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah sesuai dengan regulasi yang ada. Peserta yang menjadi sasaran integrasi Jamkesda adalah Gakin diluar kuota PBI-JKN yang telah ditetapkan oleh Kemensos RI.

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Ada tiga dimensi utama *Universal Health Coverage* (UHC) yakni berdasarkan cakupan penduduk, cakupan pelayanan dan cakupan proteksi pembiayaan

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, progress pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) di Sulawesi Tengah saat ini

telah mencapai 91,63 %, dimana dari 2.969.475 jiwa jumlah penduduk yang telah menjadi peserta JKN sebanyak 2.720.942 jiwa. Adapun distribusi peserta JKN-KIS berdasarkan segmentasi per Desember 2019 sebagaimana grafik berikut.

Gambar 3.38
Distribusi Peserta JKN KIS berdasarkan Segmentasi Tahun 2019



dikeluarkan

Sumber data : Dinas Kesehatan Prov. Sulteng, 2020

Dari aspek kepesertaan, pada tahun 2019 telah dikeluarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 79/huk/2019 tentang penonaktifan dan perubahan data peserta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 tahap keenam, dimana masyarakat miskin dan tidak mampu yang sebelumnya merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dibiayai APBN sebanyak 95.714 jiwa dinonaktifkan karena miskin bersifat dinamis dan rentan, sehingga jumlah peserta BPJS di Kabupaten/Kota berkurang dan memberi daya ungkit tidak tercapainya cakupan kepesertaan yang merupakan salah satu kriteria *Universal Health Coverage* (UHC).

Adapun indikator pencapaian persentase Kabupaten/Kota yang *Universal Health Coverage* (UHC) di Provinsi Sulawesi

Tengah, pada tahun 2019 terealisasi sebesar 53,8 % dari target awal 100 %. Kabupaten/Kota yang jumlah kepesertaannya masih mencapai kriteria *Universal Health Coverage* (UHC) yakni sebanyak 7 Kabupaten/Kota terdiri dari Kota Palu, Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional -Kartu Indonesia Sehat dengan pola pembiayaan 20% kontribusi Provinsi dan 80% kontribusi Kabupaten/Kota.

Dengan adanya kebijakan tersebut, sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah termasuk masyarakat miskin telah memiliki jaminan kesehatan baik sebagai peserta penerima bantuan iuran yang dibiayai oleh APBN maupun APBD.

Seiring dengan meningkatnya mutu pelayanan di fasilitas kesehatan, tingkat utilisasi pelayanan kesehatan juga meningkat. Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2019 mencapai 58 % dari target awal sebesar 25 %. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan program PIS PK di Kabupaten/Kota yang mengutamakan upaya promotif dan preventif, status kesehatan masyarakat miskin semakin membaik.

Program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk peningkatan usia harapan hidup adalah :

- Program manajemen pembangunan kesehatan.

- Program upaya kesehatan masyarakat.
- Program upaya perbaikan gizi masyarakat.
- Program upaya kesehatan lingkungan.
- Program upaya pengendalian penyakit menular dan imunisasi.
- Program upaya pengendalian penyakit tidak menular.
- Program upaya kesehatan perorangan.
- Program upaya pembiayaan jaminan kesehatan.
- Program upaya pelayanan kesehatan primer.
- Program upaya penyediaan SDM kesehatan.

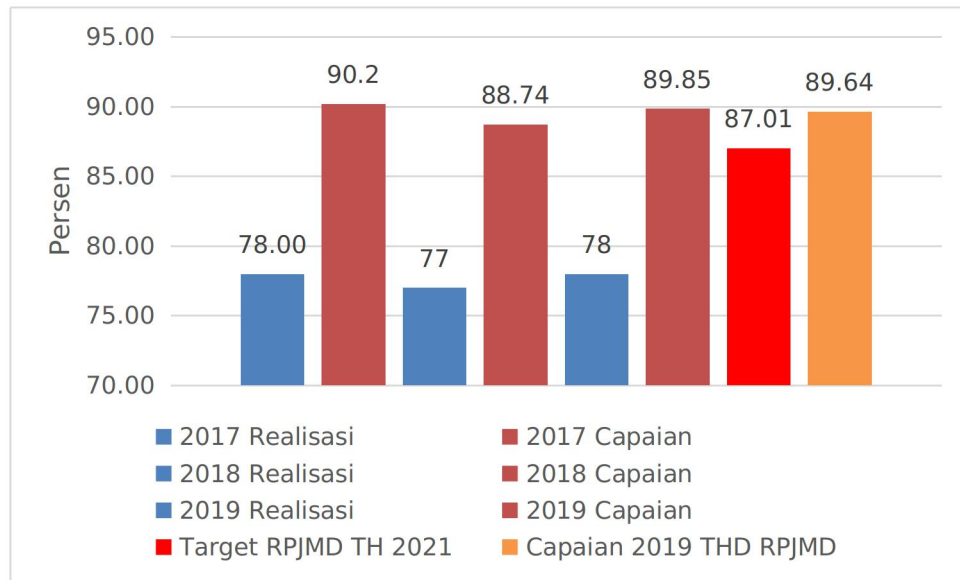
23. Sasaran Keduapuluhtiga Suksesnya Keluarga Berencana dan Terciptanya Keluarga Berkualitas.

Sasaran suksesnya keluarga berencana dan terciptanya keluarga berkualitas dengan dua indikator kinerja sasaran, data capaian kinerjanya sebagai berikut :

1) Cakupan peserta KB aktif

Realisasi dan capaian kinerja peserta KB aktif dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.39
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja
Cakupan
peserta KB aktif Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian
Tahun
2019 terhadap Target akhir RPJMD



Data yang tersaji pada gambar diatas menunjukan bahwa cakupan peserta KB aktif tahun 2017 sebesar 78% dengan capaian kinerja 90,2%. Terjadi penurunan 1 poin jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar 77% dengan capaian kinerja 88,74%. Tahun 2019 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Sulawesi Tengah sebesar 515.793 dengan cakupan peserta KB aktif sebesar 402.222 atau sebesar 78% dengan capaian kinerja sebesar 89,85%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, cakupan peserta KB aktif tahun 2019 ini telah memberikan kontribusi sebesar 89,64%.

Ketidakoptimalan pencapaian target cakupan peserta KB aktif di Sulawesi Tengah dikarenakan adanya kegiatan pendukung yang hasilnya tidak maksimal yaitu kegiatan pembinaan dan koordinasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Disamping itu pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB baru selain dilayani pada klinik KB dan tenaga kesehatan, mereka juga adalah peserta KB mandiri yaang secara mandiri membeli pil KB, kondom dan alat

kontrasepsi lainnya pada apotek sehingga tidak tercatat sebagai peserta KB baru.

Kendala/permasalahan ketidakoptimalan capaian indikator kinerja ini juga disebabkan adanya faktor lain seperti :

- Pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB baru selain dilayani pada klinik KB dan tenaga kesehatan, mereka juga adalah peserta KB mandiri yang secara mandiri membeli pil KB, kondom pada apotek sehingga tidak tercatat sebagai peserta KB baru.
- Meningkatnya pasangan usia subur yang menggunakan KB alami seperti pantang berkala maupun unmednet, dimana mereka tidak terlayani oleh pelayanan KB karena berada di wilayah kepulauan dan perbatasan;
- Jumlah penyuluh KB (PLKB) yang terbatas disebabkan karena terjadinya alih tugas dan fungsi dari jabatan fungsional ke jabatan struktural;
- Terbatasnya tenaga penyuluh yang ada dilapangan sebagai ujung tombak dalam memberikan informasi tentang KB dan kesehatan reproduksi;
- Belum optimalnya penyuluhan para pelayanan kontrasepsi yang dilakukan tenaga kesehatan dan PLBK sehingga pasangan usia subur belum mendapatkan informasi yang akurat tentang jenis dan alat kontrasepsi yang sesuai untuk mereka.

Berikut data pelayanan kontrasepsi di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 :

Tabel 3.47
Cakupan Pelayanan Kontrasepsi Tahun 2019

KABUPATEN	PELAYANAN KONTRASEPSI														
	FASKES KB PEMERINTAH			FASKES KB SWASTA			PRAKTIK DOKTER			PRAKTIK BIDAN			JEJARING LAINNYA		
	ADA	LAPOR	%	ADA	LAPOR	%	ADA	LAPOR	%	ADA	LAPOR	%	ADA	LAPOR	%
(2)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Banggai	29	28	96,6	1	1	100,0	14	0	0,0	65	2	3,1	0	0	0,0
Poso	26	26	100,0	1	1	100,0	1	1	100,0	1	1	100,0	0	0	0,0
Donggala	20	20	100,0	1	1	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Toli-Toli	18	18	100,0	0	0	0,0	5	0	0,0	70	45	64,3	0	0	0,0
Buol	12	10	83,3	2	1	50,0	0	0	0,0	1	0	0,0	0	0	0,0
Morowali	10	10	100,0	1	1	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	114	114	100,0
Banggai Kepulauan	15	10	66,7	0	0	0,0	1	0	0,0	0	0	0,0	9	0	0,0
Parigi Mautong	26	26	100,0	2	2	100,0	1	0	0,0	8	0	0,0	0	0	0,0
Tojo Una-Una	15	10	66,7	2	1	50,0	6	0	0,0	1	0	0,0	1	0	0,0
Sigi	20	20	100,0	1	1	100,0	0	0	0,0	1	0	0,0	0	0	0,0
Banggai Laut	11	11	100,0	0	0	0,0	2	2	100,0	2	2	100,0	93	93	100,0
Morowali Utara	14	9	64,3	2	1	50,0	8	1	12,5	1	1	100,0	24	1	4,2
Kota Palu	25	20	80,0	10	10	100,0	1	0	0,0	71	0	0,0	53	2	3,8
JUMLAH	241	218	90,5	23	20	87,0	39	4	10,3	221	51	23,1	294	210	71,4

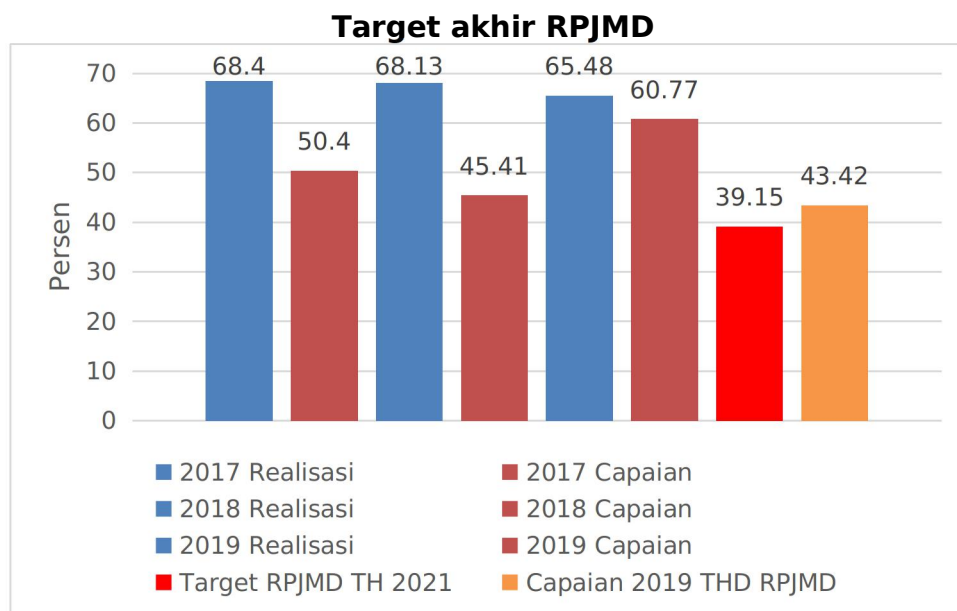
Sumber data : BKKBN Perwakilan Sulteng, 2020

Keberhasilan program Keluarga Berencana akan sangat berkorelasi dengan Laju Pertumbuhan Penduduk. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk mengindikasikan keberhasilan program Keluarga Berencana yang didukung oleh perbaikan ekonomi secara umum. Upaya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk ini untuk mencegah terjadinya ledakan penduduk yang akan mempengaruhi kualitas dan kesejahteraan penduduk itu sendiri. Program KB dirancang untuk menekan angka kelahiran, menciptakan norma keluarga kecil yang bahagia sehingga terbuka peluang bagi suatu keluarga untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

2) Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I

Realisasi dan capaian kinerja Persentase keluarga parasejahtera dan sejahtera I dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.39
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja
Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I Tahun
2017, 2018, 2019 dan capaian Tahun 2019 terhadap



Gambar diatas menunjukkan bahwa persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I tahun 2017 sebesar 68,4% dengan capaian kinerja 50,4%, terjadi kenaikan 0,39% pada tahun 2018, dimana tahun 2018 persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I terealisasi sebesar 68,13% dengan capaian kinerja hanya sebesar 45,41%. Sementara pada tahun 2019 realisasi kinerja persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I adalah sebesar 65,48% dengan capaian kinerja sebesar 60,77%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I tahun 2019 ini baru memberikan kontribusi sebesar 43,42%.

Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 709.510 keluarga. Dari jumlah tersebut sebanyak 107.268 keluarga yang masuk dalam kategori keluarga pra sejahtera dan 357.322 keluarga yang masuk dalam kategori keluarga sejahtera I. Sehingga jika dipersentasekan, terdapat 65,48% keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.

Beberapa program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya mensukseskan Keluarga Berencana dan terciptanya keluarga berkualitas adalah :

- Program pelayanan kontrasepsi
- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam KB
- Program Keluarga Berencana.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2016-2021 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2019 memaparkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi

keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.48
Realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator sasaran

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (rp)	Persentase realisasi anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.	- Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	62,51-81,25 %	82,71%	Prog. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan.	1.980.734.948	1.954.412.744	98,67%
2.	Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas dan reformasi birokrasi.	- Opini BPK.	WTP		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	13.061.767.612	11.949.622.219	91,48%
		- Nilai akuntabilitas Kinerja	B	B	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1.842.052.860	1.824.275.700	99,03%
		- Indeks Reformasi Birokrasi			Prog. Pembinaan kinerja dan pelayanan publik.	1.426.513.435	1.387.817.000	97,3%

3.	Tersedianya berbagai infrastruktur yang memadai.	-	65%	60,57%	Prog. Penyelenggaraan jaringan jalan.	120.595.785.227	124.439.660.310	99,27%
		-			Prog. Pengaturan jasa konstruksi.	339.704.600	317.889.108	93,58%
		-			Prog. Pemberdayaan jasa konstruksi.	882.861.455	841.264.055	93,19%
		-	94%	94,67%	Program Pembinaan dan pengembangan Ketenagalistrikan	1.318.085.526	1.308.107.909	99,24%
		-	61,49%	61,49%	Prog. Penyediaan dan pengelolaan air baku.	2.063.573.950	2.058.924.084	99,77%
		-			Prog. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.	8.073.171.165	6.961.757.408	86,23%
		-	72,35%	62,86%	Prog. Pengembangan perumahan	12.524.449.217,25	12.429.388.822,49	99,24 %
		-			Prog. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial.	1.480.546.992,35	1.465.272.467,35	98,97 %
		-	14,08%	15,13%	Prog. Pengelolaan kegiatan usaha pertambangan	1.412.878.441	1.301.052.604	92,09%
		-			Prog. Pengembangan bidang energy baru terbarukan.	1.575.492.928	1.532.952.188	97,30%
		-						
		-						

4.	Menurunnya angka kemiskinan.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan.	86,71-87,11%	86,82%	Prog. Pemberdayaan fakir miskin , KAT dan PMKS lainnya.	2.116.146.500	2.071.512.560	97,89%
					Prog. Perlindungan dan Jaminan Sosial	362.324.000	321.944.500	88,86%
					Prog. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	687.110.000	678.267.300	98,71%
5.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi.	- Indeks gini	0,354-0,344	0,330				
6.	Terwujudnya koperasi daya saing, edan UKM yang tangguh, berdaya saing, profesional dan mandiri.	Persentase koperasi aktif	65,61%	57%	Prog. Pemberdayaan koperasi.	9.480.725.000	9.266.817.400	97,74%
7.	Meningkatnya daya saing, esiensi dan produktifitas perdagangan	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	32 %	20,07 %	Prog. pengamanan perdagangan luar negeri.	2.113.929.400	2.074.035.591	98,11 %
		Ekspor bersih perdagangan	1000 Juta USD	2.758,5 5 Juta USD	Prog. pengamanan perdagangan dalam negeri.	995.526.600	923.224.700	92,74 %
8.	Terwujudnya industri yang tangguh, profesional dan mandiri.	Pertumbuhan industri	7,60 %	19,42 %	Prog. Penataan struktur industri.	1.900.284.500	1.862.018.626	97,99 %
					Prog. Peningkatan kemampuan teknologi industri.	1.702.004.500	1.573.804.168	92,47 %
9.	Meningkatnya	Nilai						

	a nilai dan realisasi investasi	realisasi Investasi : ➤ PMDN (Rp)	1.331.000.000	4.438.790.800.000	Prog. Peningkatan daya saing penanaman modal	3.695.474.900	3.667.924.153	99,25%
		➤ PMA (Rp)	17.968.500.000	27.075.580.350.000	Prog. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan.	1.980.734.948	1.954.412.744	98,67%
10.	Meningkatnya kesejahteraan gensek dalam pembangunan ekonomi.	Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	75,43%	75,43%	Prog. Peningkatan kualitas hidup perempuan.	798.175.000	668.225.100	83,72%
		Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	77,37%	77,37%	Program Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	486.454.300	461.198.600	94,81%
11.	Meningkatnya jumlah wisatawan.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	19.500 Org	24.660 Org	Prog. Pengembangan pemasaran pariwisata	2.484.975.000	2.343.179.264	94,29%
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	3.600.000 Org	3.090.171 Org	Prog. Pengembangan destinasi pariwisata	3.339.289.000	3.211.901.895	96,16%
					Prog. Pengembangan industri pariwisata	1.534.000.000	1.525.760.492	99,49%
					Prog. Pengembangan kelembagaan kepariwisataan.	1.482.400.000	1.431.644.279	96,58%
12.	Terciptanya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja serta hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat.	Tingkat pengangguran terbuka	3,36%	3,15%	Prog. Kompetensi tenaga kerja dan produktifitas	1.157.337.075	976.887.975	86,04%
		Tingkat partisipasi angkatan.	70%	67,59%	Prog. Perluasan dan penempatan kesempatan kerja.	2.683.088.900	2.536.912.255	96,40%

13.	Terbukanya keterisolasi n daerah-daerah terpencil.	Persentase kabupaten/kota tidak tertinggal	56,15%	76,92%	Prog. Pembangunan daerah tertinggal.	1.252.130.000	1.311.980.000	99,25%
14.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dan lahan ditingkat tapak.	- Kontribusi PDRB Sub sektor kehutanan.	3%		Prog. Pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan. Prog. Perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.	803.673.967 1.453.198.700	799.393.915 1.438.500.600	99,47% 98,99%
15.	Optimalnya tata kelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung.	- Persentase Kerusakan kawasan hutan	0,01%	0,01%	Prog. Planologi dan tata lingkungan hidup.. Prog. Penglolaan hutan produksi dan lestari dan usaha kehutanan. Prog. Pengendalian perubahan iklim. Prog. Konservasi SDA dan ekosistem.	1.664.834.600 803.673.967 497.823.000 1.846.770.060	1.612.059.344 799.393.915 495.593.700 1.843.955.600	96,83% 99,47% 99,55% 99,85%
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Indeks kualitas lingkungan hidup.	70 poin	83 poin	Prog. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Prog. Pembinaan kajian lingkungan hidup strategis. Prog. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.	630.963.450 928.770.000 477.538.000	610.069.784 867.652.400 435.273.600	96,69% 93,42% 91,15%

17	Meningkatnya kesejahteraan petani.	- Nilai tukar petani	104,73	95,40				
18.	Meningkatnya produksi dan mutu tanaman hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan.	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. - Jumlah PDRB sub sektor perkebunan.	28,40% Rp. 12.722.383	26,23% Rp. 12.480.042	Prog. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Prog. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengolahan serta pemasaran hasil perkebunan.	7.739.059.740 16.650.679.575	7.686.982.603 16467.536.774	99,33% 98,90%
19.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan perikanan budidaya.	- Nilai tukar nelayan. - Nilai ekspor hasil Perikanan (USD)	107,68 3.200.000	106,77 3.763.124,02	Prog. Pengembangan SDM kelautan dan perikanan. Prog. Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap. Prog. Pengelolaan sumber daya perikanan budidaya. Prog. Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.	486.836.000 11.153.766.381 8.690.376.000 5.788.941.000	483.355.500 11034.382.739 8.384.155.329 2.431.530.800	99,29 98,93 96,48 42,00
20.	Tuntasnya angka melek aksara.	Persentase angka melek aksara	98,40-98,75	96,50				

21.	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah	- APK			Prog. Fasilitas tugas pembantuan kependidikan.	3.031.434.975	2.961.000.926	97,67%
		➤ SD/MI/Paket A	104,25-104,88%	104,30%		37.609.718.537	36.292.718.870	96,49%
		➤ SMP/MTs/Pkt B	92,25-92,75%	92,30%	Prog. Pembinaan pendidikan menengah atas.			
		➤ SMA/MA/SMK/Paket C	84,00-84,85%	84,75%	Prog. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.	4.582.654.790	4.557.955.589	99,46%
		- APM						
		➤ SD/MI/Paket A	93,75-94,50%	94,00%	Prog. Pendidikan menengah kejuruan..	96.738.808.860	79.021.305.743	81,68%
		➤ SMP/MTs/Pkt B	73,50-74,25%	74,00%			54.621.671.515	93,53%
		➤ SMA/MA/SMK/Paket C	65,00-66,00	65,75%	Prog. BOS kabupaten/kota se Sulteng.	58.397.630.323		
22.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan.	Angka usia harapan hidup.	68 Tahun	67,78 Tahun	Prog. Perencanaan dan Penganggaran pembangunan kesehatan.	767.659.420	797.033.850	99,92%
						1.730.000.000	1.724.227.700	99,67%
					Prog. Upaya kesehatan masyarakat	825.000.000	812.645.700	98,50%
					Prog. Upaya perbaikan gizi masyarakat.	875.000.000	873.294.229	99,81%
					Prog. Upaya kesehatan lingkungan.	2.173.000.000	2.171.845.199	99,95%
					Prog. Upaya pengendalian penyakit menular dan imunisasi.	2.693.891.930	2.566.293.055	95,26%
					Prog. Upaya			

					pengendalian penyakit tdk menular	1.017.500.000	1.009.944.783	99,26%
					Prog. Upaya kesehatan perorangan.	13.567.000.000	9.109.215.431	67,14%
					Prog. Upaya pembiayaan jaminan kesehatan.	2.475.000.000	2.474.300.805	99,97%
					Prog. Upaya penyediaan SDM kesehatan.			
23.	Suksesnya Keluarga Berencana dan terciptanya keluarga berkualitas.	- Cakupan peserta KB aktif. - Persentase keluarga Pra sejahtera dan Sejahtera I.	86,81% 47,03%	78% 65,48%	Prog. Pelayanan kontrasepsi. . Prog. Pembinaan peran serta masyarakat dalam KB. Prog. Keluarga Berencana.			

BAB

IV

BAB IV P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD 2016-2021, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2019 adalah sangat baik, karena dari 23 sasaran yang terdiri dari 42 indikator kinerja utama yang ditetapkan, 35 indikator kinerja utama memenuhi kriteria sangat baik, 3 indikator kinerja utama memenuhi kriteria tinggi, 2 indikator kinerja utama dengan kriteria rendah serta 1 indikator masih menunggu hasil pemeriksaan BPK dan 1 indikator juga masih menunggu hasil evaluasi Kemenpan RB.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

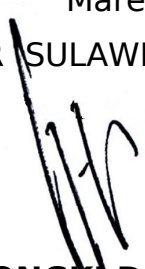
- 1) Mengoptimalkan peran Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

- 3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi tugas pengabdian kita sekalian pada Bangsa dan Negara.

Palu, Maret 2020
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



Drs. H. LONGKI DJANGGOLA,
M.Si